



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/ 166 /406.001.3/2025

TENTANG
DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TINGKAT KABUPATEN
TRENGGALEK TAHUN 2024 DALAM E-WALIDATA SISTEM
INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 600.5.4/4924/Bangda tanggal 10 Juli 2024 Hal Progres Pengisian Modul E-Walidata dan RPJPD 2025-2045 pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 dalam E-Walidata Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447);

8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Satu Data (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 dalam E-Walidata Sistem Informasi Pemerintah Daerah sejumlah 1190 (Seribu Seratus Sembilan Puluh) data, dengan daftar data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Data Statistik Sektoral Daerah Kabupaten Trenggalek sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Kabupaten Trenggalek.

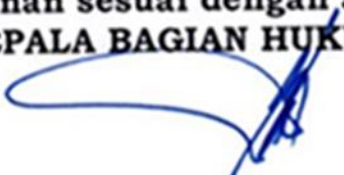
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 17 April 2025

BUPATI TRENGGALEK,

ttd.

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 100.3.3.2/ 166 /406.001.3/2025

TANGGAL :

TENTANG : DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TINGKAT KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024 DALAM E-WALIDATA SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2024	Info Sub Kegiatan
1	1.01.000055	gedung PAUD yang layak	Unit	jumlah gedung paud yang layak	783	[1.01.02.2.03.0040]
2	1.01.000057	gedung PAUD yang rusak sedang/berat	Unit	jumlah geudng paud yang rusak sedang/berat	224	[1.01.02.2.03.0040]
3	1.01.000064	Gudang	Unit	jumlah gudang bada satuan pendidikan yang tersedia	0	[1.01.02.1.01.0001] [1.01.02.1.02.0001] [1.01.02.1.03.0001] [1.01.02.2.01.0001] [1.01.02.2.02.0001]
4	1.01.000089	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan sekolah dasar	3319	[1.01.02.2.01.0026] [1.01.02.4.07.0006]
5	1.01.000090	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi	Orang	Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi	1123	[1.01.02.2.01.0026]
6	1.02.000002	Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting	Unit	Alat atau perangkat Sistem Informasi Kesehatan (Health Information System) adalah solusi teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis informasi terkait dengan layanan kesehatan. Jaringan Internet adalah jaringan global yang terdiri dari ribuan jaringan komputer yang terhubung menggunakan protokol Internet. Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting	25	
7	1.02.000004	Alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Faskes Lainnya	Paket	Alat kesehatan adalah instrumen atau perangkat yang digunakan dalam praktik medis, perawatan kesehatan, atau diagnosis untuk membantu mendeteksi, mencegah, mengobati, atau mengurangi gangguan kesehatan pada manusia. Obat adalah zat atau substansi kimia yang digunakan untuk mencegah, mengobati, atau meredakan penyakit, kondisi medis, atau gejala yang tidak diinginkan pada manusia atau hewan. Bahan habis pakai adalah bahan atau produk yang digunakan sekali atau dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat digunakan lagi setelah digunakan. Bahan medis habis pakai adalah bahan atau produk yang digunakan dalam prosedur medis, diagnosis, atau perawatan kesehatan dan tidak dapat digunakan kembali setelah digunakan satu kali. Jumlah Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman yang didistribusikan ke Fasilitas Kesehatan	3	

8	1.02.000005	Alkes/alat penunjang medik Fasyankes	Unit	Alat Peunjang medis, sering disebut juga sebagai Alat Kesehatan (Alkes), adalah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk membantu dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan kesehatan pasien. Jumlah Alat kesehatan seperti: instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh yang eksisting. Jumlah Alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan seperti: alat, aparatus, mesin yang membantu fungsi pelayanan medis, antara lain seperti peralatan di instalasi rumah duka, instalasi laundry, dan instalasi gizi yang eksisting.	9	[1.02.02.1.01.0010] [1.02.02.2.01.0014] [1.02.02.2.01.0020]
9	1.02.000008	Anak Usia Pendidikan Dasar	Orang	Anak usia pendidikan dasar adalah kelompok usia anak yang berada pada tingkat pendidikan dasar, yang biasanya berkisar antara usia 6 hingga 12 tahun. Jumlah anak usia pendidikan dasar	8496 3	[1.02.02.2.02.0005]
10	1.02.000009	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana	Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optik adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optik lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	115	[1.02.04.2.01.0001]

11	1.02.000012	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin	Sarana	Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin	115	[1.02.04.2.01.0001]
12	1.02.000014	Balita	Orang	Definisi operasional balita mengacu pada kategori usia anak yang berada pada rentang 1 hingga 5 tahun yang masuk dalam perhitungan. Balita perlu mendapatkan pelayanan mencakup pemantauan pertumbuhan, vaksinasi, pemenuhan gizi yang adekuat, serta stimulasi perkembangan yang sesuai dengan tahapan usia untuk memastikan fondasi kesehatan dan kognitif yang baik.	4552 3	[1.02.02.2.02.0004]
13	1.02.000016	Bayi baru lahir	Orang	Bayi baru lahir, atau yang dikenal dengan istilah neonatus, adalah bayi yang baru saja dilahirkan dan berusia antara 0 hingga 28 hari. Jumlah bayi baru lahir	6841	[1.02.02.2.02.0003]
14	1.02.000018	BMHP yang disediakan	Paket	Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang disediakan oleh kabupaten/kota mencakup berbagai jenis alat dan perlengkapan medis yang diperlukan untuk mendukung pelayanan kesehatan, terutama di Puskesmas. Berikut adalah beberapa kategori dan contoh BMHP yang umumnya disediakan: Kategori BMHP Alat Kesehatan Termometer Stetoskop Alat pengukur tekanan darah Sediaan Farmasi Obat-obatan dasar seperti analgesik, antibiotik, dan vaksin Bahan Medis Habis Pakai Jarum suntik Plester Sarung tangan medis Pembalut luka Perlengkapan Kesehatan Lainnya Alat bantu pernapasan (misalnya masker oksigen) Alat untuk pemeriksaan laboratorium (misalnya alat tes gula darah)	2	[1.02.02.2.01.0017] [1.02.02.2.01.0023]
15	1.02.000021	Data Perizinan Industri Rumah Tangga	Dokumen	Industri rumah tangga adalah sektor ekonomi yang mencakup produksi berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau individu untuk kebutuhan sehari-hari dan kehidupan pribadi. Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga	1	

16	1.02.000022	Dokter Gigi	Orang	Dokter gigi adalah seorang profesional medis yang memiliki spesialisasi dalam bidang kedokteran gigi. Jumlah dokter gigi	32	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
17	1.02.000023	Dokter Spesialis Anak	Orang	Dokter Spesialis Anak, juga dikenal sebagai dokter spesialis pediatri, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melanjutkan spesialisasi dalam bidang pediatri. Jumlah Dokter Spesialis Anak	4	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
18	1.02.000024	Dokter Spesialis Anestesi	Orang	Dokter Spesialis Anestesi, juga dikenal sebagai dokter anesthesiologis, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melakukan spesialisasi dalam bidang anesthesiologi. Jumlah Dokter Spesialis Anestesi	3	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
19	1.02.000025	Dokter Spesialis Bedah	Orang	Dokter Spesialis Bedah, juga dikenal sebagai dokter bedah atau dokter bedah spesialis, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melanjutkan spesialisasi dalam bidang bedah. Jumlah Dokter Spesialis Bedah	3	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
20	1.02.000026	Dokter Spesialis Jantung	Orang	Dokter Spesialis Jantung, juga dikenal sebagai dokter kardiolog, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melakukan spesialisasi dalam bidang kardiologi. Jumlah Dokter Spesialis Jantung	2	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
21	1.02.000027	Dokter Spesialis kebidanan	Orang	Jumlah Dokter Spesialis kebidanan	4	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
22	1.02.000028	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	1	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]

23	1.02.000029	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	1	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
24	1.02.000030	Dokter Spesialis Mata	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Mata	3	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
25	1.02.000031	Dokter Spesialis Paru	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Paru	2	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
26	1.02.000032	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Penyakit Dalam	3	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
27	1.02.000033	Dokter Spesialis Radiologi	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Radiologi	2	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
28	1.02.000034	Dokter Spesialis THT	Orang	Jumlah Dokter Spesialis THT	1	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
29	1.02.000035	Dokter Spesialis Urologi	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Urologi	1	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]

30	1.02.000036	Dokter Umum	Orang	Jumlah Dokter Umum	148	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.3.07.0002] [1.02.03.4.07.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
31	1.02.000038	Dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	[1.02.03.2.02.0001]
32	1.02.000041	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	&Pelayanan Kesehatan Khusus, juga dikenal sebagai pelayanan kesehatan spesialis, merujuk pada layanan medis dan perawatan kesehatan yang disediakan oleh dokter atau tenaga medis yang memiliki spesialisasi tertentu dalam bidang kesehatan tertentu. Pelayanan ini diberikan untuk mengatasi masalah kesehatan yang kompleks atau kondisi medis yang memerlukan penanganan lebih lanjut dan lebih mendalam daripada yang biasanya dapat diberikan oleh dokter umum atau pelayanan kesehatan primer. Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus&	5	
33	1.02.000044	Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	3	[1.02.02.2.02.0037]
34	1.02.000045	Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	39	[1.02.02.3.02.0033] [1.02.02.4.02.0033] [1.02.02.2.02.0025]
35	1.02.000053	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3	[1.02.02.1.02.0006] [1.02.02.2.02.0015]
36	1.02.000054	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1	[1.02.02.1.02.0012] [1.02.02.2.02.0050]
37	1.02.000055	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	&Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, juga dikenal sebagai Pelayanan Kesehatan Maternal dan Perinatal, adalah rangkaian layanan kesehatan yang ditujukan untuk mendukung kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, dan anak-anak kecil. Pelayanan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan ibu dan bayi selama masa kehamilan, persalinan, dan masa awal kehidupan anak. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak&	4	[1.02.02.1.02.0003]
38	1.02.000056	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2	[1.02.02.1.02.0007] [1.02.02.2.02.0016]
39	1.02.000057	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16	[1.02.02.1.02.0008] [1.02.02.2.02.0017]
40	1.02.000058	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1	[1.02.02.1.02.0013]
41	1.02.000059	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	16	[1.02.02.1.02.0011] [1.02.02.2.02.0019]
42	1.02.000062	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12	[1.02.02.1.02.0009] [1.02.02.2.02.0018]

43	1.02.000064	Dokumen hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	[1.02.02.1.02.0024] [1.02.02.3.02.0031] [1.02.02.4.02.0031] [1.02.02.2.02.0049] [1.02.02.3.02.0046] [1.02.02.4.02.0046]
44	1.02.000065	Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2	[1.02.02.1.02.0017] [1.02.02.1.03.0002] [1.02.02.2.02.0020] [1.02.02.2.03.0002]
45	1.02.000066	Dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1	[1.02.02.2.02.0024]
46	1.02.000068	Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	[1.02.04.2.01.0001]
47	1.02.000070	Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	[1.02.02.2.02.0029]
48	1.02.000071	Dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	[1.02.02.2.04.0004]
49	1.02.000072	Dokumen hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1	[1.02.02.1.02.0026]
50	1.02.000073	Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	22	[1.02.02.1.02.0020]
51	1.02.000074	Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3	[1.02.02.1.02.0031] [1.02.02.2.02.0034]
52	1.02.000075	Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	[1.02.02.2.02.0033]
53	1.02.000076	Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	&Operasional Pelayanan Rumah Sakit adalah rangkaian kegiatan dan proses yang dilakukan di dalam rumah sakit untuk menyediakan layanan kesehatan kepada pasien. Hal ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rumah sakit. Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit&	4	[1.02.02.1.02.0022] [1.02.02.2.02.0032]
54	1.02.000077	Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	46	
55	1.02.000079	Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	35	[1.02.02.2.02.0035]
56	1.02.000080	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	46	[1.02.02.1.04.0001] [1.02.02.1.04.0003] [1.02.07.3.01.0001] [1.02.07.4.01.0001] [1.02.02.2.04.0001] [1.02.02.2.04.0002] [1.02.02.2.04.0003] [1.02.07.3.01.0002] [1.02.07.4.01.0002]
57	1.02.000082	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	11	[1.02.02.2.04.0002]
58	1.02.000085	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional	46	[1.02.02.1.04.0001] [1.02.02.2.04.0001]

59	1.02.000086	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	46	[1.02.02.1.04.0003] [1.02.07.3.01.0002] [1.02.07.4.01.0002] [1.02.02.2.04.0003]
60	1.02.000087	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	35	[1.02.02.2.04.0002]
61	1.02.000088	Faskes lainnya	Unit	Jumlah Faskes lainnya	3	[1.02.02.1.01.0002] [1.02.02.1.01.0004] [1.02.02.1.01.0008] [1.02.02.2.01.0003] [1.02.02.2.01.0007] [1.02.02.2.01.0010]
62	1.02.000091	Gudang umum	Unit	Jumlah Gudang umum	19	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
63	1.02.000093	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	1	[1.02.04.2.04.0001]
64	1.02.000094	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan	Dokumen	Jumlah dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan	1	[1.02.04.2.05.0001]
65	1.02.000097	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Dokumen	Jumlah dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	1	[1.02.04.2.03.0001]
66	1.02.000098	HCU	Unit	Jumlah HCU	3	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
67	1.02.000099	Ibu bersalin	Orang	Jumlah Ibu Bersalin	6805	[1.02.02.2.02.0002]
68	1.02.000100	Ibu Hamil	Orang	Jumlah ibu hamil	6340	[1.02.02.2.02.0001]
69	1.02.000101	ICCU/ICVCU	Unit	Jumlah ICCU/ICVCU	1	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
70	1.02.000102	ICU	Unit	Jumlah ICU	1	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
71	1.02.000104	Kamar mandi/WC (perempuan dan laki-laki terpisah)	Unit	Jumlah Kamar mandi/WC (perempuan dan laki-laki terpisah)	84	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
72	1.02.000105	Kegiatan Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Kuantitas	Jumlah Kegiatan Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	10	[1.02.05.1.01.0001] [1.02.03.3.08.0001] [1.02.03.4.08.0001]
73	1.02.000106	kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	Jumlah kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat	10	[1.02.05.2.01.0001]
74	1.02.000107	kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	Jumlah kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	16	[1.02.05.2.03.0001]
75	1.02.000108	kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	Jumlah kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	12	[1.02.05.2.02.0001]
76	1.02.000109	Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	Keluarga	Jumlah Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	6316	[1.02.02.1.02.0030]

77	1.02.000111	Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	Jumlah Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	[1.02.02.2.02.0036]
78	1.02.000113	NICU	Unit	Jumlah NICU	1	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
79	1.02.000114	obat dan vaksin yang disediakan	Paket	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	1	[1.02.02.1.01.0022] [1.02.02.2.01.0023]
80	1.02.000116	Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Orang	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	1564	[1.02.02.2.02.0021]
81	1.02.000117	Orang kecanduan NAPZA	Orang	Jumlah Orang kecanduan NAPZA	68	[1.02.02.1.02.0014]
82	1.02.000118	orang terduga menderita HIV	Orang	Jumlah orang terduga menderita HIV	91	[1.02.02.2.02.0012]
83	1.02.000119	orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	Orang	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	6488	[1.02.02.2.02.0011]
84	1.02.000120	orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1564	[1.02.02.2.02.0010]
85	1.02.000121	Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA	Orang	Jumlah Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA	1405 7	[1.02.02.2.02.0027]
86	1.02.000122	Organisasi masyarakat bidang kesehatan	Organisasi Masyarakat	Jumlah Organisasi masyarakat bidang kesehatan	13	[1.02.05.1.01.0001]
87	1.02.000123	Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB	Paket	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB	3	[1.02.02.1.02.0025]
88	1.02.000140	Pengolahan Limbah	Unit	Jumlah Pengolahan Limbah	21	[1.02.02.1.01.0002] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.1.01.0004] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0003] [1.02.02.2.01.0022] [1.02.02.2.01.0007] [1.03.02.1.01.0077] [1.03.02.1.01.0096] [1.03.02.1.01.0082] [1.02.02.2.02.0006] [1.02.03.2.01.0001] [1.02.02.1.01.0001]
89	1.02.000141	penyalahguna NAPZA	Orang	Jumlah penyalahguna NAPZA	101	[1.02.02.2.02.0022]
90	1.02.000142	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	kualitas	Jumlah Penyelenggara Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	12	[1.02.05.1.02.0001]
91	1.02.000153	Peralatan di ruang rawat inap (tempat tidur, dll)	Unit	Jumlah Peralatan di ruang rawat inap (tempat tidur, dll)	793	[1.02.02.1.01.0010]
92	1.02.000154	Peralatan di ruang rekam medik	Unit	Jumlah Peralatan di ruang rekam medik	4	[1.02.02.1.01.0010]
93	1.02.000155	Peralatan penanggulangan kebakaran	Unit	Jumlah Peralatan penanggulangan kebakaran	255	[1.02.02.1.01.0010]
94	1.02.000156	Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	Unit	Jumlah Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	65	[1.02.02.1.01.0010]
95	1.02.000157	Perizinan Industri Rumah Tangga	Unit	Jumlah perizinan Industri Rumah Tangga	551	
96	1.02.000158	PICU	Unit	Jumlah PICU	1	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
97	1.02.000161	Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	Unit	Jumlah Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	551	[1.02.04.2.06.0001]
98	1.02.000162	Public Safety Center (PSC 119)	Unit	Jumlah Public Safety Center (PSC 119)	1	[1.02.02.1.02.0023] [1.02.02.2.02.0038]

99	1.02.000164	Puskesmas	Unit	Jumlah Puskesmas	22	[1.02.02.3.01.0041] [1.02.02.3.02.0032] [1.02.02.4.01.0041] [1.02.02.4.02.0032] [1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006] [1.02.02.2.01.0009] [1.02.02.3.02.0044] [1.02.02.4.02.0044]
100	1.02.000165	RICU	Unit	Jumlah RICU	1	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
101	1.02.000166	Ruang administrasi	Unit	Jumlah Ruang administrasi	26	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
102	1.02.000167	Ruang Administrasi dan Manajemen	Unit	Jumlah Ruang Administrasi dan Manajemen	26	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0002] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.1.01.0004] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0003] [1.02.02.2.01.0022] [1.02.02.2.01.0007]
103	1.02.000168	Ruang ASI	Unit	Jumlah Ruang ASI	26	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
104	1.02.000169	Ruang Bank Darah Rumah Sakit	Unit	Jumlah Ruang Bank Darah Rumah Sakit	1	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
105	1.02.000170	Ruang cuci linen	Unit	Jumlah Ruang cuci linen	4	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
106	1.02.000172	Ruang Farmasi	Unit	Jumlah Ruang Farmasi	26	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0022] [1.02.02.2.01.0006]
107	1.02.000173	Ruang Gawat Darurat	Unit	Jumlah Ruang Gawat Darurat	26	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.1.01.0006] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
108	1.02.000174	Ruang Gizi	Unit	Jumlah Ruang Gizi	26	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
109	1.02.000176	Ruang Jenazah	Unit	Jumlah Ruang Jenazah	4	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
110	1.02.000177	Ruang kantor untuk karyawan	Unit	Jumlah Ruang kantor untuk karyawan	26	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]

111	1.02.000178	Ruang Kepala Puskersmas	Unit	Jumlah Ruang Kepala Puskersmas	22	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
112	1.02.000180	Ruang kesehatan gigi dan mulut	Unit	Jumlah Ruang kesehatan gigi dan mulut	26	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
113	1.02.000181	Ruang kesesahatan ibu dan KB	Unit	Jumlah Ruang kesehatan ibu dan KB	26	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
114	1.02.000183	Ruang Laboratorium	Unit	Jumlah Ruang Laboratorium	26	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0022] [1.02.02.2.01.0006]
115	1.02.000184	Ruang Laundry	Unit	Jumlah Ruang Laundry	4	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0002] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.1.01.0004] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0003] [1.02.02.2.01.0022] [1.02.02.2.01.0007]
116	1.02.000185	Ruang Operasi	Unit	Jumlah Ruang Operasi	6	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
117	1.02.000186	Ruang Parkir	Unit	Jumlah Ruang Parkir	26	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0002] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.1.01.0004] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0003] [1.02.02.2.01.0022] [1.02.02.2.01.0007]
118	1.02.000187	Ruang Pemeliharaan Sarpras	Unit	Jumlah Ruang Pemeliharaan Sarpras	26	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0002] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.1.01.0004] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0003] [1.02.02.2.01.0022] [1.02.02.2.01.0007]
119	1.02.000191	Ruang pendaftaran dan rekam medik	Unit	Jumlah Ruang pendaftaran dan rekam medik	26	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
120	1.02.000192	Ruang Pengelolaan Gas Medik	Unit	Jumlah Ruang Pengelolaan Gas Medik	26	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
121	1.02.000193	Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas	Unit	Jumlah Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas	26	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
122	1.02.000195	Ruang persalinan	Unit	Jumlah Ruang persalinan	26	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]

123	1.02.000196	Ruang Radiologi	Unit	Jumlah Ruang Radiologi	4	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
124	1.02.000197	Ruang rapat/diskusi	Unit	Jumlah Ruang rapat/diskusi	26	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
125	1.02.000202	Ruang Rehabilitasi Medik	Unit	Jumlah Ruang Rehabilitasi Medik	1	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
126	1.02.000203	Ruang Rekam Medis	Unit	Jumlah Ruang Rekam Medis	26	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.1.01.0006] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
127	1.02.000204	Ruang Sterilisasi	Unit	Jumlah Ruang Sterilisasi	26	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0002] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.1.01.0004] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0003] [1.02.02.2.01.0022] [1.02.02.2.01.0006] [1.02.02.2.01.0007]
128	1.02.000205	Ruang tindakan dan gawat darurat	Unit	Jumlah Ruang tindakan dan gawat darurat	26	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
129	1.02.000214	Rumah Sakit kelas C	Unit	Jumlah Rumah Sakit kelas C	2	[1.02.02.2.01.0022]
130	1.02.000215	Rumah Sakit Kelas C dan D	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D	4	[1.02.02.2.04.0001] [1.02.02.2.04.0002]
131	1.02.000216	Rumah Sakit Kelas C dan D yang memiliki izin operasional	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang memiliki izin operasional	4	[1.02.02.2.04.0001]
132	1.02.000217	Rumah Sakit Kelas C dan D yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	4	[1.02.02.2.04.0002]
133	1.02.000218	Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	4	[1.02.02.2.04.0002]
134	1.02.000220	Rumah Sakit kelas D	Unit	Jumlah Rumah Sakit kelas D	2	[1.02.02.2.01.0022]
135	1.02.000224	sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	Unit	Jumlah sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	551	[1.02.04.2.06.0001]
136	1.02.000225	Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan	Paket	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan	14	[1.02.02.2.02.0028]
137	1.02.000228	Tempat tidur rumah sakit	Unit	Jumlah Tempat tidur rumah sakit	451	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]

138	1.02.000229	Tenaga Apotek	Orang	Jumlah Tenaga Apotek	176	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
139	1.02.000230	Tenaga gizi	Orang	Jumlah Tenaga gizi	90	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.3.02.0005] [1.02.03.4.02.0005] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001] [1.02.03.3.03.0002] [1.02.03.4.03.0002]
140	1.02.000231	Tenaga Kebidanan	Orang	Jumlah Tenaga Kebidanan	491	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
141	1.02.000233	Tenaga Keperawatan	Orang	&Tenaga Keperawatan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan para profesional perawat yang berperan dalam memberikan perawatan kesehatan langsung kepada pasien di berbagai setting, seperti rumah sakit, klinik, fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan di masyarakat. Jumlah Tenaga Keperawatan&	1032	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
142	1.02.000235	Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	&Tenaga Kesehatan Lainnya adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada berbagai jenis profesional kesehatan selain perawat dan dokter yang berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Seperti: Ahli Gizi, Farmasis, Fisioterapis, Ahli terapi Okupasi, Tenaga Medis Laboratorium, Asisten Medis, Radiografer, Teknisi Gigi, Ahli Optometri, Tenaga Kesehatan masyarakat dan lainnya. Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya&	663	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
143	1.02.000237	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Orang	&Tenaga Kesehatan Lingkungan adalah profesional kesehatan yang berfokus pada pemahaman dan penanganan isu-isu kesehatan yang terkait dengan lingkungan fisik di mana manusia tinggal dan bekerja. Tugas utama Tenaga Kesehatan Lingkungan adalah memastikan kualitas lingkungan yang sehat dan aman bagi masyarakat serta mencegah penyakit dan masalah kesehatan yang terkait dengan faktor lingkungan. Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan&	57	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]

144	1.02.000238	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	&Tenaga Kesehatan Masyarakat (TKM) adalah profesional kesehatan yang berfokus pada upaya pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Tugas utama Tenaga Kesehatan Masyarakat adalah menerapkan strategi dan program kesehatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah kesehatan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat&	65	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
145	1.02.000239	Tenaga Kesehatan tradisional	Orang	&Tenaga Kesehatan Tradisional (TKT) adalah praktisi kesehatan yang mengandalkan metode dan pengetahuan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi, biasanya berakar dalam budaya dan tradisi suatu masyarakat tertentu. Jumlah Tenaga Kesehatan tradisional&	585	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
146	1.02.000240	Tenaga Keteknisan Medis	Orang	&Tenaga Keteknisan Medis adalah profesional kesehatan yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas teknis dan prosedural dalam pelayanan kesehatan. Nakes ini membantu dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dalam melakukan diagnosis, perawatan, dan penanganan pasien. Jumlah Tenaga Keteknisan Medis&	103	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
147	1.02.000241	Tenaga keterampilan fisik	Orang	&Tenaga Keterampilan Fisik adalah profesional kesehatan yang mengkhususkan diri dalam memberikan terapi fisik untuk memulihkan atau meningkatkan fungsi fisik, mobilitas, dan kebugaran pasien yang mengalami cedera, kelainan fisik, atau kondisi medis tertentu. Jumlah Tenaga keterampilan fisik&	7	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
148	1.02.000242	Tenaga Teknik Biomedika	Orang	&Tenaga Teknik Biomedika adalah profesional kesehatan yang bertanggung jawab untuk memelihara, mengkalibrasi, menguji, dan memperbaiki peralatan medis dan alat kesehatan yang digunakan dalam berbagai fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, laboratorium medis, dan pusat perawatan kesehatan lainnya. Tugas utama mereka adalah memastikan bahwa peralatan medis berfungsi dengan baik, akurat, dan aman untuk digunakan dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan pasien. Jumlah Tenaga Teknik Biomedika&	138	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]

149	1.02.000261	Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine	Layanan	Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine adalah bentuk layanan kesehatan yang menggunakan teknologi telekomunikasi dan informasi, seperti telepon, video conference, atau aplikasi komunikasi online, untuk memberikan konsultasi, diagnosis, dan perawatan jarak jauh kepada pasien. Dalam model telemedicine, pasien dan tenaga kesehatan tidak harus bertemu fisik secara langsung, namun mereka dapat berkomunikasi dan berinteraksi melalui teknologi komunikasi yang telah ada. Jumlah Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine	1	[1.02.02.1.01.0006] [1.02.02.1.02.0010] [1.02.04.1.01.0001] [1.03.02.1.02.0005] [1.03.02.1.02.0011] [1.03.02.1.02.0017] [1.03.02.1.02.0024] [1.02.02.2.02.0008] [1.02.02.2.02.0009] [1.02.02.2.02.0026] [1.02.03.2.01.0002] [1.03.02.2.02.0005] [1.03.02.2.02.0011] [1.03.02.2.02.0017] [1.03.02.2.02.0024]
150	1.02.000262	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Orang	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1335	
151	1.02.000265	penduduk mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	Jumlah penduduk mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5537 9	
152	1.02.000267	Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB	Orang	Penduduk terdampak dan berisiko pada kondisi KLB (Kejadian Luar Biasa) adalah mereka yang terkena dampak langsung atau memiliki risiko tinggi terkena penyakit atau kondisi kesehatan yang menjadi KLB. KLB adalah situasi di mana suatu penyakit menyebar dengan cepat dan meluas di wilayah tertentu atau populasi tertentu melebihi angka yang diharapkan. Jumlah Penduduk terdampak dan berisiko pada kondisi KLB	1	[1.03.10.1.01.0043] [1.02.02.1.02.0002] [1.03.10.2.01.0043] [1.02.02.2.02.0013]
153	1.02.000268	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana	Orang	Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah mereka yang mengalami dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka sebagai akibat dari bencana alam atau situasi darurat lainnya. Krisis kesehatan akibat bencana dapat melibatkan berbagai jenis bencana, seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kekeringan, badai), bencana teknologi (kecelakaan industri, kebocoran nuklir), pandemi penyakit, atau krisis kesehatan lainnya. Jumlah Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana	1	[1.02.02.1.02.0001] [1.03.02.1.01.0081] [1.03.02.1.01.0097] [1.03.02.1.01.0098] [1.03.02.1.01.0099] [1.02.02.2.02.0007] [1.02.02.2.02.0014] [1.03.02.2.01.0081] [1.03.02.2.01.0099] [1.03.02.2.01.0113] [1.03.02.2.01.0122]
154	1.02.000269	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Orang	Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah mereka yang mengalami dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka sebagai akibat dari bencana alam atau situasi darurat lainnya. Krisis kesehatan akibat bencana dapat melibatkan berbagai jenis bencana, seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kekeringan, badai), bencana teknologi (kecelakaan industri, kebocoran nuklir), pandemi penyakit, atau krisis kesehatan lainnya. Jumlah Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	3	[1.02.02.1.02.0001] [1.03.02.1.01.0081] [1.03.02.1.01.0097] [1.03.02.1.01.0098] [1.03.02.1.01.0099] [1.02.02.2.02.0007] [1.02.02.2.02.0014] [1.03.02.2.01.0081] [1.03.02.2.01.0099] [1.03.02.2.01.0113] [1.03.02.2.01.0122]
155	1.02.000270	Penduduk Usia Lanjut	Orang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut	1353 22	
156	1.02.000272	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Orang	Jumlah Tenaga Kesehatan yang memiliki izin Praktik	2202	[1.02.03.2.01.0001]

157	1.02.000273	Pengolahan Limbah	Unit	Jumlah Pengolahan Limbah	21	[1.02.02.2.01.0022] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0003] [1.02.02.2.01.0007] [1.02.02.1.01.0002] [1.02.02.1.01.0004] [1.03.02.1.01.0077] [1.03.02.1.01.0096] [1.03.02.1.01.0082] [1.02.02.2.02.0006] [1.02.03.2.01.0001] [1.02.02.1.01.0001]
158	1.02.000276	Labkesda	Unit	Labkesda adalah unit laboratorium di tingkat daerah atau regional yang bertanggung jawab untuk melakukan berbagai jenis uji laboratorium terkait dengan kesehatan masyarakat. Tugas utama Labkesda melibatkan pengujian sampel kesehatan, diagnosis penyakit, dan pemantauan kesehatan lingkungan di wilayah tertentu. Fungsi Labkesda melibatkan pemeriksaan berbagai parameter, seperti tes darah, urin, bakteriologi, parasitologi, dan lainnya.	1	[1.02.02.3.02.0034] [1.02.02.4.02.0034] [1.02.02.3.02.0047] [1.02.02.4.02.0047]
159	1.02.000294	Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar	Dokumen	Laporan Hasil Penanggulangan Penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar	1	[1.02.02.3.02.0057] [1.02.02.4.02.0057] [1.02.02.3.02.0069] [1.02.02.4.02.0069]
160	1.02.000295	Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan	Laporan	Jumlah Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan	1	[1.02.02.3.02.0060] [1.02.02.4.02.0060]
161	1.02.000297	Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan yang dibina dan dikembangkan	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan yang dibina dan dikembangkan	1	[1.02.02.4.02.0070] [1.02.02.3.02.0070]
162	1.02.000311	Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	46	[1.02.07.3.01.0003] [1.02.07.4.01.0003] [1.02.07.3.01.0003] [1.02.07.4.01.0003]
163	1.02.000313	Fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang terakreditasi	Unit	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang terakreditasi	1	[1.02.07.3.02.0001] [1.02.07.4.02.0001]
164	1.02.000319	penderita Tuberkulosis	Orang	Jumlah orang dengan Tuberkulosis	497	[1.02.02.2.02.0040]
165	1.02.000320	penderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	Jumlah penderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	504	[1.02.02.2.02.0040]
166	1.02.000327	Dokumen fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pelayanan kelanjutan	Dokumen	Jumlah Dokumen fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pelayanan kelanjutan	1	[1.02.02.2.02.0047]
167	1.02.000331	Tatatan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok	Kawasan	Jumlah tatatan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok	16	[1.02.02.2.02.0045]
168	1.03.910177	SPBU Mikro 3 Kilo Liter	Unit	Jumlah gerai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Mikro 3 Kilo Liter (contoh: Pertashop)	4	

169	1.03.910178	SPBU Mikro 3 Kilo Liter Berizin Lengkap	Unit	Jumlah gerai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Mikro 3 Kilo Liter sesuai kewenangan daerah (contoh: Pertashop sudah berizin lengkap dokumen PBG dan SLF) PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) adalah Perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya untuk memulai pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung tersebut sesuai dengan yang direncanakan. SLF (Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung) adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.	3	
170	1.03.910179	SPBU Mikro 3 Kilo Liter Belum Berizin Lengkap	Unit	Jumlah gerai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Mikro 3 Kilo Liter yang belum memiliki kelengkapan perizinan sesuai kewenangan daerah (contoh: Pertashop belum terdapat dokumen perizinan PBG dan atau SLF). PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) adalah Perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya untuk memulai pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung tersebut sesuai dengan yang direncanakan. SLF (Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung) adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.	1	
171	1.05.000001	Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana prioritas kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih aspek manajerial maupun teknis dalam hal komunikasi, koordinasi, maupun pengerahan sumber daya untuk penanganan darurat bencana berdasarkan skenario yang disusun mendekati kondisi sebenarnya	250	[1.05.03.2.02.0010] [1.05.03.2.02.0018]
172	1.05.000006	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analisis Dalam Penanggulangan Kebakaran	Orang	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah	0	[1.05.04.2.01.0007]
173	1.05.000007	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analisis Dalam Pencegahan Kebakaran	Orang	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah	0	[1.05.04.2.01.0007]
174	1.05.000008	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Penanggulangan Kebakaran	Orang	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah	58	[1.05.04.2.01.0007]

175	1.05.000009	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Pencegahan Kebakaran	Orang	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah	58	[1.05.04.2.01.0007]
176	1.05.000013	Data Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	Data kebencanaan adalah Data mengenai Bencana yang sesuai kriteria dan ditetapkan oleh walidata bencana yang disediakan secara bersama ataupun mandiri sebagai hasil pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan yang berisi catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi yang merepresentasikan dampak/kejadian bencana yang menjadi urusan kabupaten/kota	12	[1.05.03.2.04.0004]
177	1.05.000014	Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan serta pengembangan sarana komunikasi dan informasi berbasis online dan paperless terkait metoda pelaporan kebakaran dan penyelamatan dalam satu portal dan bisa setiap saat d mutakhirkan dan bersifat real time yang dimiliki oleh desa/kelurahan dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang Informasi dan Pengolah Data	0	[1.05.04.2.01.0008]
178	1.05.000015	Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Berkelanjutan yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan serta pengembangan sarana komunikasi dan informasi berbasis online dan paperless terkait metoda pelaporan kebakaran dan penyelamatan dalam satu portal dan bisa setiap saat d mutakhirkan dan bersifat real time yang dimiliki oleh desa/kelurahan dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang Informasi dan Pengolah Data	0	[1.05.04.2.01.0008]
179	1.05.000016	Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun) yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan serta pengembangan sarana komunikasi dan informasi berbasis online dan paperless terkait metoda pelaporan kebakaran dan penyelamatan dalam satu portal dan bisa setiap saat d mutakhirkan dan bersifat real time yang dimiliki oleh desa/kelurahan dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang Informasi dan Pengolah Data	0	[1.05.04.2.01.0008]
180	1.05.000017	Desa/Kelurahan yang Terbentuk Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah mekanisme dan proses untuk membentuk dan membina REDKAR pada skala desa/kelurahan yang dilakukan setiap tahunnya dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	9	[1.05.04.2.04.0002]
181	1.05.000018	Desa/Kelurahan yang Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah mekanisme dan proses untuk membentuk dan membina REDKAR pada skala desa/kelurahan yang dilakukan setiap tahunnya dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	9	[1.05.04.2.04.0002]

182	1.05.000023	Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	Dokumen analisis risiko bencana berisi tentang kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menjadi sumber bahaya/ menimbulkan bencana baik yang terjadi secara tiba-tiba dan/atau berangsur di lokasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0	[1.05.03.1.02.0020] [1.05.03.2.02.0013]
183	1.05.000030	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah penyediaan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	12	[1.05.04.2.01.0003]
184	1.05.000031	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran adalah penyediaan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	12	[1.05.04.2.01.0003]
185	1.05.000032	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen yang memuat hasil serangkaian kegiatan untuk mengamankan, mengendalikan dan menangani bahan berbahaya dan beracun agar tidak menimbulkan kebakaran dan yang membahayakan manusia dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran di Kabupaten/Kota	0	[1.05.04.2.01.0004]
186	1.05.000033	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen yang memuat hasil serangkaian kegiatan untuk mengamankan, mengendalikan dan menangani bahan berbahaya dan beracun agar tidak menimbulkan kebakaran dan yang membahayakan manusia dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran di Kabupaten/Kota	0	[1.05.04.2.01.0004]
187	1.05.000034	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard spras damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala spras damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0	[1.05.04.2.01.0005]

188	1.05.000035	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0	[1.05.04.2.01.0005]
189	1.05.000036	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0	[1.05.04.2.01.0005]
190	1.05.000042	Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kab/Kota	2	[1.05.02.2.01.0003]
191	1.05.000052	Dokumen Hasil Pengelolaan Laporan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	Dokumen	Pengelolaan Laporan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Nonyustisi Di Provinsi	0	[1.05.02.7.04.0010]
192	1.05.000053	Dokumen Hasil Pengelolaan Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	Dokumen	Pengelolaan Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Nonyustisi Di Kab/Kota	0	[1.05.02.7.04.0010]
193	1.05.000054	Dokumen Hasil Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	Dokumen	Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	0	[1.05.02.7.04.0010]
194	1.05.000056	Dokumen Hasil Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisi aktivitas Pusat Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Bencana dalam bentuk laporan periodik penerapan prosedur teknis (check list prosedur) untuk penyelenggaraan tugas Pusdalops baik pada aktivitas internal (misal: prosedur serah terima piket) maupun layanan peringatan dini (misal: prosedur sistem peringatan dini banjir) dan/atau layanan pada tindakan awal operasi penanganan darurat bencana tingkat kabupaten/kota provinsi (misal: prosedur aktivasi ruang krisis, prosedur pengendalian evakuasi,dll). aktivitas tersebut termasuk dalam pelayanan dasar SPM SUB	12	[1.05.03.2.02.0017]
195	1.05.000058	Dokumen Hasil Pengendalian Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisi aktivitas Pusat Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Bencana dalam bentuk laporan periodik penerapan prosedur teknis (check list prosedur) untuk penyelenggaraan tugas Pusdalops baik pada aktivitas internal (misal: prosedur serah terima piket) maupun layanan peringatan dini (misal: prosedur sistem peringatan dini banjir) dan/atau layanan pada tindakan awal operasi penanganan darurat bencana tingkat kabupaten/kota provinsi (misal: prosedur aktivasi ruang krisis, prosedur pengendalian evakuasi,dll). aktivitas tersebut termasuk dalam pelayanan dasar SPM SUB	1	[1.05.03.2.02.0017]

196	1.05.000059	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi dalam mempercepat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	4	[1.05.04.2.01.0018]
197	1.05.000060	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi dalam mempercepat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	2	[1.05.04.2.01.0018]
198	1.05.000063	Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen Kajian Risiko Bencana yang sah dan legal dalam bentuk data dan peta yang memberikan analisa ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan bencana untuk mengetahui potensi masyarakat terdampak, potensi kerugian, dan potensi kerusakan lingkungan bila terjadi bencana dan digunakan untuk menyusun kebijakan strategi penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota	1	[1.05.03.1.01.0003] [1.05.03.2.01.0003] [1.05.03.2.01.0001] [1.05.03.2.01.0008]
199	1.05.000064	Dokumen Kerja Sama Antar Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisi perjanjian kesepakatan dan pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana di tingkat provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	0	[1.05.03.1.04.0019] [1.05.03.2.04.0003]
200	1.05.000065	Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisi perjanjian kesepakatan dan pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana di tingkat kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	1	[1.05.03.1.04.0019] [1.05.03.2.04.0003]
201	1.05.000066	Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	Pencegahan Kebakaran adalah kegiatan dalam rangka meminimalisir dampak kejadian kebakaran melalui kajian penyusunan dokumen NSPM yang dilakukan setiap tahun dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pencegahan Kebakaran	0	[1.05.04.2.01.0001]
202	1.05.000070	Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisi kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan. Tersusun dalam dokumen JITUPASNA yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi kabupaten/kota	4	[1.05.03.2.04.0013]

203	1.05.000071	Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	Meupakan dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara BNPB/BPBD kabupaten/kota bersama kementerian/lembaga, perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas pengkajian kebutuhan pascabencana untuk periode waktu tertentu melalui penyusunan dokumen R3P yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1	[1.05.03.2.04.0013]
204	1.05.000077	Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	Merupakan penyediaan dokumen regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota untuk pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota	7	[1.05.03.2.04.0001]
205	1.05.000080	Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	Dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota merupakan dokumen yang berisi proses perencanaan penanganan situasi darurat bencana pada jenis bahaya prioritas Kabupaten/Kota dengan skenario dan tujuan disepakati serta tindakan teknis dan manajerial yang telah ditetapkan, baik yang baru disusun ataupun yang dimutakhirkan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	3	[1.05.03.2.02.0009]
206	1.05.000081	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana merupakan dokumen perencanaan penanggulangan bencana daerah kabupaten/kota yang sah dan legal dan menjadi acuan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana lingkup kewenangan kabupaten/kota yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana, Renas PB, dan kondisi kebencanaan daerah	1	[1.05.03.1.02.0012] [1.05.03.2.02.0014]
207	1.05.000082	Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	Dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana merupakan dokumen perencanaan kedaruratan bencana daerah kabupaten/kota yang sah dan legal berisi kebijakan operasional, sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menanggulangi keadaan darurat bencana tingkat kabupaten/kota	0	[1.05.03.2.02.0011]
208	1.05.000088	Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	SKPDB merupakan dokumen yang berisikan mekanisme koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh unsur dalam organisasi Komando Darurat Bencana untuk penanganan darurat bencana	6	[1.05.03.2.03.0002]
209	1.05.000089	Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat	Dokumen	SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah dimiliki oleh Kab/Kota	1	[1.05.02.1.01.0008] [1.05.02.2.01.0008]
210	1.05.000090	Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dimutakhirkan	Dokumen	SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah dimiliki dan telah di mutakhirkan oleh Kab/Kota	0	[1.05.02.1.01.0008] [1.05.02.2.01.0008]
211	1.05.000091	Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisikan kebijakan/regulasi/SOP Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota dalam rangka penata kelolaan kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota baik dalam hal antara lain struktur dan penugasan, penjenjangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun perencanaan dan penganggaran	2	[1.05.03.1.04.0018] [1.05.03.2.04.0002] [1.05.03.2.04.0014]

212	1.05.000092	Dokumen yang Memuat SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Dokumen	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran adalah upaya untuk memberikan penyediaan sarana dan prasarana damkar yang berkaitan guna operasionalisasi relawan pemadam kebakaran dalam melakukan layanan pencegahan, pemadaman dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	0	[1.05.04.2.04.0003]
213	1.05.000093	Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran adalah serangkaian proses pengumpulan, pencatatan dan pengelolaan data yang berkaitan dengan tersedianya Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada bangunan/gedung/lingkungan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pencegahan	0	[1.05.04.2.02.0001]
214	1.05.000094	Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran adalah serangkaian proses/kegiatan pemeriksaan/pengujian/inspeksi proteksi kebakaran guna memberikan penilaian laik atau tidaknya sesuai standar teknis yang berlaku dengan satuan dokumen, berdasarkan dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pencegahan	2	[1.05.04.2.02.0002]
215	1.05.000098	Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Dokumen	Investigasi Kejadian Kebakaran adalah serangkaian proses dalam menyelidiki dan mencari fakta terkait penyebab suatu kejadian kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Investasi Kejadian kebakaran	0	[1.05.04.2.03.0001]
216	1.05.000099	Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	[1.05.02.1.01.0016] [1.05.02.2.01.0004]
217	1.05.000100	Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian Terhadap Evakuasi yang Sesuai Standar	Dokumen	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian informasi terkait kejadian dan dampak kebakaran serta upaya-upaya penyelamatan	0	[1.05.04.2.05.0002]
218	1.05.000101	Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sesuai Standar	Dokumen	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi adalah kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras evakuasi/penyelamatan, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras evakuasi/penyelamatan pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani sarana dan prasarana	0	[1.05.04.2.05.0002]
219	1.05.000102	Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pertolongan Terhadap Evakuasi yang Sesuai Standar	Dokumen	Investigasi Kejadian Kebakaran adalah serangkaian proses dalam menyelidiki dan mencari fakta terkait penyebab suatu kejadian kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Investasi Kejadian kebakaran	0	[1.05.04.2.05.0002]

220	1.05.000103	Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan yang Sesuai Standar	Dokumen	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi adalah kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras evakuasi/ penyelamatan, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras evakuasi/ penyelamatan pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani sarana dan prasarana	0	[1.05.04.2.05.0002]
221	1.05.000108	Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	Informasi kebencanaan adalah informasi mengenai Bencana yang tersedia secara berkala berdasar kriteria tertentu yang disediakan secara bersama ataupun mandiri sebagai hasil pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan yang berisi catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi yang merepresentasikan dampak/kejadian bencana yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	12	[1.05.03.2.04.0004]
222	1.05.000110	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	Dokumen Hasil Pelaksanaa kerjasama antar lembaga dan kemitraan merupakan dokumen dari suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kesepakatan dalam lingkup tugas dan fungsi Pol PP dalam Pencegahan dalam gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum	2	[1.05.02.1.01.0019] [1.05.02.2.01.0006] [1.05.02.2.01.0016]
223	1.05.000111	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	Kegiatan dalam Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	0	[1.05.02.1.01.0019] [1.05.02.2.01.0016]
224	1.05.000112	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Cegah Dini	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini	0	[1.05.02.1.01.0017] [1.05.02.2.01.0015]
225	1.05.000113	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini	0	[1.05.02.1.01.0017] [1.05.02.2.01.0015]
226	1.05.000114	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Patroli	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui patroli	0	[1.05.02.1.01.0017] [1.05.02.2.01.0015]
227	1.05.000115	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pembinaan	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui pembinaan	0	[1.05.02.1.01.0017] [1.05.02.2.01.0015]
228	1.05.000116	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan	0	[1.05.02.1.01.0017] [1.05.02.2.01.0015]
229	1.05.000117	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawasan	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui pengawasan	0	[1.05.02.1.01.0017] [1.05.02.2.01.0015]
230	1.05.000118	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Penyuluhan	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Penyuluhan/ Sosialisasi	0	[1.05.02.1.01.0017] [1.05.02.2.01.0015]
231	1.05.000119	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana merupakan kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan memperkuat pada aspek penguatan kesiapsiagaan atas potensi bahaya dan kerentanan melalui peningkatan kapasitas kelompok masyarakat/ komunitas yang ada disuatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah kabupaten/kota	6	[1.05.03.1.02.0013] [1.05.03.2.02.0006] [1.05.03.2.02.0020]

232	1.05.000120	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana	Kawasan	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana merupakan kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan memperkuat pada aspek pengurangan potensi bahaya dan kerentanan, maupun peningkatan kapasitas kelompok masyarakat/komunitas yang ada disuatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah kabupaten/kota	6	[1.05.03.1.02.0013] [1.05.03.2.02.0006]
233	1.05.000121	Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	Keluarga yang mengikuti pelatihan tanggap bencana alam terhadap bencana prioritastingkat keluarga lingkup kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih pada aspek manajerial maupun teknis	0	[1.05.03.1.04.0006] [1.05.03.2.02.0012] [1.05.03.2.02.0019] [1.05.04.2.01.0010] [1.05.04.2.01.0019]
234	1.05.000122	Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	Keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam penanganan mandiri atas bencana prioritas kabupaten/kota	0	[1.05.04.1.01.0013] [1.05.04.2.01.0019]
235	1.05.000123	Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Evakuasi Korban Bencana	Orang	Merupakan layanan dalam rangka pendistribusian logistik operasionalisasi peralatan penyelamatan dan evakuasi, serta kebutuhan dasar korban bencana, selama berlangsungnya penanganan awal bencana (masa krisis) lingkup daerah kabupaten/kota	6520	[1.05.03.1.03.0004] [1.05.03.2.03.0009]
236	1.05.000124	Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Korban Bencana	Orang	Merupakan layanan dalam rangka pendistribusian logistik operasionalisasi peralatan penyelamatan dan evakuasi, serta kebutuhan dasar korban bencana, selama berlangsungnya penanganan awal bencana (masa krisis) lingkup daerah kabupaten/kota	530	[1.05.03.1.03.0004] [1.05.03.2.03.0009]
237	1.05.000125	Korban yang Berhasil Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	Merupakan pelaksanaan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk memindahkan/mengevakuasi korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman	50	[1.05.03.2.03.0003]
238	1.05.000126	Korban yang Berhasil Ditemukan Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	Merupakan pelaksanaan pencarian Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk upaya untuk menemukan korban bencana di lokasi bencana	5	[1.05.03.2.03.0003]
239	1.05.000127	Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	Merupakan memberikan pertolongan pada Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk menolong korban bencana pada tempat kejadian bencana	45	[1.05.03.2.03.0003]
240	1.05.000133	Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	Berisikan laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabupaten/kota meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, asistensi, supervisi dan sinkronisasi serta evaluasi antar perangkat daerah di kabupaten/kota	12	[1.05.03.2.04.0005]
241	1.05.000137	Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh	Laporan	Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh	0	[1.05.02.7.04.0006]
242	1.05.000138	Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota	Laporan	Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota	0	[1.05.02.7.04.0006]
243	1.05.000141	Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Laporan	Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	[1.05.02.7.04.0007] [1.05.02.7.04.0007]
244	1.05.000144	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Informasi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota	Laporan	Pelaksanaan Informasi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota	0	[1.05.02.7.04.0005]

245	1.05.000145	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Instruksi Terhadap Polisi Wilayahul Hisbah Kabupaten/Kota	Laporan	Pelaksanaan Kegiatan Instruksi Terhadap Polisi Wilayahul Hisbah Kabupaten/Kota	0	[1.05.02.7.04.0005]
246	1.05.000146	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	12	[1.05.04.2.01.0002]
247	1.05.000147	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	12	[1.05.04.2.01.0002]
248	1.05.000148	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Terhadap Polisi Wilayahul Hisbah Kabupaten/Kota	Laporan	Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Polisi Wilayahul Hisbah Kabupaten/Kota	0	[1.05.02.7.04.0005]
249	1.05.000149	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Pembinaan Qanun Syariat Islam	0	[1.05.02.7.04.0002] [1.05.02.7.04.0002]
250	1.05.000150	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penegakan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Penegakan Qanun Syariat Islam	0	[1.05.02.7.04.0002] [1.05.02.7.04.0002]
251	1.05.000152	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Legislatif dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Konsultasi Dengan Badan Legislatif dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam	0	[1.05.02.7.04.0008] [1.05.02.7.04.0008]
252	1.05.000153	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Legislatif dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Konsultasi Dengan Badan Legislatif dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam	0	[1.05.02.7.04.0008] [1.05.02.7.04.0008]
253	1.05.000154	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Yudikatif dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Yudikatif dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam	0	[1.05.02.7.04.0008] [1.05.02.7.04.0008]
254	1.05.000155	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Yudikatif dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Yudikatif dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam	0	[1.05.02.7.04.0008] [1.05.02.7.04.0008]
255	1.05.000156	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Konsultasi dengan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam	0	[1.05.02.7.04.0008] [1.05.02.7.04.0008]
256	1.05.000157	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Instansi Terkait dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Instansi Terkait dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam	0	[1.05.02.7.04.0008] [1.05.02.7.04.0008]
257	1.05.000158	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Ulama dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Ulama dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam	0	[1.05.02.7.04.0008] [1.05.02.7.04.0008]
258	1.05.000159	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Ulama dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Konsultasi dengan Ulama dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam	0	[1.05.02.7.04.0008] [1.05.02.7.04.0008]
259	1.05.000160	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam	0	[1.05.02.7.04.0011] [1.05.02.7.04.0011]

260	1.05.000161	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam	0	[1.05.02.7.04.0011] [1.05.02.7.04.0011]
261	1.05.000162	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam	0	[1.05.02.7.04.0011] [1.05.02.7.04.0011]
262	1.05.000163	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam	0	[1.05.02.7.04.0011] [1.05.02.7.04.0011]
263	1.05.000164	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Kepemudaan di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Kepemudaan di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam	0	[1.05.02.7.04.0011] [1.05.02.7.04.0011]
264	1.05.000165	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Kepemudaan di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Kepemudaan di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam	0	[1.05.02.7.04.0011] [1.05.02.7.04.0011]
265	1.05.000166	Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong	Laporan	Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong	0	[1.05.02.7.04.0009]
266	1.05.000167	Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Mukim	Laporan	Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Mukim	0	[1.05.02.7.04.0009]
267	1.05.000172	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	Pengawasan yang dilakukan sebagai pemantauan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Bupati/Walikota	120	[1.05.02.2.02.0012]
268	1.05.000173	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	Laporan	Pengawasan yang dilakukan sebagai pemantauan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah	120	[1.05.02.2.02.0012]
269	1.05.000174	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	120	[1.05.02.7.04.0003]
270	1.05.000178	Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Laporan	1. Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek dlm rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2	[1.05.02.2.03.0006]
271	1.05.000181	Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	1. Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek dlm rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2	[1.05.02.2.03.0006]
272	1.05.000182	Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan peraturan Perundang-undangan Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Penyuluhan peraturan Perundang-undangan Syariat Islam	0	[1.05.02.7.04.0004]
273	1.05.000183	Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan Qanun	Laporan	Pelaksanaan Penyuluhan Qanun	0	[1.05.02.7.04.0004]
274	1.05.000187	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	sosialisasi penegsakan perda kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah	0	[1.05.02.2.02.0010]
275	1.05.000188	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	sosialisasi Penegakan perkada kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah	0	[1.05.02.2.02.0010]
276	1.05.000189	Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi peraturan Perundang-undangan Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan sosialisasi peraturan Perundang-undangan Syariat Islam	0	[1.05.02.7.04.0004]
277	1.05.000190	Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi Qanun	Laporan	Pelaksanaan sosialisasi Qanun	0	[1.05.02.7.04.0004]

278	1.05.000193	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sah dan Legal	Laporan	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	0	[1.05.04.2.05.0004]
279	1.05.000194	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Terhadap Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	Penyelenggaraan koordinasi antar perangkat daerah di Provinsi dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam konteks standarisasi kompetensi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, sistem kerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, kinerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta kesejahteraan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan	0	[1.05.04.2.05.0004]
280	1.05.000196	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pertolongan Terhadap Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	Penyelenggaraan koordinasi antar perangkat daerah di Provinsi dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam konteks standarisasi kompetensi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, sistem kerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, kinerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta kesejahteraan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan.	0	[1.05.04.2.05.0004]
281	1.05.000197	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sah dan Legal	Laporan	Penyelenggaraan koordinasi antar perangkat daerah di Provinsi dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam konteks standarisasi kompetensi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, sistem kerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, kinerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta kesejahteraan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan	0	[1.05.04.2.05.0004]
282	1.05.000202	Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah upaya dan tindakan membantu mengatasi Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia serta merupakan tindakan penyelamatan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan	0	[1.05.04.2.05.0001]
283	1.05.000204	Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda yang Terlayani	Laporan	Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perda sesuai SOP	1	[1.05.02.1.01.0015] [1.05.02.2.01.0017]
284	1.05.000205	Laporan Layanan Dampak Penegakan Perkada yang Terlayani	Laporan	Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perkada sesuai SOP	1	[1.05.02.1.01.0015]
285	1.05.000208	Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	Merupakan laporan pelaksanaan Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana meliputi antara lain pelaksanaan pengerahan dan pengorganisasian komando penanganan darurat bencana tingkat kabupaten/kota, baik dalam hal manajerial, operasional, maupun sumberdaya	2	[1.05.03.1.03.0005] [1.05.03.2.03.0011] [1.05.03.2.03.0005] [1.05.03.2.03.0012]
286	1.05.000213	Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP	Laporan	Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Peraturan Bupati/Walikota sesuai SOP	100	[1.05.02.2.02.0011]
287	1.05.000214	Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP	Laporan	Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perda sesuai SOP	100	[1.05.02.2.02.0011]
288	1.05.000215	Orang yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana bagi penduduk yang berada di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerah kabupaten/kota	3678	[1.05.03.2.01.0004] [1.05.03.2.01.0002] [1.05.03.2.01.0007]

289	1.05.000216	Orang yang Mendapatkan Sosialisasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana bagi penduduk yang berada di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerah kabupaten/kota	3678	[1.05.03.2.01.0004]
290	1.05.000219	Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara	Unit	Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Penyediaan Peralatan keselamatan keselamatan diri di kawasan rawan bencana daerah kabupaten/kota	107	[1.05.03.2.02.0015]
291	1.05.000220	Peralatan Penyelamatan Diri bagi Keluarga	Unit	Merupakan penyediaan alat penyelamatan diri bagi keluarga yang tinggal di daerah rawan bencana lingkup daerah kabupaten/kota	68	[1.05.03.2.02.0015]
292	1.05.000221	Peralatan Penyelamatan Diri bagi Petugas	Unit	Merupakan Penyediaan Peralatan penyelamatan diri bagi petugas operasi kedaruratan bencana daerah kabupaten/kota	235	[1.05.03.2.02.0015]
293	1.05.000224	Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Manajerialnya	Orang	Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas manajerialnya dalam hal koordinasi/ dukungan bagi dan/atau di wilayah kabupaten/kota untuk melakukan penanganan awal, penilaian dampak bencana secara cepat, maupun pengendalian luas area terpapar	183	[1.05.03.2.02.0008] [1.05.03.2.02.0021]
294	1.05.000225	Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis	Orang	Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas teknis operasionalnya dalam hal meningkatkan kecepatan respon time untuk dukungan penanganan awal daurat bencana di wilayah kabupaten/kota untuk melakukan penilaian dampak bencana secara cepat, maupun pengendalian luas area terpapar	183	[1.05.03.2.02.0008]
295	1.05.000227	Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	235	[1.05.04.2.01.0017]
296	1.05.000229	Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	1. Pengadaan Bantuan Operasional terhadap Satpol PP Daerah 2. Dukungan anggaran terhadap Satpol PP Daerah dalam pemenuhan sarana dan prasarana sebagai salah satu penunjang SPM Sub Urusan Trantibum	0	[1.05.02.1.01.0013] [1.05.02.2.01.0018]
297	1.05.000232	Sarana dan Prasarana Untuk Penanggulangan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	2	[1.05.04.2.01.0017]

298	1.05.000233	Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	2	[1.05.04.2.01.0017]
299	1.05.000236	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	233	[1.05.04.2.05.0005]
300	1.05.000237	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	233	[1.05.04.2.05.0005]
301	1.05.000239	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	233	[1.05.04.2.05.0005]
302	1.05.000240	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	233	[1.05.04.2.05.0005]
303	1.05.000241	SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	1. Dukungan anggaran untuk Diklat Dasar Satpol PP yang diselenggarakan di BPSDM 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek Satlinmas dalam rangka Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas anggota Satlinmas	38	[1.05.02.1.01.0018] [1.05.02.1.01.0005] [1.05.02.2.01.0005] [1.05.02.2.01.0010] [1.05.02.2.01.0013]

304	1.05.000244	Warga Masyarakat yang Mendapatkan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat adalah upaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran yang dilaksanakan setiap tahun dengan satuan orang, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	1000	[1.05.04.2.04.0001]
305	1.05.000245	Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat adalah upaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran yang dilaksanakan setiap tahun dengan satuan orang, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	1000	[1.05.04.2.04.0001]
306	1.05.000246	Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Mitigasi Bencana	Orang	Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk pelatihan mitigasi bencana dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan warga negara di wilayah kabupaten/kota untuk mengenali potensi risiko bencana yang menjadi kewenangan kabupaten.kota	15	[1.05.03.2.02.0016]
307	1.05.000247	Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan Bencana	Orang	Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk pelatihan pencegahan bencana dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan warga negara di wilayah kabupaten/kota untuk meperkuat aspek pencegahan terhadap bencana yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	15	[1.05.03.2.02.0016]
308	1.05.000248	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	BPBD Provinsi memfasilitasi BPBD Kab/Kota berkoordinasi dengan stakeholder terkait (Camat, Lurah, Kepala Desa, Fasilitator Kebencanaan dan Stakeholder lainnya) dalam penyediaan data penduduk terpilah di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan gender equality, disability dan social inclusion (GEDSI - Kesetaraan gender, disabilitas dan aspek sosial - rentan) Laporan data penduduk terpilah di daerah rawan bencana memuat : 1. Jumlah penduduk lansia 2. Jumlah penduduk balita (0-5 Tahun) 3. Jumlah anak-anak (6-12 Tahun) 4. Jumlah penduduk usia produktif (13-60) 5. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan 6. Jumlah penduduk berkebutuhan khusus	3	[1.05.03.1.04.0014]
309	1.05.000249	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	Kemampuan spesifik dari Aparatur SDM BPBD kabupaten/kota dan lintas perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan untuk menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P), dengan target pelaksanaan 1 kali dalam satu tahun	3	[1.05.03.2.04.0008]
310	1.05.000250	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	Fasilitasi yang dilakukan BPBD Kabupaten/Kota untuk memastikan tertanganinya pasca bencana meliputi Sektor : Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman, Ekonomi, Sosial dan Lintas Sektor	5	[1.05.03.2.04.0010]

311	1.05.000251	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	Peningkatan kapasitas meliputi kompetensi, karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, sikap dan kecakapan yang dimiliki aparatur sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan untuk memberikan pelayanan penanggulangan bencana	10	[1.05.03.2.04.0007]
312	1.05.000252	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sesuai dengan Permendagri 59/2021	1	[1.05.03.2.04.0009] [1.05.03.2.04.0016]
313	1.05.000253	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Penyusunan rencana operasi kedaruratan bencana sesuai peraturan ini yang ditetapkan oleh peraturan kepala daerah	2	[1.05.03.2.03.0007]
314	1.05.000254	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang	Kemampuan spesifik dari Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi dalam melaksanakan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	5	[1.05.03.2.03.0008]
315	1.05.000255	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga	Fasilitasi yang dilakukan BPBD Kabupaten/Kota untuk meningkatkan keterlibatan Lembaga non pemerintah : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	10	[1.05.03.2.04.0011]
316	1.05.000259	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	BPBD Provinsi memfasilitasi BPBD Kab/Kota berkoordinasi dengan stakeholder terkait (Camat, Lurah, Kepala Desa, Fasilitator Kebencanaan dan Stakeholder lainnya) dalam penyediaan data penduduk terpilah di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan gender equality, disability dan social inclusion (GEDSI - Kesenjangan gender, disabilitas dan aspek sosial - rentan) Laporan data penduduk terpilah di daerah rawan bencana memuat : 1. Jumlah penduduk lansia 2. Jumlah penduduk balita (0-5 Tahun) 3. Jumlah anak-anak (6-12 Tahun) 4. Jumlah penduduk usia produktif (13-60) 5. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan 6. Jumlah penduduk berkebutuhan khusus	3	[1.05.03.1.04.0008]
317	1.05.000264	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	BPBD Provinsi memfasilitasi BPBD Kab/Kota berkoordinasi dengan stakeholder terkait (Camat, Lurah, Kepala Desa, Fasilitator Kebencanaan dan Stakeholder lainnya) dalam penyediaan data penduduk terpilah di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan gender equality, disability dan social inclusion (GEDSI - Kesenjangan gender, disabilitas dan aspek sosial - rentan) Laporan data penduduk terpilah di daerah rawan bencana memuat : 1. Jumlah penduduk lansia 2. Jumlah penduduk balita (0-5 Tahun) 3. Jumlah anak-anak (6-12 Tahun) 4. Jumlah penduduk usia produktif (13-60) 5. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan 6. Jumlah penduduk berkebutuhan khusus	3	[1.05.03.2.04.0012]
318	1.05.000266	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Dokumen	Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan	0	[1.05.02.1.01.0012] [1.05.02.2.01.0019]
319	1.05.000267	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Dokumen	Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan	0	[1.05.02.3.05.0001]

320	1.05.000268	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Dokumen	Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan	0	[1.05.02.1.01.0012]
321	1.05.000270	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	Tim penilai angka kredit adalah tim yang menilai angka kredit Jabatan Fungsional Pol PP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014 Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP adalah Sekretariat yang melakukan tugas pembinaan jabatan fungsional Pol PP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014	0	[1.05.02.1.01.0011] [1.05.02.2.01.0011]
322	1.05.000273	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol Pngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	Kegiatan Diklat Dasar Pol PP terdiri dari 1. Diklat Jabatan JFT dan Administrator 2. Diklat Fungsional bagi Pejabat Fungsional pengangkatan Pertama dari (CPNS) 3. Diklat Kategori Keahlian 4. Diklat Kategori Keterampilan. 5. Diklat Penilaian Angka Kredit JF Pol PP Kriteria Aparatur Satuan Polisi Pamongpraja yang mengikuti pelatihan teknis sebagai berikut: bertugas di Satpol PP minimal 1 (satu) tahun, mempunyai integritas yang baik, SKP dengan kriteria minimal baik 1 (satu) tahun terakhir.	38	[1.05.02.2.01.0010] [1.05.02.2.01.0012]
323	1.05.000274	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	Kegiatan Pembinaan/ Penyuluhan kepada warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan Perkada	120	[1.05.02.2.02.0004]
324	1.05.000275	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	Dokumen yang ditetapkan oleh KDH atau Kasatpol tentang SOP Penegakan Perda atau Perkada	2	[1.05.02.2.02.0005]
325	1.05.000276	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	Kegiatan Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	[1.05.02.2.02.0007]
326	1.05.000277	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	Dukungan anggaran dalam rangka penyelenggaraan persidangan atas penyelesaian perkara pidana pelanggaran Perda	0	[1.05.02.1.02.0007] [1.05.02.1.03.0002] [1.05.02.2.02.0008]
327	1.05.000278	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	Pemberkasan yang dilakukan PPNS pada kegiatan penyidikan terhadap Pelanggar Perda	0	[1.05.02.1.02.0009] [1.05.02.2.02.0009]
328	1.05.000279	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	Kegiatan sosialisasi perda atau perkara kepada masyarakat, aparat atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah	100	[1.05.02.2.02.0010]
329	1.05.000280	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	Penyusunan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	0	[1.05.02.1.03.0002] [1.05.02.1.03.0003] [1.05.02.2.03.0002]
330	1.05.000282	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran	Laporan	Pembinaan dan Pengawasan dalam ketersediaan Tim Penilai Angka Kredit di provinsi dan kabupaten/kota, pengembangan profesi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran, dan kendala dalam penyelenggaraan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	0	[1.05.04.1.01.0016] [1.05.04.1.02.0003] [1.05.04.1.01.0020] [1.05.04.1.01.0014] [1.05.04.2.01.0012] [1.05.04.2.01.0014]
331	1.05.000283	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah	0	[1.05.04.1.01.0021] [1.05.04.2.01.0012]
332	1.05.000284	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	Bentuk kegiatan peningkatan kompetensi jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan	0	[1.05.04.1.01.0020] [1.05.04.2.01.0012] [1.05.04.2.01.0014]

333	1.05.000285	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Dokumen	Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	1	[1.05.04.1.01.0019]
334	1.05.000286	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	0	[1.05.04.1.01.0018] [1.05.04.1.01.0002] [1.05.04.1.01.0017] [1.05.04.2.01.0013] [1.05.04.2.01.0011] [1.05.04.2.01.0015]
335	1.05.000287	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan dokumen mengenai standar perencanaan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang sah dan legal untuk memberikan pedoman yang lengkap dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan dengan satuan dokumen dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	0	[1.05.04.2.01.0023] [1.05.04.1.01.0017] [1.05.04.2.01.0015]
336	1.05.000288	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	Pelaksanaan butir kegiatan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Permenpanrb Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	26	[1.05.04.1.01.0015] [1.05.04.2.01.0016]
337	1.05.000289	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	Aparatur Satpol PP Provinsi dan lintas Kab/Kota yang mengikuti Pelatihan Teknis Satpol PP antara lain : 1. Deteksi dini dan cegah dini 2. Pembinaan dan penyuluhan penegakkan perda dan perkara 3. Teknik pengawasan, pengamanan dan patroli 4. Teknik penanganan unjuk rasa 5. Teknik penyelidikan dan penyidikan yustisi dan non yustisi 6. Teknik pemberkasan perkara 7. Teknik negosiasi dan mediasi 8. Teknik penyusunan perda dan perkara 9. Teknik mobilisasi Satlinmas	38	[1.05.02.1.01.0018] [1.05.02.2.01.0014]
338	1.05.000290	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	Pelaksanaan tugas Sekretariat PPNS sebagaimana bunyi pasal 8 Permendagri 3 Tahun 2019	0	[1.05.02.1.03.0005] [1.05.02.2.03.0005]
339	1.05.000291	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, dengan evidence berupa SK TIM/MoU/PKS/Nota Kesepakatan	4	[1.05.02.1.03.0004] [1.05.02.2.03.0003]
340	1.05.000292	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung	0	[1.05.02.1.03.0006] [1.05.02.2.03.0004]

341	1.05.000293	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	Dokumen yang ditetapkan oleh KDH atau Kasatpol tentang SOP Penegakan Perda atau Perkada mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja	2	[1.05.02.1.02.0006] [1.05.02.2.02.0005]
342	1.05.000296	Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota adalah kegiatan dalam rangka penguatan kualitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan melalui penyusunan dokumen yang memuat prosedur dan tata kerja sebagai pedoman dan bentuk kepastian, konsistensi, transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kebakaran dan penyelamatan lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota	0	[1.05.04.1.02.0005]
343	1.05.000297	Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Laporan	Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	0	[1.05.04.1.02.0007]
344	1.05.000298	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi	Dokumen	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi adalah penata kelolaan kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di tingkat provinsi baik dalam hal status dan tipe dinas, struktur dan penugasan, penjenjangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun perencanaan dan penganggaran	0	[1.05.04.1.01.0035]
345	1.05.000299	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi	Dokumen	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi adalah penata kelolaan kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di tingkat provinsi baik dalam hal status dan tipe dinas, struktur dan penugasan, penjenjangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun perencanaan dan penganggaran	0	
346	1.05.000300	Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Orang	Pelatihan mengenai bahaya dan resiko kebakaran di tingkat keluarga dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta ketangguhan masyarakat terhadap bahaya kebakaran	0	[1.05.04.1.01.0030] [1.05.04.2.04.0004] [1.05.04.1.01.0039]
347	1.05.000302	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	Unit	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri merupakan mekanisme dan proses untuk melakukan memfasilitasi sarana prasarana di kabupaten/Kota, atau penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan di provinsi dalam rangka mendukung capaian SPM di kabupaten.kota yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	4	[1.05.04.1.01.0032]

348	1.05.000303	Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan	Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan serangkaian upaya dan tindakan berupa asistensi dan fasilitasi untuk saling bersinergi dalam mempercepat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran dengan satuan laporan, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	1	[1.05.04.1.01.0033]
349	1.05.000304	Pembinaan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran provinsi dan kabupaten/kota DSSD belum terisi!	Dokumen	Pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional berdasarkan ruang lingkup kegiatan, pengembangan profesi sebagaimana diatur dalam Permenpanrb Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran, Permenpanrb Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, dan Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, serta kendala dalam penyelenggaraan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	0	[1.05.04.1.01.0031]
350	1.05.000305	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	Penyelenggaraan koordinasi antar perangkat daerah di Provinsi dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam konteks penyelenggaraan sistem kerja, kinerja, pengembangan karier, kesejahteraan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, dan bentuk kegiatan pembinaan aparatur lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	0	[1.05.04.1.01.0030]
351	1.05.000306	Pengembangan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Orang	Bentuk kegiatan pengembangan kompetensi jabatan fungsional pemadam kebakaran dan fungsional analisis kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka mengembangkan kompetensi JF Pemadam Kebakaran dan JF Analisis Kebakaran berupa bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, uji kompetensi, seminar, lokakarya (workshop), konferensi dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan	0	[1.05.04.1.01.0036]
352	1.05.000307	Pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Orang	Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0	[1.05.04.1.01.0037]
353	1.05.000308	Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi kabupaten/kota dalam rangka menyusun kajian akademis RISPKP, menyusun dokumen RISPKP, maupun pemutakhiran RISPKP	0	[1.05.04.1.01.0034]

354	1.05.000309	Pemutakhiran Peta Rawan Kebakaran	Dokumen	Pemutakhiran Dokumen Peta Rawan Kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka memutakhirkan Dokumen Peta Rawan Kebakaran yang sebelumnya telah dimiliki atau disusun oleh pemerintah daerah namun perlu dimutakhirkan baik dari segi muatan informasi maupun substansi lainnya. Dokumen Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, serta dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	1	[1.05.04.1.01.0029]
355	1.05.000310	Penyusunan Peta Rawan Kebakaran	Dokumen	Penyusunan Dokumen Peta Rawan Kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka menyusun informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, Serta dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	1	[1.05.04.1.01.0028]
356	1.05.000311	Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Dokumen	Tercapainya kinerja daerah dalam penegakan perda/perkada sesuai instrumen	0	[1.05.02.2.02.0013] [1.05.02.1.02.0013]
357	1.05.000312	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Dokumen	Tercapainya kinerja Satpol PP di daerah dalam penegakan perda/perkada dan penyelenggaraan tibumtranmas sesuai indikator yang di tetapkan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022	0	[1.05.02.1.01.0026] [1.05.02.2.01.0024]
358	1.05.000313	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	Mendukung digitalisasi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi satpol pp dan satlinmas untuk mewujudkan satu data Trantibumlinmas	1	[1.05.02.2.01.0023] [1.05.02.1.01.0028]
359	1.05.000314	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Dokumen	Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum adalah dokumen yang memuat tentang jumlah kebutuhan yang diperlukan oleh Satpol PP dalam penegakan perda/perkada dan penyelenggaraan Tibumtranmas sekaligus menghitung kebutuhan Satpol PP dari sisi jumlah aparaturnya Satpol PP, sarpras dikaitkan dengan Perda yang akan ditegakkan dan Peta rawan gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah dokumen yang menggambarkan kerawanan suatu wilayah yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0	[1.05.02.1.01.0025] [1.05.02.1.01.0027] [1.05.02.2.01.0022]

360	1.05.000315	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan dokumen yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan, penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di kawasan perkotaan yang sah dan legal dengan satuan dokumen dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP).	0	[1.05.02.2.01.0020]
361	1.05.000316	Penyusunan SOP Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	Penyusunan SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan adalah kegiatan dalam rangka penguatan kualitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan melalui penyusunan dokumen yang memuat prosedur dan tata kerja sebagai pedoman dan bentuk kepastian, konsistensi, transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kepada masyarakat	0	[1.05.02.2.01.0021]
362	1.05.000317	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual adalah kegiatan dalam rangka penguatan kualitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan melalui kajian penyusunan dokumen yang memuat norma, standar, prosedur dan manual, serta dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pencegahan Kebakaran	0	[1.05.04.2.01.0025]
363	1.05.000318	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran adalah penyediaan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan satuannya adalah laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	12	[1.05.04.2.01.0026]
364	1.05.000319	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran adalah kegiatan yang berkaitan dengan serangkaian kegiatan untuk mengamankan, mengendalikan dan menangani bahan berbahaya dan beracun agar tidak menimbulkan kebakaran dan yang membahayakan manusia dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	0	[1.05.04.2.01.0022]
365	1.05.000320	Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Orang	Pembinaan dan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka membina dan mengembangkan kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran berupa bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan, uji kompetensi, seminar, lokakarya (workshop), konferensi dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan	0	[1.05.04.2.01.0024]

366	1.05.000321	Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan kajian Akademis yang berisikan gambaran awal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan, penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di kawasan perkotaan yang sah dan legal dengan satuan dokumen dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP). Kegiatan ini terutama ditujukan untuk pemerintah daerah yang belum pernah menyusun atau memiliki dokumen RISPKP	0	[1.05.04.2.01.0020]
367	1.05.000322	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi baik melalui forum komunikasi kebakaran, organisasi profesi atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mempercepat atau mempermudah layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	2	[1.05.04.2.01.0021]
368	1.05.000323	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi baik melalui forum komunikasi kebakaran, organisasi profesi atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mempercepat atau mempermudah layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	Dokumen	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi baik melalui forum komunikasi kebakaran, organisasi profesi atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mempercepat atau mempermudah layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	2	
369	1.05.000324	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota	Dokumen	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota adalah penata kelolaan kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di tingkat kabupaten/kota baik dalam hal status dan tipe dinas, struktur dan penugasan, penjenjangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun perencanaan dan penganggaran	0	[1.05.04.2.01.0020] [1.05.04.2.01.0027]
370	1.05.000325	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran adalah serangkaian proses pengumpulan, pencatatan dan pengelolaan data yang berkaitan dengan tersedianya Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada bangunan/gedung/lingkungan dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	2	[1.05.04.2.02.0003]

371	1.05.000326	Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan	Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala adalah serangkaian proses/kegiatan pemeriksaan/pengujian/inspeksi proteksi kebakaran guna memberikan penilaian laik atau tidaknya secara berkala sesuai standar teknis yang berlaku dengan satuan dokumen, berdasarkan dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0	[1.05.04.2.02.0005]
372	1.05.000327	Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan	Laporan	Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pemadam kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis aparatur, berupa bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan	0	[1.05.04.2.02.0004]
373	1.05.000328	Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	Laporan	Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab kebakaran adalah serangkaian proses dalam menyelidiki dan mencari fakta terkait penyebab suatu kejadian kebakaran dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Investasi Kejadian kebakaran	0	[1.05.04.2.03.0004]
374	1.05.000329	Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran		Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis aparatur, berupa bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan	0	[1.05.04.2.03.0003]
375	1.05.000330	Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Laporan	Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran adalah serangkaian proses investigasi kejadian kebakaran dalam upaya menyelidiki dan mencari fakta terkait penyebab suatu kejadian kebakaran melalui penelitian dan pengujian dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Investasi Kejadian kebakaran	0	[1.05.04.2.03.0002]
376	1.05.000331	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Dokumen	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran adalah upaya untuk memberikan penyediaan sarana dan prasarana damkar yang berkaitan guna operasionalisasi relawan pemadam kebakaran dalam melakukan layanan pencegahan, pemadaman dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani sarana dan prasarana	0	[1.05.04.2.04.0005]
377	1.05.000333	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/ Kelurahan	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah mekanisme dan proses untuk membentuk dan membina REDKAR pada skala desa/kelurahan yang dilakukan setiap tahunnya dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	5	[1.05.04.2.04.0007]
378	1.05.000335	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah penyediaan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	12	[1.05.04.2.05.0006]

379	1.05.000336	Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Dokumen	Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar adalah kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0	[1.05.04.2.05.0008]
380	1.05.000337	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, Alat Pelindung Diri dan sarpras lainnya yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	4	[1.05.04.2.05.0007]
381	1.05.000338	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Unit	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar merupakan Mekanisme dan Proses untuk Melakukan pengaturan agar sarana prasarana selalu dalam kondisi baik dan dapat digunakan sebagaimana fungsinya, serta Dilaksanakan Oleh Bidang yang Menangani Sarana dan Prasarana	0	[1.05.04.2.05.0009]
382	1.05.000339	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Laporan	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan serta pengembangan sarana komunikasi dan informasi berbasis online dan paperless terkait metoda pelaporan kebakaran dan penyelamatan dalam satu portal dan bisa setiap saat di mutakhirkan dan bersifat real time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Desa/Kelurahan dan dapat Menjangkau Masyarakat, dan dilaksanakan oleh bidang Informasi dan Pengolah Data	0	[1.05.04.2.05.0010]
383	1.05.000340	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dokumen	Dokumen SOP Ketenteraman dan ketertiban Umum merupakan Dokumen pedoman atau acuan yang sistematis bagi Pol PP untuk melakukan tindakan dalam rangka menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang telah di buat dan/atau telah dimutakhirkan	2	
384	1.05.000341	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Unit	Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat adalah fasilitas dan peralatan yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	4	

385	1.05.000342	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	Laporan Gangguan Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan laporan hasil tindakan yang dilakukan terhadap Suatu Kondisi Yang Tidak Teratur yang Disebabkan Oleh Tidak Taatnya Kepada Hukum, Norma Serta Kesepakatan umum, yang dilakukan melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.	12	
386	1.05.000343	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Linmas dalam bentuk Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa merupakan laporan hasil penertiban dan unjuk rasa dan Penindakan : a. Unjuk Rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran daengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum yang berkaitan dengan peraturan daerah, pergub, kebijakan pemerintah dan kebijakan lainnya terkait dengan pemerintah b. Kerusuhan massa adalah suatu keadaan /situasi rusuh dan kekacauan yang dilakukan oleh seseorang amupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan , pererusakan faslitaas umum, aset daerah, rumah ibadah dll	4	
387	1.05.000344	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	Pemberkasan yang dilakukan PPNS pada kegiatan penyidikan terhadap Pelanggar Perda mengacu pada Perka POLRI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan PPNS	0	
388	1.05.000345	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Dokumen	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi adalah penyediaan dokumen Kajian Risiko Bencana yang sah dan legal dalam bentuk data dan peta yang memberikan analisa ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan bencana untuk mengetahui potensi masyarakat terdampak, potensi kerugian, dan potensi kerusakan lingkungan bila terjadi bencana dan digunakan untuk menyusun kebijakan strategi penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota, dengan alat ukur jumlah dokumen yang dilegalisasi, dilaksanakan apabila diperlukan penyusunan baru (pemutakhiran).	1	
389	1.05.000346	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Kawasan	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan pelaksanaan kegiatan untuk pengurangan potensi bahaya dan kerentanan, maupun peningkatan kapasitas bagi yang ada di suatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah provinsi. seperti: Kawasan Pariwisata Tangguh Bencana, Kawasan Industri Tangguh Bencana, Fasilitas pembinaan desa tangguh bencana dan keluarga tangguh bencana dsb, dengan alat ukur Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dilaksanakan sesuai target yang telah ditentukan.	6	

390	1.05.000347	Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran adalah upaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran yang dilaksanakan setiap tahun dengan satuan orang, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	1000	[1.05.04.2.04.0006]
391	1.05.000348	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Laporan hasil pelaksanaan memuat uraian keterangan pelaksanaan pengawasan, hasil pengawasan, dan evaluasi atas hasil pengawasan	100	
392	1.06.000007	Anak Telantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	Anak terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	1	[1.06.04.2.01.0010]
393	1.06.000008	Anak Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Anak telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	4	[1.06.04.2.01.0004]
394	1.06.000009	Anak Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	Anak telantar di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi	500	[1.06.04.2.01.0001]
395	1.06.000018	Anak Telantar yang menerima kebutuhan sandang	Orang	Anak telantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	5	[1.06.04.2.01.0002]
396	1.06.000020	Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	Anak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	3	[1.06.04.2.01.0008]
397	1.06.000021	Anak Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	Anak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	4	[1.06.04.2.01.0007]
398	1.06.000022	Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	Anak telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta untuk mendapatkan layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	5	[1.06.04.2.01.0009]
399	1.06.000023	Anak Terlantar yang mendapat layanan rujukan	Orang	Anak telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan	3	[1.06.04.2.01.0012]
400	1.06.000024	Anak Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	Anak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan layanan penelusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi	4	[1.06.04.2.01.0011]
401	1.06.000025	Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara	Orang	Pemantauan anak terlantar untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	5	[1.06.05.2.01.0003]
402	1.06.000028	Anak-Anak Terlantar yang dijangkau	Orang	Anak telantar yang mendapatkan layanan kedaruratan berupa penjangkauan	5	[1.06.05.2.01.0001]

403	1.06.000029	Anak-anak terlantar yang mendapat rujukan	Orang	Anak telantar yang mendapatkan layanan kedaruratan berupa rujukan ke layanan sesuai kebutuhan Anak Terlantar	3	[1.06.05.2.01.0002]
404	1.06.000031	Fakir Miskin	Orang	&Fakir miskin yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya	1487 06	[1.06.05.2.02.0001] [1.06.05.2.02.0002] [1.06.02.3.03.0007] [1.06.02.4.03.0007]
405	1.06.000034	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	5	[1.06.04.2.01.0008]
406	1.06.000038	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	5	[1.06.04.2.01.0007]
407	1.06.000039	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta untuk mendapatkan layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	32	[1.06.04.2.02.0009] [1.06.04.2.01.0009]
408	1.06.000040	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan rujukan	Orang	Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan	4	[1.06.04.2.01.0012] [1.06.04.2.02.0001]
409	1.06.000041	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	1	[1.06.04.2.01.0010]
410	1.06.000042	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan layanan penelusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi	5	[1.06.04.2.01.0011]
411	1.06.000043	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	5	[1.06.04.2.01.0004] [1.06.04.1.04.0015]
412	1.06.000044	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	5	[1.06.04.2.01.0001]
413	1.06.000047	Gelandangan dan Pengemis yang menerima kebutuhan sandang	Orang	Gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	5	[1.06.04.2.01.0002]

414	1.06.000052	Kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kampung	Kegiatan koordinasi dan sosialisasi (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana (KSB) yaitu wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana	3	[1.06.06.2.02.0001]
415	1.06.000054	keluarga pada KAT	Keluarga	Jumlah keluarga pada Komunitas Adat Terpencil (KAT) yaitu sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi	-	[1.06.02.2.01.0001] [1.06.02.2.01.0002]
416	1.06.000055	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Keluarga	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan	3128 0	[1.06.05.2.02.0003]
417	1.06.000059	Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	Dokumen	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	2	[1.06.04.2.02.0014]
418	1.06.000065	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah	Dokumen	Kegiatan (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) untuk koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	0	[1.06.02.2.02.0001]
419	1.06.000067	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Laporan	Kegiatan koordinasi dan sosialisasi (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yaitu relawan berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial	3	[1.06.06.2.02.0002]
420	1.06.000068	Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi	Orang	Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi meliputi pembuatan barak, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya	25	[1.06.06.1.01.0003] [1.06.06.2.01.0003]
421	1.06.000069	Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana	Orang	&Korban bencana yang mendapat kebutuhan sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana	50	[1.06.06.1.01.0002] [1.06.06.2.01.0002]
422	1.06.000070	Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial	Orang	Korban bencana yang mendapat layanan dukungan psikososial melalui bimbingan dan konsultasi, konseling, pendampingan, dan/atau rujukan	67	[1.06.06.1.01.0005] [1.06.06.2.01.0005]
423	1.06.000071	Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan	Orang	Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan meliputi ibu hamil, penyandang disabilitas, anak dan lanjut usia	15	[1.06.06.1.01.0004] [1.06.06.2.01.0004]
424	1.06.000072	Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat	Orang	Korban bencana yang mendapatkan permakanan berupa bahan permakanan/makanan siap saji dalam masa tanggap darurat	67	[1.06.06.1.01.0001] [1.06.06.2.01.0001]
425	1.06.000074	Lanjut Usia Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Lanjut Usia terlanter di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa upaya pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	5	[1.06.04.2.01.0004]
426	1.06.000075	Lanjut Usia Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	Lanjut usia telantar di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga sebesar 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	53	[1.06.04.2.01.0001]
427	1.06.000081	Lanjut Usia Telantar yang menerima kebutuhan sandang	Orang	Lanjut Usia terlanter di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	4	[1.06.04.2.01.0002]

428	1.06.000083	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat akses ke Kesehatan Dasar	Orang	Lanjut usia terlantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	4	[1.06.04.2.01.0008]
429	1.06.000084	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	Lanjut usia terlantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	5	[1.06.04.2.01.0007]
430	1.06.000085	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	Lanjut usia telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	53	[1.06.04.2.02.0009] [1.06.04.2.01.0009]
431	1.06.000086	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan rujukan	Orang	Lanjut usia terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan	5	[1.06.04.2.01.0012]
432	1.06.000087	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	Lanjut usia terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	60	[1.06.04.2.01.0010]
433	1.06.000088	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga yang bersangkutan untuk tujuan reunifikasi	5	[1.06.04.2.01.0011]
434	1.06.000089	Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga	Orang	Lanjut usia terlantar di luar panti yang mendapatkan alat bantu yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya	1	[1.06.04.2.01.0003]
435	1.06.000090	Lembaga Kesejahteraan Sosial	Lembaga	Lembaga Kesejahteraan Sosial yaitu organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum	20	[1.06.02.1.02.0004] [1.06.02.3.02.0007] [1.06.02.4.02.0007] [1.06.02.2.03.0004] [1.06.02.3.05.0001] [1.06.02.4.05.0001] [1.06.02.2.03.0005]
436	1.06.000091	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Lembaga	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga	1	[1.06.02.2.03.0005]
437	1.06.000093	Makam Pahlawan Nasional	Makam	Makam di luar Taman Makam Pahlawan dimana jenazah Pahlawan Nasional dimakamkan yang dikelola oleh Kabupaten/Kota	1	[1.06.07.2.01.0002] [1.06.07.2.01.0001] [1.06.07.2.01.0003]
438	1.06.000094	orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi	Orang	Pemberian bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial	0	[1.06.02.3.02.0005] [1.06.02.4.02.0005] [1.06.05.1.02.0003] [1.06.05.2.02.0004] [1.06.02.3.03.0006] [1.06.02.4.03.0006]

439	1.06.000097	Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	Pekerja profesional/tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	20	[1.06.04.1.01.0006] [1.06.04.1.02.0006] [1.06.04.1.03.0006] [1.06.04.1.04.0005] [1.06.04.1.05.0005] [1.06.04.2.01.0005] [1.06.04.2.02.0007] [1.06.02.3.04.0001] [1.06.02.4.04.0001]
440	1.06.000098	pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan sosial	Orang	Pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan sosial	20	[1.06.04.2.01.0006] [1.06.04.2.02.0008]
441	1.06.000099	Pekerja Sosial Masyarakat	Orang	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang tersedia yaitu warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan di bidang kesejahteraan sosial	50	[1.06.02.1.02.0001] [1.06.02.2.03.0001]
442	1.06.000101	Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	20	[1.06.04.1.02.0006] [1.06.04.1.03.0006] [1.06.04.1.04.0005] [1.06.04.1.05.0005] [1.06.04.1.01.0006] [1.06.04.2.02.0007] [1.06.04.2.01.0005]
443	1.06.000102	pekerja sosial profesional yang memberikan bimbingan sosial	Orang	Pekerja Sosial Profesional yaitu seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan sosial	20	[1.06.04.2.02.0008]
444	1.06.000103	Pelaksanaan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional	Laporan	Pelaksanaan pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) yaitu taman makam pahlawan nasional yang berada di kabupaten/kota	-	[1.06.07.1.01.0003] [1.06.07.2.01.0003]
445	1.06.000110	Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa upaya pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	13	[1.06.04.2.01.0004]
446	1.06.000111	Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pemenuhan permakanaan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	26	[1.06.04.2.01.0001]

447	1.06.000112	Penyandang Disabilitas Telantar yang menerima kebutuhan sandang	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	26	[1.06.04.2.01.0002]
448	1.06.000113	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	Fasilitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	8	[1.06.04.2.01.0008]
449	1.06.000115	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	Fasilitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	5	[1.06.04.2.01.0007]
450	1.06.000116	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	Fasilitasi penyandang Disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	29	[1.06.04.2.02.0009] [1.06.04.2.01.0009]
451	1.06.000117	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan rujukan	Orang	Fasilitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan kepada provinsi atau sesuai kebutuhan	5	[1.06.04.2.01.0012]
452	1.06.000118	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	Penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	56	[1.06.04.2.01.0010]
453	1.06.000119	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	Penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan penelusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi	29	[1.06.04.2.01.0011]
454	1.06.000122	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan alat bantu yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya	8	[1.06.04.2.01.0003]
455	1.06.000128	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	14	[1.06.04.2.02.0009]
456	1.06.000129	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	14	[1.06.04.2.02.0010]
457	1.06.000130	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan alat bantu	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan alat bantu yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya	-	[1.06.04.2.02.0005]

458	1.06.000132	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	46	[1.06.04.2.02.0001]
459	1.06.000133	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	70	[1.06.04.2.02.0002]
460	1.06.000134	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi	19	[1.06.04.2.02.0011] [1.06.04.1.05.0014]
461	1.06.000135	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	14	[1.06.04.2.02.0012]
462	1.06.000136	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	14	[1.06.04.2.02.0006]
463	1.06.000137	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan pemenuhan permakanaan sesuai Standar Gizi Minimal dengan megacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	41	[1.06.04.2.02.0003]
464	1.06.000138	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pLayanan Rujukan	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan	943	[1.06.04.2.02.0013]
465	1.06.000139	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima kebutuhan sandang	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang menerima kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	20	[1.06.04.2.02.0004]
466	1.06.000150	Sarana dan prasarana di Taman Makam Pahlawan yang di rehabilitasi	Unit	Komponen utama (monumen/tugu, plaza upacara, jalan utama, dst) maupun komponen penunjang (pertamanan, halaman parkir, rumah petugas, dst) di Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi	1	[1.06.07.1.01.0001] [1.06.07.2.01.0001]
467	1.06.000161	Tempat penampungan pengungsi yang tersedia	Unit	Barak, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya yang tersedia	4	[1.06.06.1.01.0003] [1.06.06.2.01.0003]

468	1.06.000162	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersedia yaitu seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan	14	[1.06.02.1.02.0002] [1.06.02.3.02.0008] [1.06.02.2.03.0002] [1.06.02.3.03.0008] [1.06.02.4.03.0008]
469	1.06.000169	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Orang	warga negara migran yang mengalami masalah sosial dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu	2	[1.06.03.1.01.0001] [1.06.03.4.06.0001] [1.06.03.3.06.0001] [1.06.03.2.01.0001] [1.06.03.3.02.0001] [1.06.03.4.02.0001]
470	1.06.000170	Taruna Siaga Bencana	Orang	Jumlah relawan sosial yang sudah terlatih atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana	70	[1.06.06.3.03.0001] [1.06.06.4.03.0001] [1.06.06.3.02.0002] [1.06.06.4.02.0002] [1.06.06.3.02.0001] [1.06.06.4.02.0001] [1.06.06.3.02.0003] [1.06.06.4.02.0003] [1.06.06.2.02.0001] [1.06.06.2.02.0002]
471	2.07.000002	Asosiasi pengusaha dan SP/SB (WLKP Online) yang diverifikasi	Asosiasi	Pengusaha: a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja/Buruh baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya.	1	[2.07.05.1.02.0003] [2.07.05.2.02.0003]
472	2.07.000018	Instruktur pemerintah	Orang	Jabatan Fungsional Instruktur adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan pelatihan.	0	[2.07.03.1.01.0001] [2.07.03.2.01.0004] [2.07.02.1.01.0001]
473	2.07.000019	Instruktur swasta	Orang	Instruktur swasta adalah instruktur yang terdaftar dan bekerja di instansi/lembaga milik pemerintah	64	[2.07.03.1.01.0001] [2.07.03.2.01.0004] [2.07.02.1.01.0001]
474	2.07.000024	Kapasitas terpasang pemerintah	Orang	Kapasitas latih adalah jumlah orang maksimum yang dapat dilatih dalam satu tahun untuk program pelatihan tertentu oleh lembaga pelatihan kerja	400	[2.07.02.1.01.0001] [2.07.02.2.01.0001]

475	2.07.000029	kecelakaan kerja	Kasus	Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja	0	[2.07.02.1.01.0001] [2.07.06.1.01.0001] [2.07.02.2.01.0001]
476	2.07.000032	Lembaga Bipartit	Lembaga	LKS Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh	4	[2.07.05.1.01.0003] [2.07.05.2.01.0003] [2.07.02.1.01.0001]
477	2.07.000035	Lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi	Unit	Lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi adalah LPK Pemerintah yang telah mendapat pengakuan formal yang menyatakan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja	0	[2.07.03.1.02.0001] [2.07.02.1.01.0001]
478	2.07.000036	Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi	Unit	Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi adalah LPK yang dikelola pihak swasta yang telah mendapat pengakuan formal yang menyatakan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja	6	[2.07.03.1.02.0001] [2.07.03.2.02.0001] [2.07.02.1.01.0001]
479	2.07.000038	LKS Tripartit	Lembaga	LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah.	1	[2.07.05.1.02.0004] [2.07.05.2.02.0004]
480	2.07.000042	LPKS yang dibina	Lembaga	Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja	45	[2.07.03.2.02.0001]
481	2.07.000046	Lulusan pelatihan pemerintah	Orang	Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus pada pelatihan yang diselenggarakan oleh LPK pemerintah	120	[2.07.02.1.01.0001] [2.07.03.1.01.0001] [2.07.02.2.01.0001] [2.07.03.2.01.0004]
482	2.07.000047	Lulusan pelatihan swasta	Orang	Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus pada pelatihan yang diselenggarakan oleh LPK swasta	0	[2.07.02.1.01.0001] [2.07.03.1.01.0001] [2.07.02.2.01.0001] [2.07.03.2.01.0004]
483	2.07.000048	Mediator	Orang	PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial, dan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	2	[2.07.02.1.01.0001] [2.07.05.1.02.0001] [2.07.05.1.02.0002] [2.07.05.1.02.0003] [2.07.05.2.01.0001] [2.07.05.2.02.0002]
484	2.07.000049	Nama Program Pelatihan	Program	Jumlah Program PBK. Program PBK yang merupakan suatu rumusan tertulis yang memuat secara komprehensif rancangan pencapaian kompetensi sebagai pedoman pelaksanaan pelatihan yang penyelenggaraannya berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi	0	[2.07.03.1.01.0001] [2.07.03.1.02.0001] [2.07.03.3.03.0004] [2.07.03.4.03.0004] [2.07.03.2.01.0004]
485	2.07.000072	Penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama	Kasus	Jumlah kasus Perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama Perjanjian Bersama adalah hasil kesepakatan bersama penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ditandatangani oleh para pihak	0	[2.07.05.1.02.0002] [2.07.05.2.02.0002] [2.07.02.1.01.0001]

486	2.07.000074	Peraturan Perusahaan (WLKP Online)	Dokumen	Jumlah Peraturan Perusahaan pada Perusahaan yang terdaftar dalam WLKP Online Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan	53	[2.07.05.1.01.0001] [2.07.05.2.01.0001]
487	2.07.000077	Perjanjian Kerja Bersama (WLKP Online)	Dokumen	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama pada Perusahaan yang terdaftar dalam WLKP Online Jumlah Perjanjian Kerja Bersama pada Perusahaan yang terdaftar dalam WLKP Online. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.	0	[2.07.05.1.01.0002] [2.07.05.2.01.0002]
488	2.07.000078	Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kasus	Perselisihan Hubungan Industrial adalah Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serat perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan	0	[2.07.05.1.02.0002] [2.07.05.2.02.0002]
489	2.07.000083	Perusahaan dengan tenaga kerja minimal 50 orang	Perusahaan	Perusahaan yang memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 50 orang atau lebih	15	[2.07.02.1.01.0001] [2.07.02.1.01.0003] [2.07.02.1.01.0004] [2.07.02.2.01.0003] [2.07.02.2.01.0001]
490	2.07.000125	Dokumen Kerjasama Pelatihan Vokasi	Dokumen	Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk optimalisasi Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja yang diwujudkan dengan kesepakatan antar lembaga terkait	0	[2.07.03.1.01.0002] [2.07.03.2.01.0002]
491	2.12.000001	Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	Penyediaan data kependudukan Kabupaten/Kota adalah proses penyajian data kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri.	360	[2.12.05.2.01.0001]
492	2.12.000005	Data yang telah diolah dan disajikan	Dokumen		360	
493	2.12.000017	Dokumen Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen		1055 73	[2.12.02.2.03.0002]
494	2.12.000023	Dokumen Hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Penting	Dokumen		1660 1	[2.12.03.2.01.0001]
495	2.12.000025	Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen		306	[2.12.02.2.01.0001]
496	2.12.000035	Dokumen kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen		180	[2.12.04.2.01.0002]
497	2.12.000044	Dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Dokumen		309	[2.12.04.2.03.0004]
498	2.12.000046	Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dokumen		1	[2.12.05.2.01.0002]

499	2.12.000053	Laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan		9	[2.12.02.2.03.0003]
500	2.12.000060	Laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil	Laporan		9	[2.12.03.1.02.0001] [2.12.03.2.02.0006]
501	2.12.000074	Laporan hasil pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan		27	[2.12.04.2.04.0001]
502	2.12.000077	Laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Laporan		37	[2.12.02.2.01.0004]
503	2.12.000078	Laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk	Laporan		0	[2.12.02.2.03.0005]
504	2.12.000095	Penyediaan Data Agregat Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Data	Jumlah total penduduk provinsi dan kabupaten/kota, dan dipilah per jenis kelamin (laki-laki dan perempuan)	7574 44	[2.12.05.1.01.0001] [2.12.05.2.01.0001]
505	2.12.000098	Sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan	Kali	Sosialisasi administrasi kependudukan terutama pentingnya dokumen kependudukan untuk berbagai urusan layanan publik kepada masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan provinsi dan Sipil kabupaten/kota	0	[2.12.02.2.03.0005]
506	2.12.000099	Melakukan pendataan penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan	Kali	Dinas Dukcapil kabupaten/kota melakukan pendataan rutin terhadap penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan	6	[2.12.02.2.01.0001]
507	2.13.000043	lembaga adat di Kabupaten/Kota	Lembaga Adat	Afirmasi atas SK Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui Pendataan SK MHA, Fasilitasi Asistensi, Identifikasi, Verifikasi, Validasi Pengakuan dan Perlindungan MHA	0	[2.13.02.2.01.0005]
508	2.14.000001	Akseptor yang mendapat peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang	Daerah yang meningkatkan Kesertaan KB Pria	99	[2.14.03.2.03.0013] [2.14.04.2.01.0017] [2.14.04.2.01.0018] [2.14.04.2.01.0019] [2.14.04.2.01.0021] [2.14.04.2.01.0024] [2.14.04.2.01.0026] [2.14.04.2.02.0003]
509	2.14.000002	Akseptor yang telah mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Orang / Sertifikat	Daerah yang melaksanakan peningkatan kompetensi bagi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	2	[2.14.03.2.03.0015]
510	2.14.000003	Daerah Kab/Kota yang telah Menyusun dan Memanfaatkan GDPK	Laporan	Jumlah daerah kab/kota yang telah menyusun Dokumen GDPK 5 Pilar dan memanfaatkannya dalam pembangunan terutama dalam dokumen perencanaan daerah	1	[2.14.02.2.01.0002]
511	2.14.000013	Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	Laporan	Menghasilkan / Mengembangkan / Menyediakan Data dan Informasi Keluarga	1	[2.14.02.2.02.0011]
512	2.14.000014	Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang dimanfaatkan stakeholder/instansi/organisasi	Laporan	Melaksanakan Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1	[2.14.02.2.02.0010]
513	2.14.000015	Data Keluarga yang tercatat dan dilaporkan	Laporan	Melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1	[2.14.02.2.02.0012]
514	2.14.000017	Data Kependudukan yang telah tersedia dan diolah	Laporan	Data Kependudukan yang telah tersedia dan diolah	12	[2.14.02.2.02.0002]
515	2.14.000018	Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang telah diolah dan dilaporkan	Laporan	Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Keluarga Berencana yang telah diolah dan dilaporkan	1	[2.14.02.2.02.0013]
516	2.14.000019	Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	Daerah yang mengintegrasikan Pembangunan Lintas Sektor untuk dalam rangka penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas	1	[2.14.03.2.04.0002]
517	2.14.000022	Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kegiatan	Terlaksananya Harmonisasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	1	[2.14.04.2.01.0023]

518	2.14.000024	Dokumen Pemetaan Kependudukan	Dokumen	Melaksanakan/Hasil Pemetaan Kependudukan	1	[2.14.02.2.02.0019]
519	2.14.000025	Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kegiatan	Penyiapan Data Pendukung Perencanaan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1	[2.14.03.2.03.0005]
520	2.14.000026	Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang telah disusun	Laporan	Menyusun Profil Bangsa Kencana	1	[2.14.02.2.02.0020]
521	2.14.000028	Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan	Dukungan anggaran daerah yang tersedia untuk penanganan Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1	[2.14.03.2.03.0004]
522	2.14.000029	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	Daerah yang menyediakan Dukungan Operasional Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak, termasuk pelayanan di wilayah khusus, wilayah bencana, dan kegiatan momentum	1	[2.14.03.2.03.0011]
523	2.14.000034	Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	Daerah Menyediakan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1117	[2.14.04.2.01.0024]
524	2.14.000035	kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	Daerah Melaksanakan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	2	[2.14.04.2.01.0019] [2.14.04.3.03.0003] [2.14.04.4.03.0003]
525	2.14.000036	kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	Daerah yang melaksanakan kegiatan penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1117	[2.14.03.2.02.0004]
526	2.14.000037	Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen	Menyusun Kajian Dampak Kependudukan atau telaahan secara mendalam tentang dampak kependudukan/pengaruh perubahan sistem penduduk terhadap sistem sosial ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta daya dukung alam dan daya tampung lingkungan dalam rangka penyediaan informasi dan tindak lanjut Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	77	[2.14.02.2.02.0005]
527	2.14.000038	Kampung KB yang melaksanakan pengelolaan Program KKBPK (Bangga Kencana)	Kampung	Daerah yang melaksanakan dan mengelola Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berencana	77	[2.14.04.4.01.0018] [2.14.03.2.04.0005] [2.14.03.2.04.0006] [2.14.04.2.02.0005]
528	2.14.000040	Kampung KB yang telah menerima pembinaan	Kegiatan	Daerah yang melaksanakan Pembinaan Terpadu Kampung Keluarga Berkualitas	1	[2.14.03.2.04.0004]
529	2.14.000042	Kebijakan Pembangunan Daerah Kab/Kota terhadap Program KKBPK (Bangga Kencana) yg telah diserasikan	Dokumen	Daerah Melaksanakan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah terhadap Program Bangsa Kencana	1	[2.14.02.2.01.0020]
530	2.14.000044	Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok	Daerah Mengadakan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	30	[2.14.04.2.01.0026]
531	2.14.000045	Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok	Daerah Membentuk Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) / Pemberdayaan Ekonomi Keluarga).	745	[2.14.04.3.01.0017] [2.14.04.4.01.0017] [2.14.04.2.01.0028] [2.14.04.2.01.0015]

532	2.14.000047	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK yang telah sesuai Kearifan Budaya Lokal	Laporan	Daerah yang menyediakan Materi Promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	1	[2.14.04.1.01.0016] [2.14.03.2.01.0013]
533	2.14.000048	Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Laporan	Daerah Melaksanakan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga	1	[2.14.04.1.01.0023] [2.14.04.2.01.0025]
534	2.14.000049	Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	Daerah melaksanakan Pembinaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	1	[2.14.03.2.03.0008]
535	2.14.000050	Laporan hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	Daerah yang melakukan penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Penyuluh KB/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB).	2	[2.14.02.1.01.0013] [2.14.03.2.02.0006]
536	2.14.000051	Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	Daerah Melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1	[2.14.04.2.01.0017]
537	2.14.000052	Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	Daerah Melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1	[2.14.04.2.01.0008]
538	2.14.000053	Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	Daerah yang melaksanakan pengendalian dan pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan yang teregistrasi	1	[2.14.03.2.03.0001]
539	2.14.000056	Materi IPK (iBangga) yang telah tersedia dan dikembangkan	Dokumen	Daerah Melaksanakan Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga	1	[2.14.04.1.01.0024] [2.14.04.2.01.0027]
540	2.14.000057	Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan dikembangkan	Laporan	Daerah Menghasilkan/Mengembangkan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS sesuai Kearifan Lokal	1	[2.14.02.2.01.0007]
541	2.14.000058	Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan dikembangkan	Laporan	Daerah Menghasilkan/Mengembangkan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur NonFormal Sesuai Kearifan Lokal	1	[2.14.02.2.01.0008]
542	2.14.000061	Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) yang telah terlaksana	Kegiatan	Daerah yang melaksanakan Mekanisme Operasional Program Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	14	[2.14.03.2.01.0011]
543	2.14.000063	Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang didayagunakan	Organisasi	Daerah Melaksanakan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	7	[2.14.04.2.02.0002]
544	2.14.000065	Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang telah dikelola	Laporan	Daerah yang mengelola Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB	14	[2.14.03.2.01.0010]

545	2.14.000066	orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	Daerah yang melaksanakan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	10320	[2.14.03.2.03.0014]
546	2.14.000067	orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang / Sertifikat	Daerah yang melaksanakan peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	282	[2.14.03.2.03.0003]
547	2.14.000068	Orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Orang	Daerah yang melaksanakan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	8752	[2.14.03.2.03.0016]
548	2.14.000069	Orang yang telah menerima Advokasi, dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Laporan	Daerah Melaksanakan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	52	[2.14.04.2.01.0020]
549	2.14.000070	Orang yang telah menerima sosialisasi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Laporan	Daerah Melaksanakan Sosialisasi iBangga	52	[2.14.04.2.01.0022]
550	2.14.000071	orang yang telah mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Orang / Sertifikat	Daerah melaksanakan Pembinaan Peserta KB Pasca Pelayanan Kontrasepsi	20681	[2.14.03.2.03.0007]
551	2.14.000072	Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Laporan	Stakeholder (Lembaga pemerintah) dan Mitra Kerja (Lembaga Non Pemerintah) yang berkomitmen dan mendukung Program Bangga Kencana	1	[2.14.03.2.01.0014]
552	2.14.000073	Organisasi yang mendapatkan Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	Daerah yang meningkatkan penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	4	[2.14.03.2.04.0001]
553	2.14.000074	Organisasi yang mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	Daerah Melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	7	[2.14.04.2.02.0001]
554	2.14.000075	Organisasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	Daerah Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	7	[2.14.04.2.02.0003]
555	2.14.000077	Organisasi yang telah mendapatkan Pembinaan IMP dan Program KKBPK (Bangga Kencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Sertifikat / Kegiatan	Daerah yang IMPnya telah dibina dan daerah yang telah mendapatkan pembinaan Program Bangga Kencana di lini lapangan oleh PKB/PLKB	4	[2.14.03.2.02.0005]
556	2.14.000078	Organisasi yang telah menerima Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Organisasi	Daerah Melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1	[2.14.04.2.02.0004]
557	2.14.000081	Parameter Kependudukan yang telah dirumuskan	Dokumen	Melaksanakan Penetapan Parameter Pengendalian Penduduk dan KB sebagai target dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	1	[2.14.02.2.02.0017]
558	2.14.000087	Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kegiatan	Pendidikan Jalur Formal dan Nonformal Terimplementasi / Mengimplementasikan Pendidikan Kependudukan.	4	[2.14.02.2.01.0019]
559	2.14.000091	Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang telah menerima Orientasi dan Pelatihan Teknis	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1	[2.14.04.2.01.0021]
560	2.14.000094	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	4	[2.14.02.2.01.0021]
561	2.14.000095	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Penguatan Program Kerjasama Pendidikan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal	4	[2.14.02.2.01.0018]

562	2.14.000100	Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12	[2.14.02.2.02.0009]
563	2.14.000104	Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah menerima pembinaan dan pengawasan pencatatan	Sertifikat	Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	14	[2.14.02.2.02.0018] [2.14.03.2.01.0008]
564	2.14.000105	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Laporan	Daerah melakukan upaya penyebarluasan informasi yang menggunakan melalui Media Massa Cetak dan Elektronik, Media online, Media sosial dan Media tatap muka Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	12	[2.14.03.2.01.0012]
565	2.14.000107	Rapat Pengendalian Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah dilaksanakan	Kegiatan	Melaksanakan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	3	[2.14.02.2.01.0023]
566	2.14.000108	Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah terbentuk	Laporan / Dokumen	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	77	[2.14.02.2.02.0015]
567	2.14.000110	Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang telah tersedia	Laporan	Daerah yang menyediakan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	1	[2.14.03.2.02.0002]
568	2.14.000113	Satuan Pendidikan yang telah mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	4	[2.14.02.2.01.0009]
569	2.14.000117	Tenaga pelayanan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang / Sertifikat	Daerah yang meningkatkan kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	282	[2.14.03.2.03.0010]
570	2.14.000118	Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	Daerah Mengadakan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	30	[2.14.04.2.01.0018]
571	2.14.000119	Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB yang telah tersedia	Unit	Daerah melaksanakan pemenuhan sarana penunjang pelayanan KB sesuai jenis pelayanan yang diberikan	12	[2.14.03.2.03.0006] [2.14.04.3.03.0002] [2.14.04.4.03.0002]
572	2.15.000357	Unit Penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	Unit Penyelenggaraan Pelabuhan melaksanakan Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan	0	[2.15.03.2.13.0003] [2.15.03.2.13.0010]

573	2.15.000397	Koordinasi dalam memenuhi ketentuan wajib pembangunan bandara	Dokumen	Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam memenuhi kewajiban ketentuan pembangunan bandara Dalam Pembangunan Bandar Udara Umumdan Bandar Udara Khusus, Pemrakarsa/Penyelenggara Bandar Udara wajib memenuhi ketentuan: a. melaksanakan pekerjaan pembangunan Bandar Udara sesuai dengan Rencana Induk Bandar b. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Bandar Udara yang c. mentaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan d. memberikan akses terhadap pelaksanaan pengawasan dalam pembangunan Bandar e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Bandar Udara secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri, gubernur, dan/atau bupati/Walikota sesuai dengan dan f. melaporkan hasil pembangunan Bandar Udara kepada Menteri setelah selesainya pembangunan Bandar Udara	0	[2.15.04.3.02.0004] [2.15.04.4.02.0004] [2.15.04.3.03.0004] [2.15.04.4.03.0004]
574	2.15.000400	Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Dokumen	Koordinasi dilakukan oleh penyelenggara jasa kebandarudaraan dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan pelayanan jasa kebandarudaraan Pelayanan jasa Kebandarudaraan meliputi pelayanan jasa Pesawat Udara, penumpang, barang, dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/atau pengembangan: a. fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat b. fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan c. fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah dan d. lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.	0	[2.15.04.3.05.0002] [2.15.04.4.05.0002] [2.15.04.3.04.0002] [2.15.04.4.04.0002]
575	2.15.000411	Pengaman Perlintasan Sebidang atau Portal Pengaman Pengguna Jalan	Unit	Terdiri dari pengaman perlintasan berpintu dan tidak berpintu. Pengaman perlintasan berpintu terdiri dari: a. Pintu perlintasan manual mekanik: b. Pintu perlintasan manual c. Pintu perlintasan elektrik.	0	[2.15.05.2.01.0004] [2.15.05.1.01.0004]
576	2.15.000412	Alat Pendeteksi Kereta Api	Unit	Berfungsi untuk mengetahui kereta api yang akan melintas di perlintasan sebidang.	0	[2.15.05.2.01.0004] [2.15.05.1.01.0004]
577	2.15.000415	Penjaga Perlintasan Kereta Api	Orang	Orang yang menjaga perlintasan kereta api yang memiliki kompetensi dan kecakapan untuk menjaga perlintasan kereta api.	0	
578	2.15.000420	Yellow Box	Meter	Merupakan marka kotak berwarna kuning yang ditempatkan pada perlintasan sebidang untuk mencegah penumpukan kendaraan di atas perlintasan sebidang yang diakibatkan pengguna jalan tidak mau mengalah ketika kereta api akan melintas atau pintu perlintasan sudah tertutup.	0	[2.15.02.1.02.0002] [2.15.02.2.02.0002]
579	2.15.000421	Penjaga Perlintasan Kereta Api	Orang	Orang yang menjaga perlintasan kereta api yang memiliki kompetensi dan kecakapan untuk menjaga perlintasan kereta api.	0	[2.15.05.2.01.0004] [2.15.05.1.01.0004]

580	2.16.000067	Nama Domain Pemerintah Daerah	Domain	-Merupakan perhitungan Jumlah Nama Domain Pemerintah Daerah - Nama Domain Pemerintah Daerah adalah alamat resmi pemerintah daerah, layanan publik/layanan administrasi pemerintahan, atau layanan kegiatan berskala nasional/internasional yang telah didaftarkan dan menggunakan Nama Domain .go.id	298	[2.16.03.1.01.0004] [2.16.03.2.01.0004]
581	2.16.000069	Nama Domain Pemerintah Desa	Domain	-Merupakan perhitungan Jumlah Nama Domain Pemerintah Desa - Nama Domain Pemerintah Desa adalah alamat resmi pemerintah desa dan menggunakan Nama Domain desa.id (contoh: mekarsari.desa.id)	152	[2.16.03.2.01.0004]
582	2.16.000070	Rancangan Kebijakan domain arsitektur infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah		- Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait domain infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah - Domain arsitektur infrastruktur adalah bagian dari arsitektur SPBE Pemda yang secara detail membahas terkait infrastruktur SPBE yang digunakan dan/atau dibangun Pemda - Arsitektur SPBE pemerintah daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	1	[2.16.03.1.02.0015] [2.16.03.1.02.0034] [2.16.03.2.02.0018] [2.16.03.2.02.0037]
583	2.16.000071	Rancangan Kebijakan domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah		- Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah - Domain arsitektur aplikasi adalah bagian dari arsitektur SPBE Pemda yang secara detail membahas terkait aplikasi SPBE yang digunakan, dibangun dan/atau dikembangkan Pemda - Arsitektur SPBE pemerintah daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	1	[2.16.03.1.02.0015] [2.16.03.1.02.0034] [2.16.03.2.02.0018] [2.16.03.2.02.0037]
584	2.16.000072	Rancangan Kebijakan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah		-Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait peta rencana SPBE Pemerintah Daerah - Peta Rencana SPBE pemerintah daerah adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah	1	[2.16.03.1.02.0015] [2.16.03.1.02.0034] [2.16.03.2.02.0018] [2.16.03.2.02.0037]

585	2.16.000076	Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi	-Perhitungan Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional - Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE. - Pusat Data nasional merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung - Pusat Data nasional terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.	35	[2.16.03.1.02.0020]
586	2.16.000085	Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah daerah - Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah - Perangkat daerah yang dimaksud adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	20	[2.16.03.1.02.0014] [2.16.03.1.02.0036] [2.16.03.2.02.0021] [2.16.03.2.02.0034]
587	2.16.000086	Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	-Perhitungan Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah - Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah. - Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah	24	[2.16.03.1.02.0014] [2.16.03.1.02.0036] [2.16.03.2.02.0021] [2.16.03.2.02.0034]
588	2.16.000087	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Aplikasi	- Keterhubungan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan SPLP -Sistem Penghubung Layanan Pemerintah merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo	0	[2.16.03.1.02.0014] [2.16.03.1.02.0036] [2.16.03.2.02.0020] [2.16.03.2.02.0034]
589	2.16.000092	Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah	Aplikasi	-Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan pemerintah daerah. - Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat atau Pemerintah Daerah lain	0	[2.16.03.1.02.0017] [2.16.03.1.02.0033] [2.16.03.2.02.0020] [2.16.03.2.02.0032]

590	2.16.000093	Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo	Aplikasi	-Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo melalui mekanisme Pendaftaran PSE Lingkup Publik.	0	[2.16.03.1.02.0017] [2.16.03.1.02.0033] [2.16.03.2.02.0020] [2.16.03.2.02.0032]
591	2.16.000094	Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	Aplikasi	-Perhitungan aplikasi umum yang telah dimanfaatkan - Aplikasi Umum adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB	5	[2.16.03.1.02.0027] [2.16.03.1.02.0033] [2.16.03.2.02.0029] [2.16.03.2.02.0032]
592	2.16.000096	Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda	Layanan	-Jumlah Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda - Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.	75	[2.16.03.1.02.0021] [2.16.03.2.02.0025]
593	2.16.000097	Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda	Layanan	-Jumlah Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda - Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.	148	[2.16.03.1.02.0021] [2.16.03.2.02.0025]
594	2.16.000098	SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda	Surat Keputusan	-Perhitungan Jumlah SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda - Dokumen tersebut antara lain SK	1	[2.16.03.1.02.0016] [2.16.03.2.02.0015]
595	2.16.000108	Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas		- Perhitungan jumlah Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas -Pedoman Program Kota Cerdas merupakan pedoman program konsep pengelolaan kota/kabupaten berkelanjutan dan berdaya saing yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat, dan lebih makmur dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan komunikasi serta inovasi yang diarahkan untuk perbaikan kinerja, meningkatkan efisiensi, dan melibatkan partisipasi masyarakat.	1	[2.16.03.2.02.0027]
596	2.16.000109	Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Inovasi	- Perhitungan jumlah Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas -Inovasi Program Kota Cerdas merupakan perubahan cara,metode, teknologi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program atau layanan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan dampak positif kepada masyarakat	52	[2.16.03.3.02.0014] [2.16.03.4.02.0013] [2.16.03.4.02.0014] [2.16.03.3.02.0013] [2.16.03.2.02.0027]

597	2.16.000110	Pengguna SPBE yang mendapatkan literasi SPBE	Orang	-Perhitungan Jumlah pengguna SPBE yang mengikuti Promosi Literasi SPBE - Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.	25	[2.16.03.1.02.0028] [2.16.03.3.01.0015] [2.16.03.4.01.0015] [2.16.03.1.02.0035] [2.16.03.2.02.0028] [2.16.03.3.02.0015] [2.16.03.4.02.0015] [2.16.03.2.02.0035]
598	2.16.000111	Audit TIK internal	Dokumen	-Jumlah dokumen Audit TIK internal - audit TIK internal dilaksanakan secara periodik oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi pengawasan internal dan dapat melibatkan pegawai Aparatur Sipil Negara dari unit kerja lain yang memiliki kompetensi Audit TIK	2	[2.16.03.1.02.0024] [2.16.03.2.02.0026]
599	2.16.000114	Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor	Aduan	- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor - Pengaduan Masyarakat adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara	616	[2.16.02.1.01.0023] [2.16.02.2.01.0019]
600	2.16.000115	Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR	Aduan	- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat - Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnyamedia resmi pemerintah daerah (Misalnya Twiter, IG, FB, Website, dll)	176	[2.16.02.1.01.0023] [2.16.02.2.01.0019]
601	2.16.000116	Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah	Kanal	- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat - Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnyamedia resmi pemerintah daerah (Misalnya Twiter, IG, FB, Website, dll)	2	[2.16.02.1.01.0023] [2.16.02.2.01.0019]
602	2.18.000001	Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal.	Orang	Pengertian Bimtek (Bimbingan Teknis) adalah Pelatihan yang biasanya dilaksanakan oleh Lembaga Resmi dengan Tujuan untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta yang Dimana Materi yang diberikan Meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll.	5	[2.18.05.1.01.0006] [2.18.05.2.01.0005]
603	2.18.000002	Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis.	Orang	Pengertian Bimtek (Bimbingan Teknis) adalah Pelatihan yang biasanya dilaksanakan oleh Lembaga Resmi dengan Tujuan untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta yang Dimana Materi yang diberikan Meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll.	26	[2.18.05.1.01.0006] [2.18.05.2.01.0005] [1.01.02.3.06.0057] [1.01.02.4.05.0069] [1.01.02.3.05.0072] [1.01.02.4.06.0059]

604	2.18.000004	Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;	Dokumen	& Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.&	58	[2.18.06.1.01.0002] [2.18.04.1.01.0001] [2.18.04.1.01.0006] [2.18.04.1.02.0001] [2.18.04.1.02.0007] [2.18.06.1.01.0001] [2.18.06.2.01.0002] [2.18.06.2.01.0001] [2.18.04.2.01.0001] [2.18.04.2.01.0006]
605	2.18.000005	Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik.	Dokumen	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi penggunaan kalimat Non Perizinan	12	[2.18.04.1.01.0001] [2.18.04.1.01.0006]
606	2.18.000006	Informasi Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;	Dokumen	& Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.&	12	[2.18.06.1.01.0002] [2.18.06.3.02.0001] [2.18.06.4.02.0001] [2.18.07.3.01.0001] [2.18.07.3.02.0001] [2.18.07.4.01.0001] [2.18.07.4.02.0001] [2.18.04.2.01.0006] [2.18.06.2.01.0001]
607	2.18.000007	Pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Non Perizinan.	Orang	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi penggunaan kalimat Non Perizinan	1	[2.18.04.1.01.0008] [2.18.04.2.01.0003]
608	2.18.000010	Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Perizinan;	Orang	Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Pelayanan Terpadu Perizinan adalah sistem pelayanan perizinan (izin dan non izin) yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen perizinan dengan transparan dan terpadu pada satu tempat.	0	[2.18.04.2.01.0007]
609	2.18.000013	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Perizinan berbasis Sistem secara Elektronik;	Orang	Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Perizinan berbasis sistem secara elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.	9404	[2.18.04.2.01.0006] [2.18.04.2.01.0007]
610	2.18.000014	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Elektronik.	Orang	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi penggunaan kalimat Non Perizinan	1127	[2.18.04.2.01.0006]

611	2.18.000016	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Perizinan berbasis Elektronik;	Orang	Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Pelayanan terpadu perizinan berbasis elektronik adalah Perizinan berbasis sistem secara elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.	6451	[2.18.04.2.01.0006]
612	2.18.000017	Pelaku usaha yang menggunakan Perizinan berbasis Sistem Elektronik;	Orang	Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Perizinan berbasis sistem elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.	6451	[2.18.04.1.01.0006] [2.18.04.1.01.0008] [2.18.04.1.02.0006] [2.18.04.2.01.0006] [2.18.04.2.01.0007]
613	2.18.000018	Peraturan Daerah (Perda) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.	Dokumen	Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota.&	1	[2.18.02.1.02.0001] [2.18.04.1.01.0005] [2.18.02.2.02.0001] [2.18.04.2.01.0005]
614	2.18.000021	Peraturan daerah yang mengatur tentang promosi penanaman modal.	Dokumen	Perumusan strategi Promosi untuk mendorong peningkatan Minat Investasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan promosi berdasarkan pada Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal yang diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal	1	[2.18.03.1.01.0001] [2.18.03.1.01.0002] [2.18.03.1.01.0003] [2.18.02.1.02.0005] [2.18.02.1.02.0002] [2.18.02.1.02.0003] [2.18.03.2.01.0003] [2.18.03.2.01.0002] [2.18.03.2.01.0001] [2.18.02.2.02.0002] [2.18.02.2.02.0004] [2.18.02.2.02.0003]

615	2.18.000026	peraturan Kepala Daerah tentang pemberian fasilitasi/insentif Penanaman modal di daerah;	Dokumen	Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah.	1	[2.18.02.1.01.0001] [2.18.02.1.01.0002] [2.18.02.1.01.0003] [2.18.02.1.02.0004] [2.18.02.3.03.0001] [2.18.02.3.04.0001] [2.18.02.3.05.0001] [2.18.02.4.03.0001] [2.18.02.4.04.0001] [2.18.02.4.05.0001] [2.18.04.1.02.0005] [2.18.04.1.02.0004] [2.18.04.1.01.0004] [2.18.04.1.01.0005] [2.18.02.2.01.0001] [2.18.02.2.01.0002] [2.18.04.2.01.0004] [2.18.04.2.01.0005] [2.18.02.2.01.0003] [2.18.02.3.03.0001] [2.18.02.3.04.0001] [2.18.02.3.05.0001] [2.18.02.4.03.0001] [2.18.02.4.04.0001] [2.18.02.4.05.0001]
616	2.18.000027	Peraturan Kepala Daerah tentang pemberian kemudahan berusaha Penanaman modal di daerah.	Dokumen	Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah.	1	[2.18.02.1.01.0001] [2.18.02.3.06.0001] [2.18.02.4.06.0001] [2.18.02.2.01.0001] [2.18.02.3.06.0001] [2.18.02.4.06.0001]
617	2.18.000028	Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.	Dokumen	Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergal yang terdapat pada suatu daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai nilai ekonomi	1	[2.18.02.2.02.0004] [2.18.02.2.02.0002] [2.18.02.2.02.0003] [2.18.02.4.06.0001] [2.18.02.3.06.0001]
618	2.18.000030	Rencana Minat Investasi di dalam negeri;	Dokumen	Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, langsung maupun tidak langsung dengan harapan di kemudian hari pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dari hasil penanaman modalnya. Investasi di dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.	3	[2.18.02.1.01.0003] [2.18.02.1.02.0001] [2.18.02.1.02.0004] [2.18.03.2.01.0002] [2.18.02.2.01.0003] [2.18.02.2.02.0001]
619	2.18.000031	Rencana Minat Investasi di luar negeri.	Dokumen	Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, langsung maupun tidak langsung dengan harapan di kemudian hari pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dari hasil penanaman modalnya. Investasi di luar negeri adalah investasi asing langsung atau penanaman modal asing, di mana seorang investor pada lingkup perekonomian suatu negara menaruh minat pada bisnis di lingkup perekonomian negara lain.	0	[2.18.03.2.01.0002]

620	2.18.000032	Unit Usaha yang dilakukan pengawasan.	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya.	52	[2.18.05.1.01.0004] [2.18.05.2.01.0006]
621	2.18.000034	Unit Usaha yang memenuhi komitmen perizinan berUsaha.	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.	907	[2.18.05.1.01.0005] [2.18.05.2.01.0004]
622	2.18.000036	Unit Usaha yang memperoleh insentif di daerah;	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.	0	[2.18.02.1.01.0004] [2.18.02.2.01.0004]
623	2.18.000037	Unit Usaha yang memperoleh kemudahan berUsaha di daerah.	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Kemudahan Berusaha adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.	8191	[2.18.02.1.01.0004] [2.18.02.2.01.0004]
624	2.18.000038	Unit usaha yang terpenuhi Komitmen Non Perizinan Penanaman Modal.	Unit Usaha	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi penggunaan kalimat Non Perizinan	1213	[2.18.04.1.02.0008] [2.18.04.2.01.0008]
625	2.18.000040	Unit Usaha yang terpenuhi Komitmen Perizinan Penanaman Modal;	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Perizinan adalah merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.	907	[2.18.04.1.02.0008] [2.18.04.2.01.0008]
626	2.18.000043	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	Kemitraan adalah kerjasama yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung antara pelaku UMKM dengan usaha besar	4	[2.18.02.1.01.0003] [2.18.02.1.02.0004] [2.18.07.3.03.0001] [2.18.07.4.03.0001] [2.18.02.2.01.0003]
627	2.20.000019	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	Metadata Statistik Sektoral adalah Jumlah metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator yang disampaikan kepada Pembina Data Statistik. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.	34	[2.20.02.2.01.0010] [2.20.02.1.01.0011]
628	2.20.000020	Jumlah kegiatan statisik sektoral yang telah dilengkapi standar data		Jumlah Statistik Sektoral yang dilengkapi standar data yang sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Standar Data	6	[2.20.02.1.01.0011] [2.20.02.2.01.0010]
629	2.20.000021	Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi		Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi adalah jumlah indikator statistik sektoral yang menggunakan kode referensi yang sudah disepakati. Kode referensi adalah kode yang dibahas dan disepakati dalam forum satu data indonesia tingkat pusat.	1	[2.20.02.2.01.0010] [2.20.02.1.01.0011]

630	2.20.000023	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu dibagi dengan kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh produsen data. Jumlah kegiatan statistik sektoral yang rilis sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dimasukkan kedalam penghitungan adalah kegiatan statistik sektoral yang dihasilkan oleh produsen data pada tahun tersebut. Survei Kebutuhan Data Statistik Sektoral adalah Survei yang digunakan untuk identifikasi kebutuhan data statistik sektoral kepada pengguna data.	100%	[2.20.02.2.01.0009] [2.20.02.1.01.0008]
631	2.20.000024	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang sudah dimintakan rekomendasi kegiatannya kepada Pembina Data Statistik.	34	[2.20.02.2.01.0011] [2.20.02.1.01.0010]
632	2.20.000025	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik adalah jumlah pegawai di OPD yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang statistik baik oleh pembina data statistik maupun dari pihak lain.	53	[2.20.02.1.01.0007] [2.20.02.1.01.0020] [2.20.02.2.01.0007] [2.20.02.2.01.0020]
633	2.20.000026	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data	Orang	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data adalah jumlah pegawai di OPD yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data baik oleh pembina data statistik maupun dari pihak lain.	53	[2.20.02.1.01.0007] [2.20.02.1.01.0020] [2.20.02.2.01.0007] [2.20.02.2.01.0020]
634	2.20.000028	Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase	Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan adalah Jumlah OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan dibanding dengan total seluruh OPD.	100%	[2.20.02.2.01.0008] [2.20.02.1.01.0009]
635	2.20.000030	Jumlah pembinaan dibidang statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data	Laporan	Jumlah Laporan pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data adalah jumlah pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh walidata kepada produsen data.	3	[2.20.02.1.01.0007] [2.20.02.1.01.0020] [2.20.02.2.01.0007] [2.20.02.2.01.0020]
636	2.20.000031	Jumlah sosialisasi hasil statistik sektoral dalam rangka peningkatan literasi pengguna data	Laporan	Jumlah Laporan sosialisasi yang dilakukan oleh produsen data atau walidata untuk meningkatkan literasi/pemahaman data statistik pengguna data.	0	[2.20.02.2.01.0008] [2.20.02.1.01.0009]
637	2.20.000050	Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah	Kegiatan	Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/OPD	34	[2.20.02.1.01.0016] [2.20.02.1.01.0018] [2.20.02.1.01.0017] [2.20.02.2.01.0018] [2.20.02.2.01.0021] [2.20.02.2.01.0017]
638	2.20.000051	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi dan/atau data induk	Kegiatan	Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/OPD yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi	6	[2.20.02.1.01.0016] [2.20.02.2.01.0018]

639	2.20.000052	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Persentase	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi 4 prinsip SDI dibagi dengan jumlah kegiatan statistik sektoral di pemerintah daerah dikalikan 100 persen.	-	[2.20.02.1.01.0016] [2.20.02.2.01.0018]
640	2.20.000053	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda	Kegiatan	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya (data/indikator dari kegiatan statistik tersebut) dapat diakses/tersedia di portal data pemda	975 data	[2.20.02.1.01.0019] [2.20.02.2.01.0019]
641	2.20.000054	Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data pemda	Persentase	Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data pemda adalah persentase pengguna data mengakses portal data pemda yang merasa puas dibandingkan dengan jumlah total pengguna data yang mengakses portal data pemda	-	[2.20.02.1.01.0019] [2.20.02.2.01.0019]
642	2.20.000055	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Persentase	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda dibagi dengan total jumlah kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh Pemda/OPD dikalikan 100 persen	100	[2.20.02.1.01.0019] [2.20.02.2.01.0019]
643	2.20.000058	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Persentase	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS dibagi dengan jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dikalikan 100 persen	70%	[2.20.02.1.01.0017] [2.20.02.2.01.0017]
644	2.20.000059	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Kegiatan	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi resmi dari BPS	24	[2.20.02.1.01.0017] [2.20.02.2.01.0017]
645	2.20.000060	Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerah	Kegiatan	Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerah adalah jumlah penyelenggaraan wadah komunikasi dan koordinasi internal Pemerintah Daerah dan/atau Internal Pemerintah Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan dalam 1 tahun	4	[2.20.02.1.01.0021] [2.20.02.2.01.0022]
646	2.21.000001	Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	2	[2.21.02.1.01.0001] [2.21.02.1.01.0008] [2.21.02.2.01.0001] [2.21.02.2.01.0008]
647	2.21.000002	Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	12	[2.21.02.1.01.0001] [2.21.02.1.01.0008] [2.21.02.2.01.0001] [2.21.02.2.01.0008]
648	2.21.000007	Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	41	[2.21.02.1.01.0004] [2.21.02.1.01.0006] [2.21.02.2.01.0004] [2.21.02.2.01.0007]

649	2.21.000008	Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	41	[2.21.02.1.02.0001] [2.21.02.1.02.0002] [2.21.02.2.02.0001] [2.21.02.2.02.0002]
650	2.21.000009	Laporan Analisis Kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah Laporan penjabaran informasi kebutuhan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	[2.21.02.2.01.0002] [2.21.02.2.01.0006]
651	2.21.000010	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dalam pelaksanaan kegiatan identifikasi, deteksi, proteksi dan penanggulangan dan pemulihan.	12	[2.21.02.2.01.0003] [2.21.02.2.01.0005]
652	2.21.000011	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Non Elektronik	Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis non elektronik dengan tahapan pemrosesan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi non elektronik	12	[2.21.02.2.01.0003] [2.21.02.2.01.0005]
653	2.21.000012	Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah laporan pengelolaan sumber daya keamanan informasi yang mencakup pada pengelolaan aset TIK, sumber daya manusia dan manajemen pengetahuan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	[2.21.02.2.01.0002] [2.21.02.2.01.0006]
654	2.22.000001	Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang dipublikasikan	Dokumen	- Adat istiadat : Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari. - Media Luar ruangan : Media Luar ruangan adalah media yang berukuran besar dipasang ditempat-tempat terbuka seperti dipinggir jalan, dipusat keramaian atau tempat-tempat khusus lainnya, seperti di dalam bus kota, gedung, pagar tembok dan sebagainya.	0	[2.22.07.7.01.0006] [2.22.07.7.01.0006]
655	2.22.000018	Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses masyarakat	Dokumen	- Dokumen : Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun. - Informasi : Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau nonelektronik. - Sejarah : Sejarah adalah kumpulan benda kebudayaan baik yang bersifat fisik, bersifat tulisan, bersifat lisan, maupun audiovisual untuk membuktikan sejarah.	3	[2.22.04.2.01.0003]

656	2.22.000019	Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Dokumen	- Dokumen : Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun. - Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. - Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	0	[2.22.08.5.01.0001]
657	2.22.000020	Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)	Dokumen	- Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun. - Polmas adalah singkatan dari Pemolisian Masyarakat.	0	[2.22.08.5.05.0002] [2.22.07.7.02.0002]
658	2.22.000021	Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	Dokumen	&- Dokumen : Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun. - Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi. - Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.	0	[2.22.08.5.05.0003]
659	2.22.000024	Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Dokumen	- Dokumen : Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun.	0	[2.22.08.5.07.0018]

660	2.22.000025	Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Dokumen	- Dokumen : Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun. - Pengembangan : Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. - Sistem Pertanian Tradisional : Sistem Pertanian Tradisional adalah siklus pertanian tahunan yang terpadu dengan peternakan kerbau dan hewan peliharaan lainnya yang dilakukan oleh petani di Krayan secara turun temurun yang sifatnya adaptif, ramah lingkungan, berkelanjutan, efisien dan tidak menggunakan input bahan kimia sintetis (pupuk, pestisida, antibiotik dan lain-lain), serta melestarikan varietas lokal dataran tinggi Krayan	0	[2.22.08.5.08.0007] [2.22.08.5.06.0007]
661	2.22.000026	Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan	Dokumen	&- Dokumen : Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun. - Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. - Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. - Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.	18	[2.22.08.5.05.0001]
662	2.22.000027	Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Dokumen	- Dokumen : Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun. - Publikasi : Publikasi adalah kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat umum. - Seni : Yang dimaksud dengan &seni& adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis wansan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan / atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.	0	[2.22.08.5.09.0007] [2.22.08.5.07.0007]
663	2.22.000030	Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang dibangun	Objek	&- Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas. - Digital meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada piranti lunak, multimedia, dan/atau data elektronik.	0	[2.22.08.5.04.0002]

664	2.22.000032	Kasus Sengketa Adat yang terdata dan terdokumentasi	Kasus	Sengketa merupakan perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan diantara mereka	0	[2.22.07.7.03.0006]
665	2.22.000034	Keluarga Meudab dan Adat Perkawinan yang dibina	Keluarga	- Keluarga : keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga - Perkawinan : perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.	0	[2.22.07.7.01.0004] [2.22.07.7.01.0004]
666	2.22.000038	Koleksi museum yang di kembangkan dan dimanfaatkan	Unit	&- Koleksi Museum : Koleksi Museum yang selanjutnya disebut Koleksi adalah benda cagar budaya, bangunan sagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya dan/atau bukan cagar budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau materi alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata&	0	[2.22.06.2.01.0001]
667	2.22.000044	Laporan pengembangan Museum Gunungapi Merapi	Laporan	&- Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. - Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan Koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.	0	[2.22.08.5.07.0016]
668	2.22.000046	Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	Laporan	- Kebudayaan : Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.	0	[2.22.08.5.09.0005] [2.22.08.5.07.0005]
669	2.22.000048	Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Laporan	&- Cagar Budaya : Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.	0	[2.22.05.2.03.0002]
670	2.23.000095	Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.	69	[2.23.02.2.01.0002] [2.23.02.2.02.0002] [2.23.02.2.01.0007]
671	2.23.000099	Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah Dasar sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan.	384	[2.23.02.2.01.0004]

672	2.23.000100	Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah Menengah Pertama sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan.	72	[2.23.02.2.01.0004]
673	2.23.000102	Perpustakaan Kelurahan/Desa	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.	68	[2.23.02.2.01.0002]
674	2.23.000103	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah pemustaka / masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan umum yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota	4453 0	[2.23.02.2.01.0010] [2.23.02.2.01.0014]
675	2.23.000111	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota	Judul	Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan sekolah dasar/ sederajat yang berada di wilayah kabupaten/kota	9680 69	[2.23.02.2.01.0009]
676	2.23.000112	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota	Judul	Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan sekolah menengah pertama/ sederajat yang berada di wilayah kabupaten/kota	1942 21	[2.23.02.2.01.0009]
677	2.23.000114	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Desa/Kelurahan	Judul	Jumlah Semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di Perpustakaan Desa/Kelurahan yang berada di wilayah kabupaten/kota	3450 00	[2.23.02.2.01.0009]
678	2.23.000120	Tenaga Teknis Perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Umum di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan)	11	[2.23.02.2.01.0010]
679	2.23.000122	Tenaga Teknis Perpustakaan Sekolah Dasar binaan Kabupaten/Kota	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Sekolah Dasar di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan)	88	[2.23.02.2.01.0010]
680	2.23.000123	Tenaga Teknis Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama binaan Kabupaten/kota	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan)	62	[2.23.02.2.01.0010]
681	2.23.000125	Tenaga Teknis Perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Desa/Kelurahan di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan)	40	[2.23.02.2.01.0010]

682	2.23.000126	Pustakawan pada Perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Umum di wilayah Kabupaten/Kota	7	[2.23.02.2.01.0010]
683	2.23.000128	Pustakawan pada Perpustakaan Sekolah Dasar binaan Kabupaten/Kota	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan satuan pendidikan menengah di wilayah provinsi Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Sekolah Dasar/ sederajat di wilayah Kabupaten/Kota	19	[2.23.02.2.01.0010]
684	2.23.000129	Pustakawan pada Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama binaan Kabupaten/kota	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan satuan pendidikan khusus di wilayah provinsi Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat di wilayah Kabupaten/Kota	6	[2.23.02.2.01.0010]
685	2.23.000132	Anggota perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan umum yang berada di wilayah Kabupaten/Kota	7381	[2.23.02.2.01.0010]
686	2.23.000134	Anggota perpustakaan sekolah dasar binaan Kabupaten/kota	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan satuan Sekolah dasar (SD) / Sederajat yang berada di wilayah Kabupaten/Kota	3235 5	[2.23.02.2.01.0010]
687	2.23.000135	Anggota perpustakaan sekolah menengah pertama binaan Kabupaten/kota	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Sederajat yang berada di wilayah Kabupaten/Kota	2852 3	[2.23.02.2.01.0010]
688	2.23.000137	Anggota perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan desa/kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten/Kota	1711 2	[2.23.02.2.01.0010]
689	2.23.000138	Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat kabupaten/kota	Orang	Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat Kabupaten/Kota	580	[2.23.02.2.01.0015] [2.23.02.2.02.0001]
690	2.23.000141	Jumlah Perpustakaan yang melaksanakan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial	Orang	Perpustakaan hadir sebagai penyedia layanan yang membuka akses masyarakat pada pengetahuan dan menjadi sarana reproduksi pengetahuan ke dalam aksi nyata yang menyejahterakan perpustakaan yang melakukan replikasi terhadap program layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilaksanakan oleh Perpunas	13	[2.23.02.2.02.0004]
691	3.26.000013	Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	Dokumen hasil fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual adalah Bukti Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual ke Kementerian Hukum dan HAM	0	[3.26.04.1.02.0018] [3.26.04.2.02.0022]

692	3.26.000020	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	Melakukan Monitoring dan Evaluasi pengembangan keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberi nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum	0	[3.26.04.2.02.0020]
693	3.26.000162	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Unit	&Infrastruktur Ekonomi Kreatif terdiri atas: a. infrastruktur dan b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Infrastruktur fisik adalah ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi&& adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data.&	0	[3.26.04.1.02.0019] [3.26.04.2.02.0004]
694	3.26.000169	Dokumen Peluang Investasi Sektor Parekraf	Dokumen	Penyusunan dokumen atau kajian peluang investasi sektor Parekraf.	0	[3.26.02.1.04.0010] [3.26.02.2.04.0012]
695	3.26.000180	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Unit	Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan ekosistem Kabupaten/Kota Kreatif	0	[3.26.04.1.01.0001] [3.26.04.2.01.0001]
696	3.26.000229	Data SDM yang memiliki kompetensi ekonomi kreatif setelah difasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	Memberikan fasilitasi Pelatihan (re-skilling, up-skilling, new-skilling), Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	0	[3.26.05.1.02.0001] [3.26.05.2.02.0001]
697	3.26.000232	Data tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi	Orang	Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata setelah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	0	[3.26.05.1.01.0004] [3.26.05.2.01.0010]
698	3.26.000240	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	Orang	- Inventarisasi terhadap kegiatan pengembangan SDM Parekraf yang telah dilakukan - Melakukan persandingan antara target volume output dan realisasi volume output jumlah orang yang telah difasilitasi pengembangan SDM Parekraf - Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan melalui penyebaran kuisioner untuk mengetahui manfaat yang dirasakan oleh peserta pelatihan - Pelaporan kinerja	0	[3.26.05.2.01.0011]
699	3.26.000249	Data SDM yang memiliki kompetensi setelah mengikuti fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) bagi pelaku ekonomi kreatif. Selanjutnya peserta PBK akan difasilitasi untuk sertifikasi kompetensinya	0	[3.26.05.1.01.0017] [3.26.05.2.01.0006]
700	3.26.000250	Data pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif setelah mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)	0	[3.26.05.1.01.0017] [3.26.05.2.01.0006]
701	3.26.000259	Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen	- Inventarisasi terhadap kegiatan pengembangan SDM Parekraf yang telah dilakukan - Melakukan persandingan antara target volume output dan realisasi volume output jumlah orang yang telah difasilitasi pengembangan SDM Parekraf - Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan melalui penyebaran kuisioner untuk mengetahui manfaat yang dirasakan oleh peserta pelatihan - Pelaporan kinerja	0	[3.26.05.2.01.0011]

702	3.26.000260	Pelaku Usaha Parekraf yang Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan	Orang	Data Pelaku Usaha sektor parekraf yang telah Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan	0	[3.26.04.2.02.0003]
703	3.26.000261	Data Profiling Pelaku Usaha Sektor Parekraf	Data	Data yang berisi terkait perizinan atau legalisasi yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Parekraf	0	[3.26.02.1.04.0011] [3.26.02.2.04.0009]
704	3.27.000238	Jumlah analisis Risiko media pembawa penyakit hewan lainnya	Laporan	Jumlah Pemindaian terhadap Potensi Wabah Penyakit Hewan yang berkaitan dengan lalu-lintas hewan dan produk hewan	4	[3.27.04.1.02.0005] [3.27.04.2.02.0007]
705	3.27.000239	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan	Laporan	Jumlah Pemindaian terhadap Potensi Wabah Penyakit Hewan yang berkaitan dengan lalu-lintas hewan dan produk hewan	4	[3.27.04.1.02.0005] [3.27.04.2.02.0007]
706	3.27.000240	Jumlah analisis Risiko Penyakit zoonosis	Laporan	Jumlah Pemindaian terhadap Potensi perpindahan Penyakit Hewan yang berkaitan dengan lalu-lintas hewan dan produk hewan di lapangan	4	[3.27.04.1.02.0005]
707	3.27.000241	Jumlah analisis Risiko produk hewan	Laporan	jumlah kasus pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit hewan menular prioritas.	4	[3.27.04.1.02.0005] [3.27.04.2.02.0007]
708	3.27.000242	Jumlah analisis Risiko zoonosis	Laporan	jumlah kegiatan analisa risiko kejadian zoonosis di suatu wilayah	4	[3.27.04.2.02.0007]
709	3.27.000299	Jumlah Eksisting Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Unit	Jumlah Laboratorium keswan dan kesmavet yang berfungsi baik	1	[3.27.03.2.02.0012]
710	3.27.000300	Jumlah eksisting Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	Ketersediaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi pengawasan, pengamatan, pemantauan penyakit hewan yang bersifat zoonosis dan non zoonosis serta kualitas pangan asal hewan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi	1	[3.27.03.1.01.0012]
711	3.27.000301	Jumlah eksisting laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan	Unit	Ketersediaan unit pengujian terhadap tingkat kesehatan hewan/ternak yang bersifat penyakit infeksius atau penyakit non infeksius	1	
712	3.27.000327	Jumlah Eksisting Rumah Potong Hewan	Unit	Banyaknya RPH yang beroperasi dan berfungsi baik	1	[3.27.03.2.02.0015]
713	3.27.000328	Jumlah galur ternak yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Galur	Jumlah galur ternak yang dilestarikan dan dimurnikan	1	[3.27.02.2.02.0005]
714	3.27.000329	Jumlah galur yang dimanfaatkan	Galur	Jumlah jenis galur yang berkualitas dan telah dimanfaatkan	1	[3.27.02.2.02.0003]
715	3.27.000330	Jumlah galur yang dinilai	Galur	Sekumpulan atau sekelompok individu hewan dalam satu rumpun yang memiliki karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan	1	[3.27.02.1.03.0006]
716	3.27.000331	Jumlah galur yang ditingkatkan kualitasnya	Galur	Jumlah jenis galur yang dilakukan perusahaan peningkatan kualitas	1	[3.27.02.2.02.0002]
717	3.27.000336	Jumlah Hasil pengujian di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Laporan	Hasil uji Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dilakukan pada Laboratorium terakreditasi	4	[3.27.04.2.04.0004]
718	3.27.000356	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang diawasi	Laporan	banyaknya izin usaha RPH yang diawasi	1	[3.27.06.2.02.0005]
719	3.27.000441	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Orang	sekelompok atau golongan masyarakat yang sadar terhadap kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan sanitasi persyaratan teknis	150	[3.27.04.1.03.0007]
720	3.27.000442	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	Orang	Banyaknya masyarakat yang teredukasi dan meningkat pemahamannya terhadap kesmavet dan keswan	250	[3.27.04.2.04.0008]
721	3.27.000445	Jumlah Paramedik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	Orang	Ketersediaan Petugas Paramedik Veteriner yang memiliki kewenangan dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengawasan, sesuai dengan prosedur dan teknik kerja tertentu	22	[3.27.02.1.04.0005]

722	3.27.000448	Jumlah pelayanan jasa laboratorium	Laporan	banyaknya pelayanan jasa pada laboratorium kesehatan hewan yang beroperasi dan berfungsi baik	4	[3.27.04.2.03.0001]
723	3.27.000463	Jumlah Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan	Laporan	Banyaknya penerapan terhadap persyaratan teknis pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan dari dan ke luar daerah Kab/Kota	2	[3.27.04.2.02.0004]
724	3.27.000470	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan	Laporan	Pengawasan dengan Penerapan Persyaratan Teknis yang dilakukan dalam rangka Pemasukan/Pengeluaran Hewan Hidup baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi	4	[3.27.04.1.02.0007] [3.27.04.2.02.0004]
725	3.27.000471	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya	Laporan	Pengawasan dengan Penerapan Persyaratan Teknis yang dilakukan dalam rangka Pemasukan/Pengeluaran Produk berupa media pembawa penyakit hewan baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi	4	[3.27.04.1.02.0007] [3.27.04.2.02.0004]
726	3.27.000472	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan	Laporan	Pengawasan dengan Penerapan Persyaratan Teknis yang dilakukan dalam rangka Pemasukan/Pengeluaran Produk Hewan baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi	4	[3.27.04.1.02.0007]
727	3.27.000506	Jumlah Petugas Medik Veteriner	Orang	Banyaknya petugas medik veteriner di daerah	22	[3.27.04.2.03.0002]
728	3.27.000509	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Orang	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner yang sesuai standar dan mutu dalam rangka peningkatan mutu	52	[3.27.04.1.04.0004] [3.27.04.2.04.0007]
729	3.27.000510	Jumlah petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Orang	Banyaknya petugas teknis kesehatan hewan, kesmavet dan keswan yang mengikuti pengembangan kompetensi	52	[3.27.04.1.04.0004] [3.27.04.2.04.0007]
730	3.27.000574	Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang dilakukan pelestarian	Ekor	Banyaknya rumpun/galur ternak yang dilestarikan	23	[3.27.03.2.03.0001]
731	3.27.000575	Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang dilakukan pemanfaatan	Ekor	Banyaknya rumpun/galur ternak yang dimanfaatkan	23	[3.27.03.2.03.0001]
732	3.27.000588	Jumlah Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Sertifikat	Sertifikat yang tersedia sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene-sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan, untuk memastikan bahwa unit usaha telah memenuhi persyaratan hygiene-sanitasi dan menerapkan cara produksi yang baik	0	[3.27.04.1.05.0003]
733	3.27.000599	Jumlah wilayah Penanggulangan Zoonosis	Wilayah	Wilayah dengan risiko zoonosis dan dapat dikendalikan melalui pengawasan yang dilakukan	14	[3.27.05.2.01.0004]
734	3.27.000602	Jumlah wilayah terkendali Zoonosis	Wilayah	Wilayah dengan risiko zoonosis dan dapat dikendalikan melalui pengawasan yang dilakukan	14	[3.27.04.1.01.0006] [3.27.04.2.01.0007]
735	3.27.000603	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	Wilayah yang dilakukan pengawasan melalui peningkatan surveilans terpadu berbasis risiko dan kemampuan untuk deteksi kasus, perbaikan biosekuriti	14	[3.27.04.1.01.0004] [3.27.04.2.01.0005]
736	3.27.000636	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Laporan	Banyaknya unit usaha yang didampingi dalam menerapkan prinsip kesejahteraan hewan	1	[3.27.04.2.05.0003]
737	3.27.000641	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi	Unit Usaha	unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi sebagai jaminan keamanan dan kualitas untuk produk pangan asal ternak yang dikonsumsi masyarakat.	26	[3.27.04.1.03.0005] [3.27.04.2.04.0005]
738	3.31.000003	Fasilitas non fiskal bagi industri kecil dan industri menengah	Laporan		0	[3.31.02.1.01.0004] [3.31.02.2.01.0004]
739	3.31.000004	Hasil pelaksanaan RPIK	Laporan		0	[3.31.02.2.01.0006]
740	3.31.000006	Kegiatan pemeriksaan dokumen dan/atau observasi lapangan	Laporan		4	[3.31.03.1.01.0003] [3.31.03.2.01.0003]

741	3.31.000007	Kunjungan ke Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya yang belum patuh	Laporan		4	[3.31.04.1.01.0003] [3.31.04.2.01.0003]
742	3.31.000008	Menerima atau menolak pengefektifan perizinan usaha industri dan perizinan perluasan usaha industri	Laporan		0	[3.31.03.1.01.0004] [3.31.03.2.01.0004]
743	3.31.000009	Pelaksanaan kegiatan bentuk publikasi dan diseminasi lainnya	Laporan		0	[3.31.04.1.01.0002] [3.31.04.2.01.0002]
744	3.31.000010	Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lain terkait Sektor Industri lingkup Provinsi	Laporan		0	[3.31.04.1.01.0001] [3.31.04.2.01.0001]
745	3.31.000011	Pelaksanaan kegiatan penyusunan Dashboard Sistem Informasi Eksekutif	Laporan		0	[3.31.04.1.01.0002] [3.31.04.2.01.0002]
746	3.31.000012	Pelaksanaan kegiatan sistem Pendukung Keputusan	Laporan		0	[3.31.04.1.01.0002] [3.31.04.2.01.0002]
747	3.31.000013	Pelaksanaan Pemberian fasilitas Kepada industri kecil dan menengah	Laporan		32	[3.31.02.1.01.0005] [3.31.02.2.01.0005]
748	3.31.000014	Pelaksanaan pemeriksaan lapangan untuk menilai pemenuhan komitmen perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri	Laporan		72	[3.31.03.1.01.0004] [3.31.03.2.01.0004]
749	3.31.000015	Pelaksanaan Penguatan kapasitas kelembagaan IKM	Laporan		0	[3.31.02.1.01.0005] [3.31.02.2.01.0005]
750	3.31.000016	Pelaksanaan Peningkatan kompetensi internal IKM	Laporan		0	[3.31.02.1.01.0005] [3.31.02.2.01.0005]
751	3.31.000017	Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek SIINas kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri	Laporan		1	[3.31.04.1.01.0001] [3.31.04.2.01.0001]
752	3.31.000018	Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Laporan		0	[3.31.02.1.01.0003] [3.31.02.2.01.0003]
753	3.31.000019	Pembangunan kawasan industri	Laporan		0	[3.31.02.1.01.0002] [3.31.02.2.01.0002]
754	3.31.000020	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Laporan		0	[3.31.02.1.01.0003] [3.31.02.2.01.0003]
755	3.31.000021	Pemberian fasilitas nonfiskal untuk Perusahaan industri skala besar	Laporan		0	[3.31.02.1.01.0004] [3.31.02.2.01.0004]
756	3.31.000022	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri	Laporan		0	[3.31.02.1.01.0003] [3.31.02.2.01.0003]
757	3.31.000023	Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi	Laporan		0	[3.31.02.1.01.0003] [3.31.02.2.01.0003]
758	3.31.000024	Pengembangan kawasan peruntukan industri	Laporan		0	[3.31.02.1.01.0002] [3.31.02.2.01.0002]
759	3.31.000025	Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah	Laporan		0	[3.31.02.1.01.0002] [3.31.02.2.01.0002]
760	3.31.000026	Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri	Laporan		0	[3.31.02.1.01.0002] [3.31.02.2.01.0002]
761	3.31.000027	Peninjauan kembali RPIK setiap 5 tahun	Dokumen		0	[3.31.02.2.01.0006]
762	3.31.000029	Penyediaan Informasi dan Analisa Industri	Laporan		0	[3.31.04.1.01.0001] [3.31.04.2.01.0001]
763	3.31.000030	Penyediaan sumber pembiayaan	Laporan		0	[3.31.02.1.01.0003] [3.31.02.2.01.0003]
764	3.31.000031	Perda Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Dokumen		0	[3.31.02.1.01.0001] [3.31.02.2.01.0001]
765	3.31.000032	Permohonan verifikasi teknis dalam Perizinan usaha industri dan Perizinan Perluasan usaha industri	Laporan		0	[3.31.03.1.01.0004] [3.31.03.2.01.0004]

766	3.31.000033	Rapat Koordinasi antara Dinas dengan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya	Laporan		2	[3.31.04.1.01.0003] [3.31.04.2.01.0003]
767	3.31.000034	Rekapitulasi perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri yang diterbitkan	Laporan		2714	[3.31.03.1.01.0003] [3.31.03.2.01.0003]
768	3.31.000036	Standardisasi industri	Dokumen		32	[3.31.02.1.01.0004] [3.31.02.2.01.0004]
769	3.31.000037	Tindak lanjut kegiatan evaluasi Pemenuhan komitmen usaha dari perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri	Laporan		0	[3.31.03.1.01.0003] [3.31.03.2.01.0003]
770	3.31.000038	Verifikasi teknis perizinan industri dan perizinan perluasan industri	Laporan		96	[3.31.03.1.01.0004] [3.31.03.2.01.0004]
771	3.31.000039	Data Infrastruktur Transportasi, Infrastruktur Listrik dan Energi, Infrastruktur Pengelolaan Air Baku, Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah, Sarana Pengembangan SDM Industri, Kawasan Industri, dan RTRW Kabupaten/Kota	Data		0	[3.31.02.2.01.0009] [3.31.02.2.01.0007]
772	3.31.000040	Data Infrastruktur Transportasi, Infrastruktur Listrik dan Energi, Infrastruktur Pengelolaan Air Baku, Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah, Sarana Pengembangan SDM Industri, Kawasan Industri, dan RTRW Provinsi	Data		0	[3.31.02.1.01.0007] [3.31.02.1.01.0009]
773	3.31.000041	Data Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal di Kabupaten/Kota	Data		13	[3.31.02.2.01.0008]
774	3.31.000042	Data Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal di Provinsi	Data		0	[3.31.02.1.01.0010]
775	3.31.000043	Data PDRB Industri Kabupaten/Kota, Tenaga Kerja Industri, Investasi Industri, Jumlah dan Jenis Perusahaan Industri, Kawasan Industri, Sentra IKM	Data		0	[3.31.02.2.01.0010]
776	3.31.000044	Data PDRB Industri Provinsi, Tenaga Kerja Industri, Investasi Industri, Jumlah dan Jenis Perusahaan Industri, Kawasan Industri, Sentra IKM	Data		0	[3.31.02.1.01.0008]
777	3.31.000045	Data perizinan berusaha yang dimiliki perusahaan industri di Provinsi	Data		0	[3.31.03.1.01.0003]
778	3.31.000046	Data persyaratan/standar kegiatan usaha berdasarkan bidang industri, skala usaha, dan tingkat risiko di Provinsi	Data		0	[3.31.03.1.01.0004] [3.31.03.1.01.0003]
779	3.31.000047	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan Jumlah investasi	Data		2714	[3.31.03.2.01.0003]
780	3.31.000048	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan	Data		0	[3.31.03.2.01.0004] [3.31.03.2.01.0003]
781	3.31.000049	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan	Data		2714	[3.31.03.2.01.0004] [3.31.03.2.01.0003]
782	3.31.000050	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan tingkat risiko, satuan perusahaan	Data		2714	[3.31.03.2.01.0003] [3.31.03.2.01.0004]
783	3.31.000051	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota dalam tahap pembangunan	Data		96	[3.31.03.2.01.0004] [3.31.03.2.01.0003]
784	3.31.000052	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota penerima fasilitas	Data		32	[3.31.03.2.01.0003]

785	3.31.000053	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota telah operasional	Data		0	[3.31.03.2.01.0004] [3.31.03.2.01.0003]
786	3.31.000054	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan Jumlah investasi	Data		0	[3.31.03.1.01.0003]
787	3.31.000055	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan	Data		0	[3.31.03.1.01.0004] [3.31.03.1.01.0003]
788	3.31.000056	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan	Data		0	[3.31.03.1.01.0004] [3.31.03.1.01.0003]
789	3.31.000057	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan tingkat risiko, satuan perusahaan	Data		0	[3.31.03.1.01.0003] [3.31.03.1.01.0004]
790	3.31.000058	Data perusahaan industri di Provinsi dalam tahap pembangunan	Data		0	[3.31.03.1.01.0003] [3.31.03.1.01.0004]
791	3.31.000059	Data perusahaan industri di Provinsi penerima fasilitas	Data		0	[3.31.03.1.01.0003]
792	3.31.000060	Data perusahaan industri di Provinsi telah operasional	Data		0	[3.31.03.1.01.0003] [3.31.03.1.01.0004]
793	3.31.000061	Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian di Provinsi	Data		0	[3.31.03.1.01.0004]
794	3.31.000062	Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustriandi Kabupaten/Kota	Data		72	[3.31.03.2.01.0004]
795	3.31.000063	Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen		0	[3.31.02.2.01.0001]
796	3.32.	Jumlah KK transmigrasi yang dibina	Kepala Keluarga	Provinsi: Dalam tahap pemantapan, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigrasi mampu terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sistem produksi sektor unggulan, yang berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya tahap penyesuaian. Kab: Dalam tahap kemandirian, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigrasi mampu terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sistem produksi sektor unggulan, yang berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya tahap pemantapan.	0	[3.32.04.1.01.0001] [3.32.04.2.01.0001]
797	3.32.000001	Calon lokasi yang sudah dilakukan peninjauan	Lokasi	Provinsi: Jumlah calon lokasi penempatan transmigrasi yang telah dilakukan peninjauan dan diverifikasi. Kab: Jumlah calon lokasi penempatan transmigrasi yang telah dilakukan peninjauan.	1	[3.32.03.1.01.0008] [3.32.03.2.01.0009]
798	3.32.000002	Calon Transmigran Terdaftar dan Terseleksi	Kepala Keluarga	Provinsi: Jumlah Transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan Kab: Jumlah calon transmigran yang terdaftar, terseleksi administrasi dan teknisnya.	6	[3.32.03.1.01.0014] [3.32.03.2.01.0008] [3.32.03.2.01.0011]
799	3.32.000003	Calon Transmigran atau Transmigran yang mampu implementasi hasil pelatihan	Orang	Jumlah Calon Transmigran atau Transmigran yang ikut Pelatihan dan yang mampu mengimplementasikan hasil pelatihan	6	[3.32.03.1.01.0006] [3.32.03.1.01.0010] [3.32.03.2.01.0006] [3.32.03.2.01.0012] [3.32.03.2.01.0013]
800	3.32.000004	Calon Transmigrasi atau Transmigrasi yang mampu implementasi hasil penyuluhan	Kepala Keluarga	Jumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat, dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi.	6	[3.32.03.1.01.0005] [3.32.03.1.01.0009] [3.32.03.2.01.0005] [3.32.03.2.01.0010] [3.32.03.2.01.0017]

801	3.32.000005	Calon Transmigrasi yang mendapat penyuluhan	Kepala Keluarga	Jumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat, dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi.	50	[3.32.03.1.01.0005] [3.32.03.1.01.0009] [3.32.03.2.01.0005] [3.32.03.2.01.0010] [3.32.03.2.01.0017]
802	3.32.000006	Calon transmigran atau transmigran yang mendapat pelatihan	Orang	Jumlah Calon Transmigran atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan dan mampu mengimplementasikan hasil pelatihan (satunya kepala keluarga)	2	[3.32.03.1.01.0006] [3.32.03.1.01.0010] [3.32.03.2.01.0006] [3.32.03.2.01.0012] [3.32.03.2.01.0013]
803	3.32.000007	Data kabupaten yang berpotensi menjadi calon kawasan transmigrasi	Dokumen	Dokumen usulan Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi.	0	[3.32.02.1.01.0004] [3.32.02.2.01.0004]
804	3.32.000008	Data KK asal dan tujuan	Kepala Keluarga	Jumlah Transmigran dari kabupaten/kota diluar kabupaten/kota dimana kawasan transmigrasi berada yang difasilitasi pemindahannya ke kawasan transmigrasi.	2	[3.32.03.1.01.0004] [3.32.03.2.01.0004]
805	3.32.000009	Data bangunan yang dimiliki	Unit	Jumlah bangunan satuan permukiman dan sarana prasarana yang dibangun oleh pemerintah pusat pendanaan APBN dan diserahkan kepada para transmigran di kawasan transmigrasi.	0	[3.32.03.1.01.0002] [3.32.03.1.01.0003] [3.32.03.1.01.0008] [3.32.03.1.01.0018] [3.32.03.2.01.0002] [3.32.03.2.01.0003] [3.32.03.2.01.0009] [3.32.03.2.01.0020]
806	3.32.000010	Data KK yg beradaptasi	Kepala Keluarga	Jumlah kepala keluarga yang mampu menyesuaikan diri dan jumlah kepala keluarga yang tidak mampu menyesuaikan diri. Penyesuaian lingkungan baru transmigran di kawasan transmigrasi adalah terlaksananya penyesuaian transmigrasi di lingkungan yang baru pada satuan permukiman transmigrasi dengan alat ukur jumlah KK transmigran yang mampu menyesuaikan diri di satuan permukiman transmigrasi dengan satuan kepala keluarga berdasarkan NSPK Tata cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi dan dilaksanakan oleh Bidang transmigrasi.	0	[3.32.03.1.01.0007] [3.32.03.2.01.0007]
807	3.32.000011	Data Kepala Keluarga transmigrasi yg dibina	Kepala Keluarga	Provinsi: Dalam tahap pemantapan, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigran mampu memenuhi kebutuhan hidup dari hasil produksi yang dikembangkan, yang berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan sejak berakhirnya tahap penyesuaian. Kab: Dalam tahap kemandirian, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigran mampu memenuhi kebutuhan hidup dari hasil produksi yang dikembangkan, yang berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan sejak berakhirnya tahap pemantapan.	0	[3.32.04.1.01.0001] [3.32.04.2.01.0001]
808	3.32.000012	Data KK yg ikut pelatihan	Orang	Jumlah Calon transmigran atau transmigran yang mendapatkan pelatihan.	2	[3.32.03.1.01.0006] [3.32.03.1.01.0010] [3.32.03.2.01.0006] [3.32.03.2.01.0012] [3.32.03.2.01.0013]

809	3.32.000013	Data KK yg ikut penyuluhan	Kepala Keluarga	Jumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat, dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi.	50	[3.32.03.1.01.0005] [3.32.03.1.01.0009] [3.32.03.2.01.0005] [3.32.03.2.01.0010] [3.32.03.2.01.0017]
810	3.32.000014	Data SP pemantapan dan SP penguatan	Satuan Permukiman (SP)	Provinsi: Jumlah satuan permukiman yang dikembangkan, dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi, kelembagaan, yang berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan sejak berakhirnya tahap penyesuaian. Kab: Jumlah satuan permukiman yang dikembangkan, dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi, kelembagaan, yang berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan sejak berakhirnya tahap pemantapan.	0	[3.32.04.1.01.0002] [3.32.04.2.01.0002]
811	3.32.000015	Dokumen hasil evaluasi kelayakan hunian	Dokumen	Penyiapan Lngkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonoml bagi Penduduk Setempat dan Transmigran adalah Lngkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonoml bagi Penduduk Setempat dan Transmigran yang telah disiapkan dengan alat ukur evaluasi kelayakan lingkungan dan permukiman transmigran (kriteria layak huni, layak usaha, dan layak berkembang) dengan satuan dokumen yang dilaksanakan berdasarkan NSPK ... di bidang organisasi ... Dokumen hasil evaluasi kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak Huni, layak usaha dan layak berkembang)	0	[3.32.03.1.01.0002] [3.32.03.2.01.0002]
812	3.32.000016	Dokumen hasil evaluasi	Dokumen	Penyiapan Lngkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonoml bagi Penduduk Setempat dan Transmigran adalah Lngkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonoml bagi Penduduk Setempat dan Transmigran yang telah disiapkan dengan alat ukur evaluasi kelayakan lingkungan dan permukiman transmigran (kriteria layak huni, layak usaha, dan layak berkembang) dengan satuan dokumen yang dilaksanakan berdasarkan NSPK ... di bidang organisasi ... Dokumen hasil evaluasi kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak Huni, layak usaha dan layak berkembang)	0	[3.32.03.1.01.0002] [3.32.03.2.01.0002]
813	3.32.000017	Dokumen Hasil Identifikasi	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi kabupaten yang berpotensi jadi calon Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain.	0	[3.32.02.1.01.0001] [3.32.02.2.01.0001]
814	3.32.000018	Dokumen usulan pencadangan tanah	Dokumen	Penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi adalah terlaksananya penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi dengan alat ukur dokumen usulan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi dengan satuan dokumen berdasarkan NSPK ... dan dilaksanakan oleh bidang ... Dokumen usulan pencadangan tanah dan lokasi yang diusulkan oleh kabupaten yang berpotensi menjadi pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi.	0	[3.32.02.1.01.0004] [3.32.02.2.01.0004]
815	3.32.000019	Jenis Materi pelatihan	Materi	Jumlah Jenis materi pelatihan bagi Calon Transmigran atau Transmigran yang ikut Pelatihan.	0	[3.32.03.1.01.0006] [3.32.03.1.01.0010] [3.32.03.2.01.0006] [3.32.03.2.01.0012] [3.32.03.2.01.0013]

816	3.32.000020	Jenis materi penyuluhan	Materi	Jumlah Jenis materi penyuluhan bagi Calon Transmigran atau Transmigran yang ikut penyuluhan.	0	[3.32.03.1.01.0005] [3.32.03.1.01.0009] [3.32.03.2.01.0005] [3.32.03.2.01.0010] [3.32.03.2.01.0017]
817	3.32.000021	Jenis Sarpras yang belum memenuhi kriteria	Unit	Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran adalah lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigrasi yang telah disiapkan dengan alat ukur pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang) dengan satuan dokumen yang dilaksanakan berdasarkan NSPK ... di bidang organisasi ... Jumlah bangunan satuan permukiman dan sarana prasarana yang belum dibangun oleh pemerintah pusat pendanaan APBN dan diserahkan kepada para transmigran di kawasan transmigrasi.	0	[3.32.03.1.01.0002] [3.32.03.1.01.0003] [3.32.03.1.01.0008] [3.32.03.1.01.0018] [3.32.03.2.01.0002] [3.32.03.2.01.0003] [3.32.03.2.01.0009] [3.32.03.2.01.0020]
818	3.32.000022	Jenis Sarpras yang telah memenuhi kriteria	Unit	Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran adalah lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigrasi yang telah disiapkan dengan alat ukur pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang) dengan satuan dokumen yang dilaksanakan berdasarkan NSPK ... di bidang organisasi ... Jumlah bangunan satuan permukiman dan sarana prasarana yang dibangun oleh pemerintah pusat pendanaan APBN dan diserahkan kepada para transmigran di kawasan transmigrasi.	0	[3.32.03.1.01.0002] [3.32.03.1.01.0003] [3.32.03.1.01.0008] [3.32.03.1.01.0018] [3.32.03.2.01.0002] [3.32.03.2.01.0003] [3.32.03.2.01.0009] [3.32.03.2.01.0020]
819	3.32.000023	Data kabupaten yg berpotensi jd calon kawasan transmigrasi, luasannya brp, jumlah KK	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	0	[3.32.02.1.01.0001]
820	3.32.000024	Data Kabupaten yg berpotensi menjadi pencadangan tanah utk kawasan transmigrasi	Dokumen	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk kawasan transmigrasi adalah terlaksananya Penatausahaan pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi dengan alat ukur dokumen usulan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi dengan satuan dokumen berdasarkan NSPK ... dan dilaksanakan oleh bidang ...	0	[3.32.02.1.01.0004] [3.32.02.2.01.0004]
821	3.32.000025	Kasus yang dapat diselesaikan dalam penetapan kws trans	Kasus	Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi, dengan satuan kawasan transmigrasi	0	[3.32.02.1.01.0002] [3.32.02.2.01.0002]
822	3.32.000026	Kasus yang tidak dapat diselesaikan	Kasus	Jumlah kasus yang tidak dapat diselesaikan untuk mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi, dengan satuan kawasan transmigrasi	0	[3.32.02.1.01.0002] [3.32.02.2.01.0002]
823	3.32.000027	Data jumlah Kerja sama antar provinsi dan provinsi-kabupaten/kota, kabupaten/kota-kabupaten/kota	Laporan / Dokumen	Naskah kerja sama antar pemerintah daerah yang berupa Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian Kerja Sama antar Pemerintah Daerah kabupaten/kota	1	[3.32.03.1.01.0001] [3.32.03.2.01.0001]
824	3.32.000028	Ketersediaan sarpras di lokasi penempatan	Unit	Ketersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur di lokasi kawasan transmigrasi tujuan atau di lokasi penempatan	0	[3.32.04.1.01.0002] [3.32.04.2.01.0002]

825	3.32.000029	Data Kepala Keluarga transmigran yang dibina	Kepala Keluarga	Dalam tahap pemantapan dan/atau kemandirian, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigran mampu memenuhi kebutuhan hidup dari hasil produksi yang dikembangkan, yang berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan sejak berakhirnya tahap penyesuaian.	0	[3.32.04.1.01.0001] [3.32.04.2.01.0001]
826	3.32.000030	Kepala Keluarga yang berminat mengikuti program transmigrasi (animo)	Kepala Keluarga	Jumlah penduduk asal yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi serta jumlah OPD yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi agar mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan transmigrasi	50	[3.32.03.1.01.0009] [3.32.03.2.01.0009]
827	3.32.000031	Jumlah Kepala Keluarga yang ditempatkan	Orang	Pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota adalah terlaksananya pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan alat ukur jumlah transmigran yang ditempatkan dengan satuan orang berdasarkan NSPK ... yang dilaksanakan oleh bidang ...	2	[3.32.03.1.01.0004] [3.32.03.2.01.0004]
828	3.32.000032	Kepala Keluarga yang ikut Pelatihan	Kepala Keluarga	Jumlah calon transmigrasi yang mendapatkan pelatihan (ketrampilan spesifik)	2	[3.32.03.1.01.0010] [3.32.03.2.01.0011] [3.32.03.2.01.0012]
829	3.32.000033	Jumlah Kepala Keluarga yang ikut penyuluhan	Kepala Keluarga	Jumlah penduduk asal yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi serta jumlah OPD yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi agar mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan transmigrasi	50	[3.32.03.1.01.0009] [3.32.03.2.01.0009]
830	3.32.000034	Jumlah calon transmigrasi yang mampu mengimplementasikan hasil pelatihan.	Orang	Jumlah calon transmigrasi/transmigran yang mendapatkan pelatihan	2	[3.32.03.1.01.0010] [3.32.03.2.01.0011] [3.32.03.2.01.0012]
831	3.32.000035	Jumlah Kepala Keluarga yang mampu menyesuaikan diri	Kepala Keluarga	Jumlah kawasan transmigrasi tempat transmigran menyesuaikan diri	0	[3.32.03.2.01.0007]
832	3.32.000036	Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki tanah di kawasan transmigrasi	Kepala Keluarga	Jumlah penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi yang difasilitasi penataannya	0	[3.32.03.2.01.0003]
833	3.32.000037	Jumlah Kepala Keluarga yang telah menerima SHM	Kepala Keluarga	Dalam tahap kemandirian, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigran mampu terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sistem produksi sektor unggulan, yang berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya tahap pemantapan	0	[3.32.04.2.01.0001]
834	3.32.000038	Kepala Keluarga yang tidak mampu menyesuaikan diri	Kepala Keluarga	Jumlah kawasan transmigrasi tempat transmigran menyesuaikan diri	0	[3.32.03.2.01.0007]
835	3.32.000039	Laporan hasil koordinasi kerja sama	Laporan	Naskah kerjasama antar pemerintah daerah yang berupa Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian Kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	1	[3.32.03.1.01.0001] [3.32.03.2.01.0001]
836	3.32.000040	Laporan hasil sinkronisasi kerja sama	Laporan	Naskah kerjasama antar pemerintah daerah yang berupa Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian Kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	1	[3.32.03.1.01.0001] [3.32.03.2.01.0001]

837	3.32.000041	Lokasi yang diusulkan	Kawasan	Penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi adalah terlaksananya penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi dengan alat ukur dokumen usulan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi dengan satuan dokumen berdasarkan NSPK ... dan dilaksanakan oleh bidang ...	0	[3.32.02.2.01.0003] [3.32.02.2.01.0004]
838	3.32.000042	Lokasi kawasan yang memiliki potensi	Kawasan	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	0	[3.32.02.2.01.0001]
839	3.32.000043	Lokasi penempatan	Lokasi	Pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota adalah terlaksananya pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan alat ukur jumlah transmigran yang ditempatkan dengan satuan orang berdasarkan NSPK ... yang dilaksanakan oleh bidang ...	0	[3.32.03.2.01.0004]
840	3.32.000044	lokasi yang di usulkan	Lokasi	Penyediaan dokumen perwujudan kawasan transmigrasi adalah tersedianya dokumen perwujudan kawasan yang dijadikan dasar untuk pembangunan permukiman transmigrasi berdasarkan NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani ketransmigrasian.	0	[3.32.02.2.01.0003] [3.32.02.2.01.0004]
841	3.32.000045	Lokasi yang telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Lokasi	Jumlah lokasi transmigrasi yang telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi	0	[3.32.03.1.01.0018] [3.32.03.2.01.0019]
842	3.32.000046	Luas tanah	Hektar	Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi adalah tersedianya tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi	0	[3.32.02.1.01.0002] [3.32.02.1.01.0003] [3.32.02.2.01.0002] [3.32.02.2.01.0003]
843	3.32.000047	Luas tanah pembangunan kawasan transmigrasi	Hektar	Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi adalah tersedianya tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi dengan alat ukur luas tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi berdasarkan NSPK ... dan dilaksanakan oleh bidang ...	0	[3.32.02.1.01.0003] [3.32.02.1.01.0004] [3.32.02.2.01.0003] [3.32.02.2.01.0004]
844	3.32.000048	Luasan tanah utk pembangunan kawasan	Hektar	Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi adalah tersedianya tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi dengan alat ukur luas tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi berdasarkan NSPK ... dan dilaksanakan oleh bidang ...	0	[3.32.02.1.01.0003] [3.32.02.1.01.0004] [3.32.02.2.01.0003] [3.32.02.2.01.0004]
845	3.32.000049	Data Permasalahan yg belum, sedang, dan sudah diselesaikan	Kasus	Advokasi dan musyawarah penetapan kawasan adalah terlaksananya advokasi dan musyawarah penetapan kawasan transmigrasi dengan alat ukur jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan dengan satuan kawasan transmigrasi berdasarkan NSPK ... dan dilaksanakan oleh bidang ...	0	[3.32.02.1.01.0002] [3.32.02.1.01.0001] [3.32.02.2.01.0001] [3.32.02.2.01.0002]
846	3.32.000050	Satuan Permukiman yang dikembangkan	SP	Jumlah satuan permukiman yang dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur sosial, ekonomi, dan kelembagaan, yang berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya tahap pemantapan, dengan satuan Satuan Permukiman (SP)	0	[3.32.04.1.01.0002] [3.32.04.2.01.0002]

847	3.32.000051	sertifikasi tanah	Sertifikat	Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi adalah tersedianya tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi dengan alat ukur luas tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi berdasarkan NSPK ... dan dilaksanakan oleh bidang ...	0	[3.32.02.1.01.0004] [3.32.02.1.01.0003] [3.32.02.2.01.0003] [3.32.02.2.01.0004]
848	3.32.000052	Transmigran yang diberangkatkan	Kepala Keluarga	Jumlah transmigran yang mendapatkan layanan pengangkutan dari provinsi asal sampai ke embarkasi	0	[3.32.03.1.01.0011] [3.32.03.1.01.0015] [3.32.03.1.01.0004] [3.32.03.1.01.0016] [3.32.03.2.01.0004] [3.32.03.2.01.0014] [3.32.03.2.01.0018]
849	3.32.000053	Transmigran yang ditampung	Kepala Keluarga	Jumlah transmigran yang mendapatkan layanan penampungan di provinsi daerah asal	0	[3.32.03.1.01.0012] [3.32.03.2.01.0015]
850	3.32.000054	Transmigran yang memperoleh layanan kesehatan	Kepala Keluarga	Jumlah transmigran yang mendapatkan layanan kesehatan di penampungan provinsi daerah asal	0	[3.32.03.1.01.0013] [3.32.03.2.01.0016]
851	3.32.000055	Transmigran yang mendapatkan pendampingan	Kepala Keluarga	Jumlah transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan provinsi sampai ke lokasi	0	[3.32.03.1.01.0016] [3.32.03.2.01.0018]
852	3.32.000056	transmigran yang mengikuti penyuluhan sebelum keberangkatan	Orang	Jumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi yang mendapatkan penyuluhan agar mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan transmigrasi.	0	[3.32.03.1.01.0005] [3.32.03.1.01.0009] [3.32.03.2.01.0017] [3.32.03.2.01.0005] [3.32.03.2.01.0010]
853	3.32.000057	Transmigran yang telah diberikan bantuan non-standar	Paket	Jumlah bantuan non-standar yang diberikan kepada transmigran	0	[3.32.03.1.01.0017]
854	3.32.000058	transmigran yang telah diberikan bantuan permodalan	Paket	Jumlah bantuan permodalan yang diberikan kepada transmigrasi	2	[3.32.03.2.01.0019]
855	3.32.000059	Transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan	Kepala Keluarga	Jumlah transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan	2	[3.32.03.1.01.0014] [3.32.03.2.01.0011] [3.32.03.2.01.0008]
856	4.01.000004	Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen		17	[4.01.02.1.02.0001]
857	4.01.000006	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan		1	[4.01.02.1.02.0003]
858	4.01.000007	Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen		1	[4.01.02.1.02.0004]
859	4.01.000008	Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen		1	[4.01.02.1.02.0005]
860	4.01.000010	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen		1	[4.01.03.1.01.0002]
861	4.01.000015	Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen		14	[4.01.03.1.03.0001]
862	4.01.000016	Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Dokumen		11	[4.01.03.1.03.0002]
863	4.01.000017	Kerja Sama yang Dievaluasi	Laporan		1	[4.01.03.1.03.0003]
864	4.01.000018	Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Unit		4	[4.01.04.1.01.0001]
865	4.01.000019	Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga		5	[4.01.04.1.01.0002]
866	4.01.000020	Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen		2	[4.01.04.1.02.0001]
867	4.01.000021	Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen		5	[4.01.04.1.02.0002]
868	4.01.000022	Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen		1	[4.01.04.1.02.0003]

869	4.01.000023	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen		1	[4.01.04.1.03.0001]
870	4.01.000042	Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan		3	[4.01.07.1.01.0001]
871	4.01.000043	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan		12	[4.01.07.1.01.0002]
872	4.01.000044	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan		2	[4.01.07.1.01.0003]
873	4.01.000048	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	100	[4.01.07.1.03.0001]
874	4.01.000049	Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen		2	[4.01.07.1.03.0002]
875	4.01.000050	Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen		3	[4.01.07.1.03.0003]
876	4.01.000079	Orang yang Menerima Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Orang		87	[4.01.09.3.04.0001] [4.01.12.4.03.0001]
877	4.01.000134	Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen		2	[4.01.02.2.02.0001]
878	4.01.000135	Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen		8	[4.01.02.2.02.0002]
879	4.01.000153	Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen		12	[4.01.03.2.03.0001]
880	4.01.000154	Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen		12	[4.01.03.2.03.0002]
881	5.01.000002	Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dokumen	Jumlah bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan dalam rangka musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penangan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan	1	[5.01.02.2.01.0006]
882	5.01.000003	Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	Jumlah berita acara dari hasil pelaksanaan forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.	2	[5.01.02.1.01.0004] [5.01.02.2.01.0004]
883	5.01.000004	Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	Jumlah berita acara yang dihasilkan dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPd	1	[5.01.02.1.01.0003] [5.01.02.2.01.0003]
884	5.01.000005	Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	Jumlah Berita Acara hasil pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota. Musrenbang Kabupaten/Kota adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.	2	[5.01.02.2.01.0005]

885	5.01.000007	Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	Buku Profil Pembangunan Daerah adalah buku yang berisi data dan informasi tentang kondisi umum, visi, misi dan capaian program dan kegiatan pembangunan	1	[5.01.02.1.02.0004] [5.01.02.2.02.0003]
886	5.01.000012	Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	Jumlah dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah. Dokumen dimaksud dapat berupa laporan hasil penerapan SIPD dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan SIPD dalam pembangunan	1	[5.01.02.1.04.0002] [5.01.02.2.04.0002]
887	5.01.000019	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD yang Ditetapkan	3	[5.01.02.2.01.0007]
888	5.01.000022	Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	Jumlah dokumen rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD yang disusun	2	[5.01.02.1.01.0001] [5.01.02.2.01.0001]
889	5.01.000030	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja selama 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan dan tahunan.	4	[5.01.02.1.03.0003] [5.01.02.2.03.0003]
890	5.01.000031	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pembangunan Manusia	116	[5.01.03.1.01.0007] [5.01.03.2.01.0007]
891	5.01.000033	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Perekonomian	28	[5.01.03.1.02.0003] [5.01.03.2.02.0003]
892	5.01.000035	Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Infrastruktur	12	[5.01.03.1.03.0003] [5.01.03.2.03.0003]
893	5.01.000037	Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang berisi Formulir Pengendalian Perencanaan dan Formulir Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana diatur	4	[5.01.02.1.03.0001] [5.01.02.2.03.0001]
894	5.01.000046	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kali	Jumlah pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	1	[5.01.02.1.01.0003] [5.01.02.2.01.0003]
895	5.01.000048	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau konsultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	4	[5.01.03.1.03.0002] [5.01.03.2.03.0002]
896	5.01.000054	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Infrastruktur	4	[5.01.03.1.03.0003] [5.01.03.2.03.0003]

897	5.01.000060	Perangkat Daerah yang mengikuti Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.	17	[5.01.02.1.01.0004] [5.01.02.2.01.0004]
898	5.01.000061	Peserta Konsultasi Publik	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	320	[5.01.02.1.01.0003] [5.01.02.2.01.0003]
899	5.01.000064	Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2	[5.01.02.1.01.0002] [5.01.02.2.01.0002]
900	5.02.000001	Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen		2	[5.02.02.1.01.0001] [5.02.02.2.01.0001]
901	5.02.000002	Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen		2	[5.02.02.1.01.0002] [5.02.02.2.01.0002]
902	5.02.000003	RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen		40	[5.02.02.1.01.0003] [5.02.02.2.01.0003]
903	5.02.000004	Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen		40	[5.02.02.1.01.0004] [5.02.02.2.01.0004]
904	5.02.000006	Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen		40	[5.02.02.1.01.0006] [5.02.02.2.01.0006]
905	5.02.000007	Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen		2	[5.02.02.1.01.0007] [5.02.02.2.01.0007]
906	5.02.000008	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen		2	[5.02.02.1.01.0008] [5.02.02.2.01.0008]
907	5.02.000009	Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen		2	[5.02.02.1.01.0009] [5.02.02.2.01.0009]
908	5.02.000010	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen		0	[5.02.02.1.01.0010] [5.02.02.2.01.0010]
909	5.02.000011	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen		0	[5.02.02.1.01.0011] [5.02.02.2.01.0011]
910	5.02.000012	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen		0	[5.02.02.1.01.0012] [5.02.02.2.01.0012]
911	5.02.000013	Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Orang		40	[5.02.02.1.01.0013]
912	5.02.000016	Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan		2	[5.02.02.1.02.0003]
913	5.02.000017	Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan		2	[5.02.02.1.02.0004]
914	5.02.000019	Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Laporan		2	[5.02.02.1.02.0006]
915	5.02.000020	BLUD yang Diasistensi	Lembaga		23	[5.02.02.1.02.0007]
916	5.02.000021	Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Dokumen		2	[5.02.02.1.02.0008]

917	5.02.000022	Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen		2	[5.02.02.1.02.0009]
918	5.02.000023	Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen		2	[5.02.02.1.02.0010]
919	5.02.000024	Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Orang		40	[5.02.02.1.02.0011]
920	5.02.000025	Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Dokumen		63	[5.02.02.1.02.0012]
921	5.02.000026	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen		9100	[5.02.02.1.03.0001] [5.02.02.2.02.0001]
922	5.02.000028	Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen		82	[5.02.02.1.03.0003] [5.02.02.2.02.0003]
923	5.02.000030	Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen		80	[5.02.02.1.03.0005] [5.02.02.2.02.0005]
924	5.02.000031	Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen		12	[5.02.02.1.03.0006] [5.02.02.2.02.0006]
925	5.02.000032	Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan		276	[5.02.02.1.03.0007]
926	5.02.000034	Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen		68	[5.02.02.1.03.0009] [5.02.02.2.02.0009]
927	5.02.000035	Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen		1	[5.02.02.1.03.0010] [5.02.02.2.02.0010]
928	5.02.000036	Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		40	[5.02.02.1.03.0011] [5.02.02.2.02.0011]
929	5.02.000039	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan		19	[5.02.02.1.04.0003] [5.02.02.2.03.0003]

930	5.02.000040	Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan		63	[5.02.02.1.04.0004] [5.02.02.2.03.0004]
931	5.02.000041	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen		2	[5.02.02.1.04.0005]
932	5.02.000043	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen		2	[5.02.02.1.04.0007] [5.02.02.2.03.0007]
933	5.02.000044	Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen		2	[5.02.02.1.04.0008] [5.02.02.2.03.0008]
934	5.02.000045	Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen		1	[5.02.02.1.04.0009] [5.02.02.2.03.0009]
935	5.02.000047	Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang		40	[5.02.02.1.04.0011]
936	5.02.000050	Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan		1	[5.02.02.1.05.0002] [5.02.02.2.04.0002]
937	5.02.000051	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan		1	[5.02.02.1.05.0003] [5.02.02.2.04.0003]
938	5.02.000052	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan		1	[5.02.02.1.05.0004] [5.02.02.2.04.0004]
939	5.02.000054	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Laporan		1	[5.02.02.1.05.0006] [5.02.02.2.04.0006]
940	5.02.000056	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan		4	[5.02.02.1.05.0008] [5.02.02.2.04.0008]
941	5.02.000057	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan		2	[5.02.02.1.05.0009] [5.02.02.2.04.0009]
942	5.02.000058	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan		6	[5.02.02.1.05.0010]
943	5.02.000060	Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen		2	[5.02.02.1.06.0002] [5.02.02.2.05.0002]
944	5.02.000061	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Orang		40	[5.02.02.1.06.0003]
945	5.02.000062	Standar Harga yang Disusun	Dokumen		2	[5.02.03.1.01.0001] [5.02.03.2.01.0001]
946	5.02.000066	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan		8	[5.02.03.1.01.0005] [5.02.03.2.01.0005]
947	5.02.000067	Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan		69	[5.02.03.1.01.0006] [5.02.03.2.01.0006]
948	5.02.000068	Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan		58	[5.02.03.1.01.0007] [5.02.03.2.01.0007]
949	5.02.000069	Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan		5	[5.02.03.1.01.0008] [5.02.03.2.01.0008]
950	5.02.000072	Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan		122	[5.02.03.1.01.0011] [5.02.03.2.01.0011]

951	5.02.000079	Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		12	[5.02.04.1.01.0005]
952	5.02.000093	DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen		40	[5.02.02.2.01.0005]
953	5.02.000101	Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		40	[5.02.02.2.01.0013]
954	5.02.000117	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen		2	[5.02.02.2.03.0005]
955	5.02.000123	Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		40	[5.02.02.2.03.0011]
956	5.02.000124	BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga		23	[5.02.02.2.03.0012]
957	5.02.000135	Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan		6	[5.02.02.2.04.0010]
958	5.02.000138	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		40	[5.02.02.2.05.0003]
959	5.02.000156	Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		5600 00	[5.02.04.2.01.0005]
960	5.03.000001	Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Dokumen	Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN adalah dokumen yang memuat informasi mengenai telaah kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, keadaan demografis dan geografis dari instansi setempat, serta keuangan untuk melaksanakan pengadaan ASN.	3	[5.03.02.1.01.0001] [5.03.02.2.01.0001]
961	5.03.000003	Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen		1091	[5.03.02.1.01.0003] [5.03.02.2.01.0003]
962	5.03.000004	Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan		0	[5.03.02.1.01.0004] [5.03.02.2.01.0004]
963	5.03.000005	Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Dokumen		0	[5.03.02.1.01.0005] [5.03.02.2.01.0005]
964	5.03.000006	Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen		438	[5.03.02.1.01.0006] [5.03.02.2.01.0006]
965	5.03.000007	Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Laporan		0	[5.03.02.1.01.0007]
966	5.03.000008	Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga		0	[5.03.02.1.01.0008] [5.03.02.2.01.0008]
967	5.03.000009	Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Dokumen		0	[5.03.02.1.01.0009] [5.03.02.2.01.0009]
968	5.03.000010	Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen		415	[5.03.02.1.01.0010] [5.03.02.2.01.0010]
969	5.03.000011	Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen		1650 0	[5.03.02.1.01.0011] [5.03.02.2.01.0011]
970	5.03.000012	Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan		0	[5.03.02.1.01.0012] [5.03.02.2.01.0012]
971	5.03.000013	Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen		1110	[5.03.02.1.02.0001] [5.03.02.2.02.0001]

972	5.03.000014	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan		1700	[5.03.02.1.02.0002] [5.03.02.2.02.0002]
973	5.03.000015	Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen		50	[5.03.02.1.02.0003] [5.03.02.2.02.0003]
974	5.03.000016	ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang		1474	[5.03.02.1.03.0001] [5.03.02.2.03.0001]
975	5.03.000017	Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen		0	[5.03.02.1.03.0002] [5.03.02.2.03.0002]
976	5.03.000018	Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen		0	[5.03.02.1.03.0003] [5.03.02.2.03.0003]
977	5.03.000019	Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen		40	[5.03.02.1.03.0004]
978	5.03.000020	Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen		0	[5.03.02.1.03.0005] [5.03.02.2.03.0005]
979	5.03.000021	ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	Orang		92	[5.03.02.1.03.0006]
980	5.03.000022	Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Laporan		0	[5.03.02.1.03.0007] [5.03.02.2.03.0007]
981	5.03.000023	ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang		0	[5.03.02.1.03.0008] [5.03.02.2.03.0008]
982	5.03.000025	ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Orang		0	[5.03.02.1.03.0010]
983	5.03.000026	Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Laporan		0	[5.03.02.1.03.0011]
984	5.03.000027	Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Laporan		0	[5.03.02.1.03.0012]
985	5.03.000028	Fungsional ASN yang Dibina	Orang		200	[5.03.02.1.03.0013]
986	5.03.000029	Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Dokumen		300	[5.03.02.1.03.0014]
987	5.03.000030	Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Laporan		0	[5.03.02.1.03.0015] [5.03.02.2.03.0015]
988	5.03.000031	Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen		4	[5.03.02.1.04.0001] [5.03.02.2.04.0001]
989	5.03.000032	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen		8185	[5.03.02.1.04.0002] [5.03.02.2.04.0002]
990	5.03.000033	Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan		0	[5.03.02.1.04.0003] [5.03.02.2.04.0003]
991	5.03.000034	ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang		0	[5.03.02.1.04.0004] [5.03.02.2.04.0004]
992	5.03.000035	ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang		0	[5.03.02.1.04.0005] [5.03.02.2.04.0005]
993	5.03.000036	Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen		0	[5.03.02.1.04.0006] [5.03.02.2.04.0006]
994	5.03.000037	ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang		4000	[5.03.02.1.04.0007] [5.03.02.2.04.0007]
995	5.03.000038	Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan		9	[5.03.02.1.04.0008] [5.03.02.2.04.0008]
996	5.03.000039	Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen		12	[5.03.02.1.04.0009] [5.03.02.2.04.0009]
997	5.03.000040	Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan		0	[5.03.02.1.04.0010] [5.03.02.2.04.0010]
998	5.03.000047	Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Dokumen		0	[5.03.02.2.01.0007]

999	5.03.000059	ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang		40	[5.03.02.2.03.0004]
1000	5.03.000061	ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan	Orang		0	[5.03.02.2.03.0006]
1001	5.03.000064	Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen		0	[5.03.02.2.03.0009]
1002	5.03.000065	ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	Orang		0	[5.03.02.2.03.0010]
1003	5.03.000066	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Laporan		0	[5.03.02.2.03.0011]
1004	5.03.000067	Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Dokumen		0	[5.03.02.2.03.0012]
1005	5.03.000068	ASN Fungsional yang Dibina	Orang		200	[5.03.02.2.03.0013]
1006	5.03.000069	ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang		300	[5.03.02.2.03.0014]
1007	5.04.000001	Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen		42	[5.04.02.1.01.0001] [5.04.02.2.01.0001]
1008	5.04.000002	Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen		0	[5.04.02.1.01.0002] [5.04.02.2.01.0002]
1009	5.04.000003	ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang		5000	[5.04.02.1.01.0003] [5.04.02.2.01.0003]
1010	5.04.000004	Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	Dokumen		325	[5.04.02.1.01.0004]
1011	5.04.000005	Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	Dokumen		0	[5.04.02.1.02.0001]
1012	5.04.000006	Dokumen Lembaga Sertifikasi	Dokumen		0	[5.04.02.1.02.0002]
1013	5.04.000007	ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	Orang		5	[5.04.02.1.02.0003]
1014	5.04.000008	Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Laporan		0	[5.04.02.1.02.0004] [5.04.02.2.02.0004]
1015	5.04.000009	Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Dokumen		0	[5.04.02.1.02.0005] [5.04.02.2.02.0005]
1016	5.04.000010	Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen		0	[5.04.02.1.02.0006]
1017	5.04.000011	ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Orang		0	[5.04.02.1.02.0007]

1018	5.04.000012	Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Dokumen		0	[5.04.02.1.02.0008]
1019	5.04.000013	ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang		0	[5.04.02.1.03.0001] [5.04.02.2.03.0001]
1020	5.04.000014	ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang		0	[5.04.02.1.03.0002] [5.04.02.2.03.0002]
1021	5.04.000015	ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang		0	[1.01.02.3.06.0063] [5.04.02.1.03.0003]
1022	5.04.000016	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Nilai Akreditasi		0	[5.04.02.1.03.0004] [5.04.02.2.03.0004]
1023	5.04.000017	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Laporan		0	[5.04.02.1.03.0005]
1024	5.04.000021	Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Dokumen		0	[5.04.02.2.01.0004]
1025	5.04.000022	Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen		42	[5.04.02.2.02.0001]
1026	5.04.000023	Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	Lembaga		0	[5.04.02.2.02.0002]
1027	5.04.000024	ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang		4	[5.04.02.2.02.0003]
1028	5.04.000027	Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen		0	[5.04.02.2.02.0006]
1029	5.04.000028	Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan		4	[5.04.02.2.02.0007]
1030	5.04.000029	Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen		100	[5.04.02.2.02.0008]

1031	5.04.000032	ASN Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang		0	[5.04.02.2.03.0003]
1032	5.04.000034	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten atau Kota	Laporan		0	[5.04.02.2.03.0005]
1033	5.05.000002	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan		1	[5.05.02.1.01.0002] [5.05.02.2.01.0002]
1034	5.05.000003	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan		1	[5.05.02.1.01.0003]
1035	5.05.000040	Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen		2	[5.05.02.1.04.0001] [5.05.02.2.04.0001]
1036	7.01.000001	Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat	Dokumen		0	[7.01.02.6.01.0001]
1037	7.01.000002	Peralatan dan Mebel yang Disediakan untuk Rumah Dinas Lurah	Unit		0	[7.01.02.6.01.0002]
1038	7.01.000003	Peralatan dan Mebel yang Disediakan untuk Kantor Lurah	Unit		22	[7.01.02.6.01.0003]
1039	7.01.000004	Kantor Lurah Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Berat	Unit		0	[7.01.02.6.01.0004]
1040	7.01.000005	Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang	Unit		0	[7.01.02.6.01.0005]
1041	7.01.000006	Dokumen Rencana Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi	Dokumen		0	[7.01.02.6.01.0006]
1042	7.01.000007	Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelompok Masyarakat		1	[7.01.02.6.02.0001]
1043	7.01.000008	Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan	Dokumen		5	[7.01.02.6.02.0002]
1044	7.01.000009	Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Laporan		5	[7.01.02.6.02.0003]
1045	7.01.000011	Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Laporan		5	[7.01.02.6.02.0005]
1046	7.01.000014	Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Laporan		5	[7.01.02.6.02.0008]
1047	7.01.000019	Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas	Dokumen		0	[7.01.02.6.03.0004]
1048	7.01.000021	Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Laporan		1	[7.01.02.6.04.0002]
1049	7.01.000022	Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Laporan		1	[7.01.02.6.04.0003]
1050	7.01.000023	Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Laporan		1	[7.01.02.6.04.0004]
1051	7.01.000024	Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan	Laporan		12	[7.01.02.6.05.0001]
1052	7.01.000025	Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan dan Pemakaman	Dokumen		0	[7.01.02.6.05.0002]
1053	7.01.000026	Prasarana Jalan dan Jembatan pada Wilayah Kabupaten Administrasi yang Dipelihara	Unit		0	[7.01.02.6.05.0003]

1054	7.01.000027	Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada Wilayah Kabupaten Administrasi yang Dibangun	Unit		0	[7.01.02.6.05.0004]
1055	7.01.000028	Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		1	[7.01.02.2.01.0001]
1056	7.01.000029	Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen		0	[7.01.02.2.01.0002]
1057	7.01.000030	Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen		1	[7.01.02.2.02.0001]
1058	7.01.000031	Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan		1	[7.01.02.2.02.0002]
1059	7.01.000032	Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		1	[7.01.02.2.02.0003]
1060	7.01.000033	Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen		0	[7.01.02.2.03.0001]
1061	7.01.000034	Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Unit		0	[7.01.02.2.03.0002]
1062	7.01.000035	Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen		12	[7.01.02.2.04.0001]
1063	7.01.000036	Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan		0	[7.01.02.2.04.0002]
1064	7.01.000037	Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan		12	[7.01.02.2.04.0003]
1065	7.01.000038	Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyar akatan		5	[7.01.03.2.01.0001]
1066	7.01.000039	Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen		1	[7.01.03.2.01.0002]
1067	7.01.000040	Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		1	[7.01.03.2.01.0003]
1068	7.01.000041	Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyar akatan		5	[7.01.03.2.02.0001]
1069	7.01.000042	Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		5	[7.01.03.2.02.0002]
1070	7.01.000043	Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		15	[7.01.03.2.02.0003]
1071	7.01.000044	Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan		5	[7.01.03.2.02.0004]
1072	7.01.000045	Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyar akatan		15	[7.01.03.2.03.0001]
1073	7.01.000047	Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit		0	[7.01.03.2.03.0003]
1074	7.01.000048	Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan		5	[7.01.03.2.03.0004]
1075	7.01.000049	Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan		0	[7.01.03.2.03.0005]
1076	7.01.000050	Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen		0	[7.01.03.2.05.0001]

1077	7.01.000051	Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen		0	[7.01.03.2.05.0002]
1078	7.01.000052	Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen		0	[7.01.03.2.05.0003]
1079	7.01.000053	Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen		0	[7.01.03.2.05.0004]
1080	7.01.000054	Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga		20	[7.01.03.2.06.0001] [8.01.02.2.01.0006]
1081	7.01.000056	Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga		20	[7.01.03.2.06.0003]
1082	7.01.000057	Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga		14	[7.01.03.2.06.0004]
1083	7.01.000058	Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga		2	[7.01.03.2.06.0005]
1084	7.01.000060	Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga		27	[7.01.03.2.06.0007]
1085	7.01.000061	Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga		40	[7.01.03.2.06.0008]
1086	7.01.000062	Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga		29	[7.01.03.2.06.0009]
1087	7.01.000063	Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga		14	[7.01.03.2.06.0010]
1088	7.01.000064	Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga		52	[7.01.03.2.06.0011]
1089	7.01.000065	Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga		27	[7.01.03.2.06.0012]
1090	7.01.000066	Dokumen Penyelenggaraan Mukim	Dokumen		1	[7.01.03.7.04.0001]
1091	7.01.000067	Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang		1	[7.01.03.7.04.0002]
1092	7.01.000068	Dokumen Hasil Peresmian Mukim	Dokumen		1	[7.01.03.7.04.0003]
1093	7.01.000069	Laporan Pelantikan Imem Mukim	Laporan		1	[7.01.03.7.04.0004]
1094	7.01.000070	Sarana dan Prasarana Mukim yang Disediakan	Unit		1	[7.01.03.7.04.0005]
1095	7.01.000071	Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		12	[7.01.04.2.01.0001] [7.01.04.7.03.0001]
1096	7.01.000072	Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan		12	[7.01.04.2.01.0002] [7.01.04.7.03.0002]

1097	7.01.000073	Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan		0	[7.01.04.2.02.0001]
1098	7.01.000076	Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan		0	[7.01.04.7.04.0001]
1099	7.01.000077	Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang		0	[7.01.05.2.01.0001]
1100	7.01.000078	Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang		1	[7.01.05.2.01.0002]
1101	7.01.000079	Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang		0	[7.01.05.2.01.0003]
1102	7.01.000080	Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang		0	[7.01.05.2.01.0004]
1103	7.01.000082	Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Lembaga Masyarakat		0	[7.01.05.2.01.0006]
1104	7.01.000083	Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen		12	[7.01.05.2.01.0007]
1105	7.01.000084	Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen		12	[7.01.05.2.01.0008]
1106	7.01.000085	Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen		8	[7.01.06.2.01.0001]
1107	7.01.000086	Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		8	[7.01.06.2.01.0002]
1108	7.01.000087	Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		8	[7.01.06.2.01.0003]
1109	7.01.000088	Laporan Fasilitas dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		0	[7.01.06.2.01.0004]
1110	7.01.000089	Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen		8	[7.01.06.2.01.0005]
1111	7.01.000090	Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen		0	[7.01.06.2.01.0006]
1112	7.01.000091	Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen		8	[7.01.06.2.01.0007]
1113	7.01.000092	Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen		5	[7.01.06.2.01.0008]
1114	7.01.000093	Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen		8	[7.01.06.2.01.0009]

1115	7.01.000094	Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen		8	[7.01.06.2.01.0010]
1116	7.01.000095	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen		12	[7.01.06.2.01.0011]
1117	7.01.000096	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen		12	[7.01.06.2.01.0012]
1118	7.01.000097	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen		1	[7.01.06.2.01.0013]
1119	7.01.000098	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen		0	[7.01.06.2.01.0014]
1120	7.01.000099	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Pengelasan Batas Desa	Dokumen		4	[7.01.06.2.01.0015]
1121	7.01.000100	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen		2	[7.01.06.2.01.0016]
1122	7.01.000101	Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan		8	[7.01.06.2.01.0017]
1123	7.01.000102	Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan		8	[7.01.06.2.01.0018]
1124	8.01.000001	Anggota Paskibraka	Orang	Anggota Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/ menurunkan duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional/pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.	72	[8.01.02.1.01.0012] [8.01.02.2.01.0001] [8.01.02.2.01.0008]
1125	8.01.000002	Calon Paskibraka	Orang	Para pelajar yang melamar untuk mengikuti seleksi Paskibraka	348	[8.01.02.1.01.0012] [8.01.02.2.01.0008]
1126	8.01.000003	Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan	Dialog Interaktif dan Diskusi bersama untuk memberikan penguatan kepada peserta terkait pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan kepada para calon anggota paskibraka	1	[8.01.02.1.01.0010] [8.01.02.2.01.0010]
1127	8.01.000004	Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Kegiatan	Memberikan ruang aktivitas, pelatihan, pengajaran, dan sosialisasi bagi anggota paskibraka dan anggota purnapaskibraka untuk meningkatkan pemahaman terkait ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, serta siap untuk menjadi generasi muda yang menjadi contoh dari generasi muda lainnya dalam membangun NKRI	1	[8.01.02.1.01.0008] [8.01.02.2.01.0007]
1128	8.01.000005	Kelengkapan Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Unit	Forum Dialog dan Pelatihan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Calon Anggota Paskibraka dan Anggota Paskibraka	1	[8.01.02.1.01.0010] [8.01.02.2.01.0007]
1129	8.01.000006	Kelengkapan pada Pembentukan Paskibraka	Orang	Penyediaan kebutuhan administrasi, seleksi, dan pelatihan calon anggota paskibraka	37	[8.01.02.1.01.0012] [8.01.02.2.01.0008]
1130	8.01.000007	Kelengkapan pada pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	Kegiatan Forum dialog, diskusi interaktif, dll terkait pemberian pembinaan lanjutan terkait pancasila dan wawasan kebangsaan bagi anggota purna paskibraka duta pancasila	1	[8.01.02.1.01.0011] [8.01.02.2.01.0009]
1131	8.01.000008	Kelengkapan Pelaksanaan Pembentukan Paskibraka	Unit	Penyediaan seluruh kebutuhan para calon anggota paskibraka dalam proses rekrutment dan seleksi	1	[8.01.02.1.01.0012] [8.01.02.2.01.0008]

1132	8.01.000009	Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Unit	Penyediaan seluruh kebutuhan para anggota paskibraka dalam melaksanakan tugas pengibaran bendera	1	[8.01.02.1.01.0009] [8.01.03.2.01.0006]
1133	8.01.000010	Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	Penyediaan sarana dan prasarana, serta segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas purna paskibraka duta pancasila	1	[8.01.02.1.01.0010] [8.01.02.2.01.0010]
1134	8.01.000011	Kelengkapan Pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Unit	Penyediaan ruang diskusi, pelatihan dan pengajaran kepada anggota paskibraka dan purnapaskibraka	1	[8.01.02.1.01.0008] [8.01.02.2.01.0007]
1135	8.01.000012	Kelengkapan Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	Pemberian ruang diskusi, pelatihan dan pengajaran kepada anggota purna paskibraka duta pancasila	1	[8.01.02.1.01.0011] [8.01.02.2.01.0009]
1136	8.01.000013	Kelengkapan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	Penyediaan sarana dan prasarana dalam melakukan seleksi dan pengangkatan purnapaskibraka duta pancasila	1	[8.01.02.1.01.0007] [8.01.02.2.01.0011]
1137	8.01.000014	Narasumber atau fasilitator kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	para pelatih dan pengajar dalam memberikan pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka	2	[8.01.02.1.01.0008] [8.01.02.1.01.0012] [8.01.02.2.01.0008] [8.01.02.2.01.0009]
1138	8.01.000015	Narasumber atau fasilitator pada pembentukan Paskibraka	Orang	para pengajar dan fasilitator dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka	9	[8.01.02.1.01.0012] [8.01.02.2.01.0008]
1139	8.01.000016	Narasumber atau Pelatih dalam Pembentukan Paskibraka	Orang	para pengajar dan pelatih dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka	4	[8.01.02.1.01.0012] [8.01.02.2.01.0008]
1140	8.01.000017	Pamong/Pengasuh	Orang	Para pamong dan pengasuh angota paskibraka selama pelatihan	9	[8.01.02.1.01.0009] [8.01.02.1.01.0012] [8.01.02.2.01.0008] [8.01.03.2.01.0006]
1141	8.01.000018	Panitia Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka	Orang	Panitia dalam proses seleksi dan rekrutment calon anggota paskibraka	16	[8.01.02.1.01.0012] [8.01.02.2.01.0008]
1142	8.01.000019	Pelatih Paskibraka	Orang	para pengajar dan pelatih dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka	4	[8.01.02.1.01.0012] [8.01.02.2.01.0008]
1143	8.01.000020	Peningkatan kompetensi bidang karakter Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan pembentukan karakter kebangsaan	1	[8.01.02.1.01.0011] [8.01.02.2.01.0009]
1144	8.01.000021	Peningkatan kompetensi kecerdasan estetika (olahrasa) Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi kecerdasan estetika (olahrasa)	1	[8.01.02.1.01.0011] [8.01.02.2.01.0009]
1145	8.01.000022	Peningkatan kompetensi kecerdasan kinestetik (olahraga) Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi kecerdasan kinestetik (olahraga)	1	[8.01.02.1.01.0011] [8.01.02.2.01.0009]
1146	8.01.000023	Peningkatan kompetensi kepemimpinan Pancasila Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi kepemimpinan	1	[8.01.02.1.01.0011] [8.01.02.2.01.0009]
1147	8.01.000024	Peningkatan kompetensi literasi dan komunikasi Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi literasi dan komunikasi	1	[8.01.02.1.01.0011] [8.01.02.2.01.0009]
1148	8.01.000025	Peserta Calon Paskibraka	Orang	penyediaan sarana, prasarana, dan kebutuhan calon anggota paskibraka	348	[8.01.02.1.01.0012] [8.01.02.2.01.0008]
1149	8.01.000026	Peserta Kegiatan Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	Penyediaan sarana, prasarana, uang saku, dan kebutuhan para calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka dalam melaksanakan diskusi pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100	[8.01.02.1.01.0008] [8.01.02.1.01.0012] [8.01.02.2.01.0007] [8.01.02.2.01.0008]
1150	8.01.000027	Peserta Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Orang	Penyediaan sarana, prasarana, uang saku, dan kebutuhan para anggota dan anggota purnapaskibraka dalam melaksanakan kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	2	[8.01.02.1.01.0008] [8.01.02.2.01.0007]

1151	8.01.000028	Peserta Kegiatan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	Pembiayaan terkait kebutuhan peserta dalam pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka duta pancasila	2	[8.01.02.2.01.0009]
1152	8.01.000029	Peserta Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	Pembiayaan untuk peserta Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	200	[8.01.02.1.01.0010] [8.01.02.2.01.0010]
1153	8.01.000030	Peserta Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	Pembiayaan untuk peserta Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	200	[8.01.02.1.01.0010]
1154	8.01.000031	Purnapaskibraka	Orang	pembentukan purnapaskibraka	72	[8.01.02.1.01.0007] [8.01.02.2.01.0011]
1155	8.01.000032	Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	Penangkatan, penetapan, dan pelantikan purnapaskibraka duta pancasila	1	[8.01.02.1.01.0007] [8.01.02.1.01.0011] [8.01.02.2.01.0009] [8.01.02.2.01.0011]
1156	8.01.000033	Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan	Pembiayaan terkait penyediaan ruang diskusi dengan pembelajaran terkait Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2	[8.01.02.1.01.0010] [8.01.02.2.01.0010]
1157	8.01.000034	Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi	Orang	Pembiayaan terkait Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota Paskibraka	16	[8.01.02.1.01.0012] [8.01.02.2.01.0008]
1158	8.01.000035	Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Orang	Penyediaan sarana, prasarana, kebutuhan dan honor Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas Paskibraka	16	[8.01.02.1.01.0009] [8.01.03.2.01.0006]
1159	8.01.000036	Training of Trainer Kepamongan	Kegiatan	Penyelenggaraan TOT Kepamongan bagi Anggota Paskibraka dan Anggota Purnapaskibraka	1	[8.01.02.1.01.0011] [8.01.02.1.01.0008] [8.01.02.2.01.0009] [8.01.02.2.01.0007]
1160	8.01.000037	Transportasi dalam Pembentukan Paskibraka	Unit	kebutuhan fasilitas sarana transportasi dan biaya transportasi dalam pembentukan paskibraka	1	[8.01.02.1.01.0012] [8.01.02.2.01.0008]
1161	8.01.000038	Transportasi pada pembentukan paskibraka	Unit	kebutuhan fasilitas sarana transportasi dan biaya transportasi pada pembentukan paskibraka	2	[8.01.02.1.01.0012] [8.01.02.2.01.0008]
1162	8.01.000039	Transportasi Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Unit	kebutuhan fasilitas sarana transportasi dan biaya transport pelaksana tugas paskibraka	3	[8.01.02.1.01.0001] [8.01.02.1.01.0009] [8.01.03.2.01.0006]
1163	8.01.000040	Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Penyediaan ruang diskusi dan dialog terkait penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	3	[8.01.02.1.01.0002] [8.01.02.2.01.0002]
1164	8.01.000041	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Penyediaan forum dialog dan diskusi, serta sosialisasi terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10	[8.01.02.1.01.0003] [8.01.02.2.01.0003]
1165	8.01.000042	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Penyediaan forum diskusi dan dialog terkait Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	30	[8.01.02.1.01.0004] [8.01.02.2.01.0004]
1166	8.01.000043	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	Pelaksanaan Monev dan Penyusunan Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1	[8.01.02.1.01.0005] [8.01.02.2.01.0005]

1167	8.01.000044	Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	Pelaksanaan kegiatan forum diskusi terkait Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1	[8.01.02.1.01.0006] [8.01.02.2.01.0006]
1168	8.01.000045	Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	Pembentukan dan Penetapan Purnapaskibraka Duta Pancasila	2	[8.01.02.1.01.0007] [8.01.02.2.01.0011]
1169	8.01.000046	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1	[8.01.02.1.01.0008] [8.01.02.2.01.0007]
1170	8.01.000047	Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1	[8.01.02.1.01.0009] [8.01.03.2.01.0006]
1171	8.01.000048	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1	[8.01.02.1.01.0010] [8.01.02.2.01.0010]
1172	8.01.000049	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1	[8.01.02.1.01.0011] [8.01.02.2.01.0009]
1173	8.01.000050	Paskibraka	Orang	Program Paskibraka adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila	72	[8.01.02.1.01.0012] [8.01.02.2.01.0008]
1174	8.01.000051	Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	3	[8.01.03.1.01.0001] [8.01.03.2.01.0001]
1175	8.01.000052	Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Daftar Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	4	[8.01.03.1.01.0002] [8.01.03.2.01.0002]
1176	8.01.000053	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Rincian Orang Pertahun (3 Tahun Terakhir) beserta unsur-unsur yang mengikuti (masyarakat umum, pelajar, ormas dll) yang mengikuti sosialisasi dan bimtek, terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1000 018	[8.01.03.1.01.0003] [8.01.03.2.01.0003]
1177	8.01.000054	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Rincian Orang Pertahun (3 Tahun Terakhir) beserta unsur-unsur yang mengikuti (masyarakat umum, pelajar, ormas dll) yang mengikuti sosialisasi, bimtek, pelatihan terkait koordinasi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1000 018	[8.01.03.1.01.0004] [8.01.03.2.01.0004]

1178	8.01.000055	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	Laporan Capaian Kinerja terkait Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Tahun Sebelumnya	9	[8.01.03.1.01.0005] [8.01.03.2.01.0005]
1179	8.01.000057	Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	Daftar dan Lampiran Kebijakan Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2	[8.01.04.1.01.0002]
1180	8.01.000059	Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (dalam 3 Tahun Terakhir)	110	[8.01.04.1.01.0004]
1181	8.01.000061	Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2	[8.01.05.1.01.0001] [8.01.05.2.01.0001]
1182	8.01.000062	Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	Daftar Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2	[8.01.05.1.01.0002] [8.01.05.2.01.0002]
1183	8.01.000063	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi, Bimpek Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (3 Tahun Terakhir)	235	[8.01.05.1.01.0003] [8.01.05.2.01.0003]
1184	8.01.000068	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	86	[8.01.06.1.01.0003] [8.01.06.2.01.0003]
1185	8.01.000069	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	80	[8.01.06.1.01.0004] [8.01.06.2.01.0004]
1186	8.01.000070	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Tahun Sebelumnya)	228	[8.01.06.1.01.0005] [8.01.06.2.01.0005]
1187	8.01.000073	Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Jumlah dan Daftar Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (tiga Tahun Sebelumnya)	13	[8.01.02.1.01.0002] [8.01.02.2.01.0002]

1188	8.01.000075	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	daftar dan Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Koordinasi (Diklat, Sosialisasi, Pelatihan dll) di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	850	[8.01.02.2.01.0004]
1189	8.01.000091	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	Daftar dan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi, Bimtek, Kursus, dan/atau Pelatihan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50	[8.01.04.1.01.0003] [8.01.04.2.01.0003]
1190	8.01.000104	Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Laporan Pelaksanaan & Dokumen SK Anggota Forkopimda)	2	[8.01.06.1.01.0006] [8.01.06.2.01.0006]

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004